

PROFIL DESA PEDULI GAMBUT

KEPENGHULUAN TELUK NILAP
KECAMATAN KUBU BABUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU



PROFIL DESA KEPENGULUAN
TELUK NILAP
KECAMATAN KUBU BABUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU



PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT
BADAN RESTORASI GAMBUT
KEDEPUTIAN BIDANG EDUKASI, SOSIALISASI,
PARTISIPASI DAN KEMITRAAN

LAPORAN HASIL PEMETAAN SOSIAL DAN SPASIAL

Kepenghuluan Teluk Nilap Tahun 2019

Penyusun:


- | | |
|--------------------|--|
| 1. Mas Untung HN | sebagai Fasilitator Kepenghuluan Teluk Nilap |
| 2. Hamidi | sebagai Enumerator Kepenghuluan Teluk Nilap |
| 3. Andri Mulia Ers | sebagai Enumerator Kepenghuluan Teluk Nilap |
| 4. Erwin Suryana | sebagai Tim Asistensi Sosial |
| 5. Mairaji | sebagai Tim Asistensi Spasial |

Lembar Persetujuan Desa :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Penghulu dan Sekretaris Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir menyatakan bahwa hasil ini telah disampaikan kepada perwakilan masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap serta menyatakan menyetujui laporan hasil pemetaan sosial yang dilakukan oleh Tim Penyusun dari Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia di atas.

Kepenghuluan Teluk Nilap, 19 April 2019

Sekretaris Desa


(AZWAR)

Penghulu


(H. GAMAL BACIK, S.E.)



KATA PENGANTAR

Laporan Profil Desa Peduli Gambut ini merupakan hasil dari kegiatan pemetaan sosial yang telah dilaksanakan pada bulan Februari-April 2018 dan bekerjasama dengan para pihak, mulai dari tingkat provinsi, kecamatan, dan desa. Melalui proses ini, telah disampaikan informasi tentang konsep restorasi ekosistem, kegiatan yang direncanakan dan telah dilaksanakan, rencana kelola serta proses pemetaan desa yang telah mengadaptasi umpan balik dari para pihak akan rencana yang disepakati dan persetujuan legal.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Badan Restorasi Gambut (BRG) yang sudah mempercayakan kami sebagai tim pemetaan sosial. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap yang mendukung kami dalam menyelesaikan pekerjaan sebagai tim pemetaan sosial. Semoga hasil yang kami peroleh dapat menjadi penunjang dalam segala aktivitas dalam mengembangkan potensi lahan gambut dan sumber daya manusia di Kepenghuluan Teluk Nilap.

....., April 2019

Tim Pemetaan Sosial Kepenghuluan Teluk Nilap

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Metodologi dan Pengumpulan Data	3
1.4. Struktur Laporan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI	
2.1. Lokasi Desa.....	7
2.2. Orbitasi	8
2.3. Batas dan Luas Wilayah.....	9
2.4. Fasilitas Umum dan Sosial.....	13
BAB III LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT	
3.1. Topografi.....	19
3.2. Geomorfologi dan Jenis Tanah	20
3.3. Iklim dan Cuaca	23
3.4. Keanekaragaman Hayati.....	27
3.5. Hidrologi di Lahan Gambut	29
3.6. Kerentanan Ekosistem Gambut.....	33
BAB IV KEPENDUDUKAN	
4.1. Data Umum Penduduk.....	35
4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk	38
4.3. Tingkat Kepadatan Penduduk	39
BAB V PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	
5.1. Jumlah Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan.....	41
5.2. Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan	43
5.3. Angka Partisipasi Pendidikan.....	46
5.4. Jumlah Korban Bencana Kebakaran dan Asap Tahun 2015	47
BAB VI KESEJARAHAN DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT	
6.1. Sejarah Desa	49
6.2. Etnis, Bahasa, dan Agama	51
6.3. Legenda	52
6.4. Kesenian Tradisional	54
6.5. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	54

BAB VII PEMERINTAHAN DAN KEPEMIMPINAN

7.1.	Pembentukan Pemerintahan	55
7.2.	Struktur Pemerintahan Desa.....	56
7.3.	Kepemimpinan Tradisional.....	59
7.4.	Aktor Berpengaruh.....	60
7.5.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Penguasaan Lahan	62
7.6.	Mekanisme/Forum Pengambilan Keputusan Desa	63

BAB VIII KELEMBAGAAN SOSIAL

8.1.	Organisasi Sosial Formal	65
8.2.	Organisasi Sosial Nonformal	66
8.3.	Jejaring Sosial Desa	67

BAB IX PEREKONOMIAN DESA

9.1.	Pendapatan dan Belanja Desa.....	71
9.2.	Aset Desa	73
9.3.	Tingkat Pendapatan Warga.....	74
9.4.	Industri dan Pengolahan di Desa	79
9.5.	Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut	84

BAB X PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM

10.1.	Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam	87
10.2.	Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam	93
10.3.	Penguasaan Lahan Gambut atau Parit/Handil	96
10.4.	Peralihan Hak Atas Tanah (termasuk Lahan Gambut)	97
10.5.	Sengketa Tanah di Lahan Gambut dan Non-Gambut	98

BAB XI PROYEK PEMBANGUNAN DESA.

11.1.	Program Pembangunan Desa	101
11.2.	Program Kerjasama dengan Pihak Lain	104

BAB XII PERSEPSI TERHADAP RESTORASI GAMBUT

12.1.	Persepsi Terhadap Restorasi Gambut	105
-------	--	-----

BAB XIII PENUTUP

13.1.	Kesimpulan	107
13.2.	Saran	109

DAFTAR PUSTAKA.....	111
---------------------	-----

LAMPIRAN	113
----------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Orbitasi Kepenghuluan Teluk Nilap	9
Tabel 2	Batas wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap	9
Tabel 3	Fasilitas Sosial Kepenghuluan Teluk Nilap	13
Tabel 4	Fasilitas Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap	16
Tabel 5	Kedalaman dan Kematangan Tanah Gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap	22
Tabel 6	Suhu dan Curah Hujan Kepenghuluan Teluk Nilap Tahun 2018	23
Tabel 7	Kalender Musim	25
Tabel 8	Bagan Kecenderungan Perubahan Keanekaragaman Hayati	28
Tabel 9	Hidrologi di Lahan Gambut	30
Tabel 10	Hotspot tahun 2014 – 2018 di Kepenghuluan Teluk Nilap	33
Tabel 11	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kepenghuluan Teluk Nilap	36
Tabel 12	Jumlah Kepala Keluarga di Kepenghuluan Teluk Nilap	36
Tabel 13	Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2018	37
Tabel 14	Tingkat Pendidikan Tahun 2018	38
Tabel 15	Laju Pertumbuhan Penduduk	39
Tabel 16	Tingkat Kepadatan Penduduk	39
Tabel 17	Jumlah Tenaga Pendidik Kepenghuluan Teluk Nilap	41
Tabel 18	Jumlah Tenaga Kesehatan Kepenghuluan Teluk Nilap	42
Tabel 19	Sarana dan Prasarana Pendidikan	43
Tabel 20	Sarana dan Prasarana Kesehatan	46
Tabel 21	Jumlah Anak Berdasarkan Usia di Fasilitas Pendidikan Kepenghuluan Teluk Nilap	47
Tabel 22	Korban Karhutla Kepenghuluan Teluk Nilap	47
Tabel 23	Penganut Agama dan Kepercayaan	52
Tabel 24	Sejarah Penghulu Kepenghuluan Teluk Nilap	56
Tabel 25	Tupoksi Kepenghuluan Teluk Nilap	28
Tabel 26	Analisa Tokoh/ Aktor Di Kepenghuluan Teluk Nilap	61
Tabel 27	Organisasi Sosial Formal di Kepenghuluan Teluk Nilap	65
Tabel 28	Organisasi Sosial Non Formal di Kepenghuluan Teluk Nilap	66
Tabel 29	Hubungan Kelembagaan Kepenghuluan Teluk Nilap	68
Tabel 30	Sumber Pendapatan Kepenghuluan Teluk Nilap Tahun 2018	72
Tabel 31	Belanja Kepenghuluan Teluk Nilap	72
Tabel 32	Aset Desa	73
Tabel 33	Jenis Mata Pencarian Kepenghuluan Teluk Nilap	74
Tabel 34	Tingkat Pendapatan Warga Berdasarkan Rumah Tangga	76
Tabel 35	Matrik Profil Aktivitas dalam analisis gender	78
Tabel 36	Matrik Profil Akses dan Kontrol Dalam Analisis Gender:	79
Tabel 37	Pedagang Pengumpul Desa	80
Tabel 38	Usaha Produksi & Pengolahan	81
Tabel 39	Potensi dan masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut	85
Tabel 40	Pemanfaatan Lahan di Kepenghuluan Teluk Nilap	89
Tabel 41	Pola penguasaan dan Pemanfaatan Lahan di Kepenghuluan Teluk Nilap	90
Tabel 42	Transek Kepenghuluan Teluk Nilap	91
Tabel 43	Program dan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan	102
Tabel 44	Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan Kepenghuluan	102
Tabel 45	Program dan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	103
Tabel 46	Program danKegiatan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Lokasi Kepenghuluan Teluk Nilap	8
Gambar 2.	Peta Administrasi Kepenghuluan Teluk Nilap	12
Gambar 3.	Fasilitas Sosial di Kepenghuluan Teluk Nilap	14
Gambar 4.	Fasilitas Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap	17
Gambar 5.	Pengambilan Sampel Tanah Gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap	22
Gambar 6.	Hidrologi di Lahan Gambut	31
Gambar 7.	Fasilitas Pendidikan Kepenghuluan Teluk Nilap	45
Gambar 8.	Diagram Penganut agama dan Kepercayaan	52
Gambar 9.	Struktur Organisasi Kepenghuluan Teluk Nilap	57
Gambar 10.	Diagram Venn Hubungan Kelembagaan Kepenghuluan Teluk Nilap	69
Gambar 11.	Diagram Pendapatan Kepenghuluan Teluk Nilap	72
Gambar 12.	Diagram Belanja Kepenghuluan Teluk Nilap 2018	73
Gambar 13.	Diagram Mata Pencarian Masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap	75
Gambar 14.	Usaha Produksi & Pengolahan	82
Gambar 15.	Diagram Pemanfaatan lahan	89
Gambar 16.	Peta Pemanfaatan Lahan Kepenghuluan Teluk Nilap	89
Gambar 17.	Transek Kepenghuluan Teluk Nilap	92
Gambar 18.	Peta Penguasaan Lahan Kepenghuluan Teluk Nilap	95



Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjelaskan bahwa Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, wilayah setingkat Desa mengambil nama berdasarkan penyebutan lokal yaitu **Kepenghuluan**, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2015 Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan. Dalam Pasal 1 ayat 7 Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 8 tahun 2015 penjelasan mengenai Kepenghuluan sama dengan penjelasan Desa yang dimaksud dalam pasal 1 UU Desa. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bahkan sebelum UU Desa diterbitkan sudah menggunakan penyebutan Kepenghuluan untuk wilayah setingkat Desa, sebagaimana ada dalam beberapa Perda yang pernah diterbitkan di Kabupaten ini¹.

Salah satu Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan bagian dari Kecamatan Kubu Babussalam adalah Kepenghuluan Teluk Nilap. Kepenghuluan ini berada pada bagian Utara Barat Laut Provinsi Riau dengan letak astronomis 01° 54' 00" - 02° 02' 00" Bujur Timur (BT) dan 100° 24' 00" - 100° 42' 00" Lintang Utara (LU) dengan ketinggian 6 – 10 meter di atas permukaan laut (mdpl) (BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2018).

¹ Lihat misalnya Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 7 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Penghapusan, Penggabungan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan.

Kepenghuluan Teluk Nilap adalah daerah dataran rendah dimana pada bagian selatan mengalir dua sungai yaitu Sungai Tolang Kanan (Sungai Simpang Kanan) dan Sungai Tolang Kiri (Sungai Simpang Kiri) yang kemudian bertemu menjadi Sungai Kubu. Pemetaan partisipatif tahun 2019 mendapatkan luas indikatif Kepenghuluan Teluk Nilap sebesar 31.759,37 Ha atau 317,5937 Km².

Tanah gambut pada umumnya ditemukan setelah radius 500 meter hingga kurang lebih 3 km dari tepi sungai-sungai alam, tetapi warga umumnya tidak tahu posisi kubah gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap. Saat ini kondisi pemanfaatan kawasan gambut berupa lahan pemukiman, lahan pertanian, dan semak belukar. Luas kawasan gambut dari hasil pemetaan partisipatif 2019, adalah 22.344,96 Ha atau 70,36% dari luas Kepenghuluan Teluk Nilap. Kedalaman tanah gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap beragam, dengan kedalaman sekitar 1 meter hingga di beberapa lokasi memiliki kedalaman lebih dari 6-7 meter. Berdasarkan klasifikasi ketebalan serta tingkat kematangan material gambut, tanah gambut di Kepenghuluan ini terbagi empat yaitu gambut dangkal (50-100 centimeter (cm)) bertingkat kematangan saprik dan hemik; gambut sedang (100-200 cm) bertingkat kematangan saprik dan hemik; gambut dalam (200-300 cm) bertingkat kematangan saprik, hemik dan fibrik; serta gambut sangat dalam (>300 cm) bertingkat kematangan hemik dan fibrik.

Kondisi tutupan lahan serta pemanfaatan tanah dan sumber daya alam berkontribusi atas keberlangsungan kualitas maupun kuantitas keanekaragaman hayati di Kepenghuluan ini. Berawal untuk pemenuhan subsistensi warga yang beralih menjadi produksi intensif komoditas mengikuti permintaan pasar, perubahan lahan hutan untuk budidaya pertanian mengubah lanskap dengan dominasi pertanian monokultur Kelapa Sawit. Pemanfaatan hasil hutan kayu serta kebakaran berulang menyebabkan penurunan populasi jenis-jenis pohon yang makin sulit ditemukan dibandingkan beberapa dekade lalu. Perubahan tutupan lanskap serta perburuan untuk konsumsi dan perdagangan merupakan faktor utama menurunnya kualitas dan kuantitas beberapa jenis fauna di Kepenghuluan Teluk Nilap.

Ketergantungan pada tanah dan kekayaan alam masih cukup besar terlihat dari mata pencaharian di Kepenghuluan Teluk Nilap. Pertanian merupakan tumpuan dasar ekonomi masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap. Pertanian yang dimaksud tak terbatas pada kegiatan produksi komoditas dengan membudidayakan tanaman tertentu tetapi juga adanya kegiatan distribusi komoditas pertanian oleh warga di Kepenghuluan Teluk Nilap.

Sejarah Kepenghuluan Teluk Nilap berawal dari pembukaan lahan pertanian untuk sawah tadah hujan yang terkonsentrasi di tepian sungai alam dengan lahan berjenis tanah mineral, kemudian berkembang budidaya tanaman seperti jagung, ubi kayu, sayur-sayuran dan palawija. Kepenghuluan Teluk Nilap memiliki kekayaan alam tidak hanya hutan dan lahan budidaya pertanian, juga minyak dan gas (migas) dalam tahap operasi produksi.

Pada dekade tahun 1990-an masyarakat mulai membudidayakan kelapa sawit yang monokultur. Sawit yang dianggap primadona awal dekade tahun 2000-an, mendorong pembukaan lahan kawasan gambut oleh masyarakat dan juga oleh korporasi yang mendapatkan HGU. Pembukaan lahan disertai dengan pembuatan parit-parit mengeringkan lahan gambut untuk melakukan penanaman di lahan tersebut. Tetapi keringnya lahan gambut menyebabkan kebakaran berulang-ulang dan meninggalkan tutupan lanskap berupa semak belukar yang merupakan area terluas di Kepenghuluan ini. Saat ini kawasan pemukiman merupakan pemanfaatan lahan terkecil di Kepenghuluan Teluk Nilap.

Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dibentuk Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 untuk percepatan pemulihan fungsi hidrologis gambut yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut adalah tugas yang diemban BRG. Program Desa Peduli Gambut (DPG) yang dilaksanakan BRG meliputi kegiatan fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan, perencanaan tata ruang desa dan kawasan perdesaan, identifikasi dan resolusi konflik, pengakuan dan legalisasi hak dan akses, kelembagaan untuk pengelolaan hidrologi dan lahan, kerja sama antar desa, pemberdayaan ekonomi, penguatan pengetahuan lokal dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana kebakaran gambut. Untuk mencapai tujuan dan program Desa Peduli Gambut (DPG) oleh BRG tepat sasaran, maka dibutuhkan data profil desa yang berupa peta (spasial) dan non spasial (profil manusia dari segi sosial, ekonomi dan potensi-potensi lainnya).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pembuatan profil desa peduli gambut melalui pemetaan partisipatif adalah menyediakan data dasar sosial, potensi ekonomi, kerentanan dan spasial yang terkait dengan pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan ekosistem gambut di desa gambut. Dengan demikian, profil Desa Peduli Gambut merupakan salah satu dokumen di desa yang dapat digunakan dalam proses perencanaan pembangunan serta integrasi aspek perlindungan dan pemanfaatan ekosistem gambut di tingkat desa dan kawasan.

1.3 Metodologi dan Pengumpulan Data

Waktu kegiatan penyusunan laporan profil desa peduli gambut dimulai sejak pelaksanaan FGD I pada tanggal 20 Februari 2019, FGD II di tanggal 4 Maret 2019 dan berakhir pada saat finalisasi draf laporan dengan adanya FGD III pada tanggal Sedangkan Wawancara, Observasi, dan Studi dokumen mulai dilaksanakan setelah pelaksanaan FGD I hingga sebelum FGD III berlangsung.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, seperti berikut ini:

- 1) Wawancara informan kunci, terdiri dari serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap masyarakat di Kepenghuluan Teluk Nilap yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. Wawancara bersifat kualitatif, mendalam, dan semi-terstruktur
- 2) Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*, FGD) melibatkan 10-20 anggota yang berasal dari masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap yang telah dipilih dan diundang berdasarkan keterwakilan kelompok yang ada di desa, yaitu para Aparatur Desa, Ketua Dusun (RT), Tokoh Masyarakat serta masyarakat desa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Setelah itu, mencatat proses diskusi dan kemudian memberikan komentar mengenai hasil pengamatan. Diskusi Terfokus dalam pemetaan partisipatif DPG ini dilaksanakan 3 (tiga) kali:
 - a. FGD I, agenda FGD I ini adalah sosialisasi terkait program pemetaan partisipatif desa peduli gambut. Diskusi awal ini juga menggali data- data yang outputnya adalah: Peta sketsa desa, deliniasi peta citra, kalender musim, bagan kecenderungan perubahan, penguasaan ruang, diagram venn, identifikasi sumber penghidupan/mata pencaharian.
 - b. FGD II, agenda diskusi tahap kedua ini adalah konfirmasi dan klarifikasi terkait data yang terkumpul baik itu sosial maupun spasial.
 - c. FGD III, diskusi tahap akhir ini beragendakan pengesahan terkait data-data yang sudah terkumpul (final)
- 3) Pengamatan langsung dilakukan di Kepenghuluan Teluk Nilap dengan mengumpulkan data berupa informasi mengenai kondisi geografis, fasilitas umum dan fasilitas sosial, sumber daya alam yang tersedia, kegiatan program yang sedang berlangsung, interaksi sosial dan lain-lain.
- 4) Studi dokumen digunakan untuk mencari data sekunder dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sumber data sekunder yang akan digunakan diantaranya; kecamatan dalam angka, monografi, RPJMDes, dan peta partisipatif yang pernah dilakukan. Beberapa data yang didapatkan dari studi dokumen yaitu: lokasi desa; orbitasi; topografi; geomorfologi dan jenis tanah; data umum penduduk; jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan; angka partisipasi pendidikan; jumlah korban bencana kebakaran dan asap 2015; etnis, bahasa, dan agama; pembentukan pemerintahan; struktur pemerintahan desa; pendapatan dan belanja desa; asset desa; peralihan hak atas tanah (termasuk lahan gambut); program pembangunan desa; program kerja sama desa dengan pihak lain;

1.4 Struktur Laporan

Berikut ini struktur laporan yang terdiri dari 13 (tiga belas) bab, yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN.

Memuat latar belakang, tujuan dibuatnya profil desa, metode pengumpulan data, dan struktur penyajian profil desa.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI.

Menunjukkan letak desa, menjelaskan jarak orbitrasi desa ke pusat-pusat pemerintahan atau ekonomi (jarak desa ke kecamatan, desa tetangga, kabupaten, dan ke ibukota provinsi), menunjukkan dan menjelaskan batas dan luas wilayah desa, serta fasilitas umum dan sosial yang terdapat di desa tersebut.

BAB III LINGKUNGAN FISIK DAN EKOSISTEM GAMBUT.

Memuat tentang topografi, geomorfologi dan jenis tanah yang ada di wilayah desa, iklim dan cuaca, keanekaragaman hayati, vegetasi, kondisi hidrologi di lahan gambut, serta kondisi dari kerentanan ekosistem gambut.

BAB IV KEPENDUDUKAN.

Memuat tentang data umum penduduk, struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, laju pertumbuhan dari masyarakat di desa, dan tingkat kepadatan di desa tersebut.

BAB V KESEHATAN DAN PENDIDIKAN.

Mendeskripsikan tentang sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, kondisi ketersediaan tenaga pendidik dan kesehatan, tingkat partisipasi pendidikan warga, serta kesiapan fasilitas kesehatan menghadapi kebaakaran gambut.

BAB VI KESEJARAHAAN DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT.

Memuat tentang sejarah desa/komunitas/permukiman, etnis yang ada di desa tersebut, bahasa yang digunakan, religi yang dianut, kesenian yang pernah ataupun yang masih dipraktikkan, serta kearifan dan pengetahuan local yang dimiliki oleh masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-harinya (tidak hanya yang berkaitan dengan seni tetapi juga aktivitas ekonomi seperti bercocok tanam, mencari ikan, dan lain-lain).

BAB VII PEMERINTAH DAN KEPEMIMPINAN.

Menjelaskan tentang bagaimana proses dan perjalanan pemerintahan desa terbentuk, struktur pemerintahan di desa yang ada saat pemetaan dilakukan, bentuk dan penjelasan mengenai peran dan subjek dari kepemimpinan local/tradisional, serta actor yang berpengaruh di desa tersebut di setiap sector, baik itu ekonomi, politik, actor yang berpengaruh di kalangan perempuan, dan sebagainya.

BAB VIII KELEMBAGAAN SOSIAL.

Menjelaskan tentang organisasi sosial formal dan organisasi sosial informal yang ada di desa serta manfaat dan perannya bagi warga, juga jejaring warga yang menjelaskan bagaimana kedekatan antar lembaga tersebut dengan warga di desa.

BAB IX PEREKONOMIAN DESA/KOMUNITAS.

Memuat tentang pendapatan dan belanja desa selama 3-5 tahun terakhir, aset-aset yang dimiliki oleh desa beserta dengan penjelasan dari masing-masing kondisi dan fungsi dari aset desa tersebut, tingkat pendapatan warga beserta penjelasan mata pencaharian dari warga yang ada di desa tersebut, industri dan pengolahan yang ada di desa, serta potensi dan masalah dalam sector pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan lain-lain yang ada di desa.

BAB X PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH & SUMBER DAYA ALAM.

Menjelaskan tentang pemanfaatan lahan (*land use*), penguasaan lahan dan bentuk pengakuan, penguasaan lahan gambut dan parit/handil, peralihan hak atas tanah (termasuk di lahan gambut) dan sengketa di lahan gambut dan non-gambut.

BAB XI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN.

Penjelasan mengenai pembangunan dengan pendanaan dari Negara dan inisiatif pihak lain dalam bentuk kerjasama program.

BAB XII PERSEPSI TERHADAP RESTORASI GAMBUT.

Memuat tentang persepsi masyarakat desa terhadap restorasi gambut yang diwakili tiap komunitas dan perwakilan setiap gender yang ada di desa.

BAB XIII PENUTUP.

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

(Peta, foto, dan lain-lain).



Bab II

Gambaran Umum Lokasi

2.1 Lokasi Desa

Salah satu wilayah setingkat Desa di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang secara administratif merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kubu Babussalam adalah Kepenghuluan Teluk Nilap. Kepenghuluan Teluk Nilap terdiri dari enam Dusun, 14 Rukun Warga (RW) dan 37 Rukun Tetangga (RT). Posisi Kepenghuluan ini berada pada bagian Utara Barat Laut Provinsi Riau dengan letak astronomis $01^{\circ} 54' 00''$ - $02^{\circ} 02' 00''$ Bujur Timur (BT) dan $100^{\circ} 24' 00''$ - $100^{\circ} 42' 00''$ Lintang Utara (LU). Berada pada ketinggian 6 – 10 meter di atas permukaan laut (mdpl) (BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2018). Kepenghuluan Teluk Nilap merupakan daerah dataran rendah dimana pada bagian selatan mengalir dua sungai yaitu Sungai Tolang Kanan (Sungai Simpang Kanan) dan Sungai Tolang Kiri (Sungai Simpang Kiri) yang kemudian bertemu menjadi Sungai Kubu di wilayah kepenghuluan ini. Posisi dan letak Kepenghuluan Teluk Nilap sebagaimana terlihat pada peta berikut ini:

Gambar 1. Peta Lokasi Kepenghuluan Teluk Nilap



Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan DPG 2019.

2.2 Orbitasi

Untuk menuju Ibukota Kecamatan yang terletak di Rantau Panjang Kiri Hilir, perjalanan ditempuh melalui perjalanan darat dengan kendaraan roda empat dan roda dua tanpa ada kendaraan angkutan umum. Kondisi jalan yang dilalui selama perjalanan pada beberapa bagian badan jalan dalam kondisi rusak berlubang serta bergelombang dan beberapa bagian badan jalan dari beton maupun aspal tidak ada kerusakan ketika dilalui kendaraan. Perjalanan darat menuju ke Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir, Bagan Siapi-api dan Ibu Kota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru, ditempuh dengan akses jalan berupa jalan yang diperkeras dengan aspal dan beton yang pada beberapa bagian kondisinya sedang rusak berlubang dan bergelombang serta sebagian jalan kondisinya baik tanpa kerusakan. Perjalanan ke

Bagan Siapi-api serta Pekanbaru dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat.

Untuk mencapai Kepenghuluan ini dari Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi terdapat angkutan umum berupa kendaraan minibus ke Simpang Pelita yang melalui Kepenghuluan ini. Informasi mengenai aksesibilitas dari dan ke Kepenghuluan Teluk Nilap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Orbitasi Kepenghuluan Teluk Nilap

No	Uraian	Keterangan
1	Ke Ibukota Kecamatan Kubu Babussalam (Rantau Panjang Kiri Hilir)	
	Jarak	± 11 km
	Waktu Tempuh dengan kendaraan bermotor	± 20 menit
	Kendaraan umum ke ibukota kecamatan	Tidak ada
2	Ke Ibukota Kabupaten Rokan Hilir (Bagan Siapi-api)	
	Jarak	± 162 km
	Waktu Tempuh dengan kendaraan bermotor	± 3 Jam
	Kendaraan umum ke ibukota kabupaten	Ada
3	Ke Ibukota Provinsi Riau (Pekanbaru)	
	Jarak	± 248 km
	Waktu Tempuh dengan kendaraan bermotor	± 7 Jam
	Kendaraan umum ke ibukota provinsi	Ada

Sumber: Kepenghuluan Teluk Nilap (2017).

2.3 Batas dan Luas Wilayah

Kepenghuluan Teluk nilap adalah salah satu dari 12 wilayah setingkat desa yang ada di Kecamatan Kubu Babussalam (BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2018). Batas-batas Kepenghuluan Teluk Nilap berbatasan dengan Kepenghuluan lain di dalam dan di luar Kecamatan Kubu Babussalam. Kepenghuluan Teluk Nilap berbatasan dengan dua Kepenghuluan dalam Kecamatan Kubu Babussalam yaitu Kepenghuluan Sungai Majo serta Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya. Terdapat empat Kepenghuluan di luar Kecamatan Kubu Babussalam yang berbatasan dengan Kepenghuluan Teluk Nilap, yaitu Kepenghuluan Tanjung Leban Kecamatan Kubu, Kepenghuluan Ampaian Rotan Kecamatan Bagan Sinembah Raya, dan Kepenghuluan Bukit Selamat serta Kepenghuluan Kota Parit di Kecamatan Simpang Kanan. Berikut batas kepenghuluan sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Batas wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Kepenghuluan Sungai Majo	Kubu Babussalam
	Tanjung Leban	Kubu
Sebelah Timur	Kepenghuluan Sungai Majo	Kubu Babussalam
Sebelah Selatan	Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya	Kubu Babussalam
	Kepenghuluan Ampaian Rotan	Bagan Sinembah Raya
Sebelah Barat	Kepenghuluan Kota Parit	Simpang Kanan
	Kepenghuluan Bukit Selamat	

Sumber: Kepenghuluan Teluk Nilap (2017) & Pemetaan Partisipatif.

Batas-batas Kepenghuluan ini belum pernah ada peraturan penetapan batas-batas definitif wilayah di lapangan secara kartometrik yang lebih jelas, baik batas-batas Kepenghuluan ini sendiri maupun batas-batas antara Kepenghuluan atau Kecamatan yang bersebelahan dengan Kepenghuluan Teluk Nilap. Ketika pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam yang dimekarkan dari Kecamatan Kubu melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir No 27 tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam, pada pasal 5 ayat (3) dan (4) diterangkan bahwa batas wilayah kecamatan Kubu Babussalam dituangkan dalam peta yang tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini serta penetapan batas Kecamatan Kubu Babussalam secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Baik Peraturan Bupati maupun Peta yang mengatur batas-batas Kecamatan Kubu Babussalam dengan Kecamatan lainnya tidak pernah diterbitkan. Kepenghuluan Teluk Nilap merupakan salah satu wilayah setingkat desa di Kecamatan Kubu Babussalam yang berbatasan dengan beberapa Kecamatan lain sehingga ketiadaan peraturan Bupati serta peta yang mengatur batas-batas Kecamatan Kubu Babussalam membuat Kepenghuluan ini tidak memiliki batas-batas definitif dengan Kepenghuluan lain di luar Kecamatan.

Sedangkan Kecamatan Kubu merasa memiliki klaim batas wilayah tersendiri juga, yaitu pada peresmian pemekaran Kecamatan Kubu Babussalam Bupati Kabupaten Rokan Hilir saat itu berpidato menyatakan bahwa batas Kecamatan Kubu dan Kecamatan Kubu Babussalam adalah sungai alam, yaitu Sungai Kubu. Ketidakjelasan batas-batas antara kecamatan Kubu dan Kuba ini juga berdampak kepada batas-batas kecamatan di luar dua kecamatan tersebut. Batas-batas Kepenghuluan Bukit Selamat di Kecamatan Simpang kanan dalam Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 20 tahun 2009 hanya dinyatakan perbatasan dengan Kecamatan Kubu tanpa penjelasan lebih detail Kepenghuluan yang mana dalam Kecamatan Kubu yang menjadi batas wilayahnya.

Dalam Diskusi Kelompok Terfokus juga sempat terlontar dari peserta bahwa batas Kepenghuluan Teluk Nilap berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako. Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 24 Tahun 2002 yang mengatur tentang pembentukan Kecamatan Bangko Pusako, pada pasal 7 mengenai batas wilayah tidak sama sekali menyebutkan batas dengan Kecamatan Kubu dimana Kepenghuluan Teluk Nilap bernaung pada saat Perda tersebut diterbitkan. Tetapi dalam Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 27 Tahun 2011 dinyatakan pada pasal 5 ayat (1) huruf d., bahwa Kecamatan Kubu Babussalam di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pekaitan dan Kecamatan Bangko Pusako. Bersandar pada asas hukum '*lex post teriori derogat legi priori*' (peraturan yang baru menggantikan peraturan yang lama) maka Perda No. 27 tahun 2011 tentu yang berlaku, tetapi masalah batas-batas wilayah ini tidak hanya sekadar dilihat dalam aspek hukum, aspek-aspek lain seperti politik, sosial, budaya dan ekonomi di masing-masing wilayah serta keberadaan batas di lapangan juga perlu menjadi pertimbangan.

Luas indikatif Kepenghuluan Teluk Nilap menurut BPS Kabupaten Rokan Hilir (2018) adalah seluas 143,92 Km² atau 14.392 Ha, sedangkan Luas menurut Profil Kepenghuluan Desa Teluk Nilap (2017) adalah sebesar 32.765 Ha atau 327,65 Km². Dari hasil pemetaan partisipatif dalam penyusunan Laporan Profil DPG Kepenghuluan Teluk Nilap didapatkan luas indikatif wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap sebesar 31.759,37 Ha atau 317,5937 Km².

Tidak adanya batas definitif Kepenghuluan menyebabkan tiap lembaga pemerintahan membuat peta wilayah berdasarkan gambaran yang mereka miliki tentang wilayah desa untuk memenuhi kepentingan administrasi. Pembuatan peta-peta ini terkadang hanya dilakukan melalui proses deliniasi batas di atas meja tanpa konsultasi dengan masyarakat atau lebih jauh survei tapal batas. Perbedaan luas wilayah dalam berbagai data yang dikeluarkan bermacam instansi ini tidak hanya dialami Kepenghuluan Teluk Nilap, banyak daerah setingkat desa di Indonesia mengalami hal yang serupa. Luas hasil Pemetaan Partisipatif lebih mendekati luas wilayah Kepenghuluan ini, karena pemetaan partisipatif melalui proses diskusi bersama warga untuk mengenali dan menunjukan batas-batas wilayah dalam melakukan deliniasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), serta menggunakan beberapa titik batas yang diambil bersama warga dengan alat *Global Positioning System* (GPS) di lapangan. Meskipun masih terdapat beberapa bagian wilayah dalam peta hasil pemetaan partisipatif Kepenghuluan ini yang membutuhkan penyelesaian tapal batas dengan Kepenghuluan dan Kecamatan lain. Peta yang dihasilkan melalui pemetaan partisipatif ini di masa depan bisa digunakan sebagai alat bermusyawarah menyelesaikan masalah tapal batas wilayah dengan kepenghuluan lain.

Mengenai wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap secara administratif beserta batas-batas wilayahnya dari hasil pemetaan partisipatif dapat dilihat pada gambar peta berikut:



2.4 Fasilitas Umum dan Sosial

Tersedia sarana yang dapat digunakan oleh dan untuk kepentingan penghidupan masyarakat di Kepenghuluan Teluk Nilap berupa Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum yang pembiayaannya pembangunannya bersumber dari pemerintah hingga swadaya masyarakat. Fasilitas Sosial di Teluk Nilap terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan, olahraga, ibadah, pemakaman, tempat bersejarah, serta gedung dan kantor. Lebih detil mengenai Fasilitas Sosial yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 3. Fasilitas Sosial Kepenghuluan Teluk Nilap

No	Fasilitas	Vol	Lokasi	Kondisi	Pembiayaan
I. Pendidikan					
	PAUD Permata Bunda	1 Unit	Jl. Jenderal Sudirman	Layak	Swadaya
	PAUD An-Naziroh	1 Unit	Jl. Rasul Hasan	Layak	Swadaya
	PAUD/TK Suhada	1 Unit	Dusun Sungai Sirih	Kurang Layak	Swadaya
	MDA Nurul Iman	1 Unit	Jl. Tap III	Layak	Swadaya
	MDA Al Hidayah	1 Unit	-	Kurang layak	Swadaya
	MDA Nurul Khairat	2 unit	Jl. Jenderal Sudirman (Lintas Teluk Nilap) Jl. MDA	1 unit layak 1 unit kurang layak	Swadaya
	SDN 002 Teluk Nilap	1 Unit	Jl. Abdul Karim My	Layak	APBD Kab. Rohil
	SDN 004 Teluk Nilap	1 Unit	Jl. Jenderal Sudirman	Layak	APBD Kab. Rohil
	SMPN 2 Kubu	1 Unit	Jl. Abdul Karim My	Layak	APBD Kab. Rohil
	SMAN 1 Kubu Babussalam	1 Unit	Jl. Hang Tuah	Layak	APBD Kab. Rohil
II. Sarana Kesehatan					
1.	Posyandu Karang Taruna	1 Unit	Dusun Karya Bakti	Kurang Layak	APBKep Teluk Nilap
2.	Posyandu Bunga Durian	1 Unit	Dusun Teluk Durian	Kurang Layak	APBKep Teluk Nilap
3.	Posyandu Akasia	1 Unit	Dusun Karya Nyata	Kurang Layak	APBKep Teluk Nilap
4.	Posyandu Daun Sirih	1 Unit	Dusun Sungai Sirih	Kurang Layak	APBKep Teluk Nilap
5.	Polindes Kepenghuluan Teluk Nilap	1 Unit	Jl. Jenderal Sudirman Jl. Tap II	Layak	APBD Kab. Rohil
III. Sarana Ibadah					
1.	Masjid Nurul Bilad	1 Unit	Jl. Datuk Paduka Dusun Karya Bakti	Layak	Swadaya
2.	Masjid Nurul Khoirot	1 Unit	Dusun Karya Nyata	Layak	Swadaya
3.	Masjid Muhajirin	1 Unit	Dusun Karya Bakti	Layak	Swadaya
4.	Masjid Suhada	1 Unit	Dusun Karya Bakti	Layak	Swadaya
5.	Masjid Raudhatul Jannah	1 Unit	Dusun Teluk Durian	Layak	Swadaya
6.	Masjid Abdihi	1 Unit	Dusun Benuang	Layak	Swadaya
7.	Musala Nurul Iman	1 Unit	Sunting	Layak	Swadaya
8.	Musala Ar-Rahman	1 Unit	Jl. Lintas Tap III	Layak	Swadaya
9.	Musala Al-Ikhlas	1 Unit	Lorong I	Layak	Swadaya

10.	Musala Datuk Paduka	1 Unit	SMPN 2 Kuba	Layak	Swadaya
11.	Musala Nur Zaman	1 Unit	Lorong III	Layak	Swadaya
12.	Musala Al-Ikhlas	1 Unit	Suak Sotul	Layak	Swadaya
IV. Sarana Olahraga					
1.	Lapangan Sepakbola	1 Unit	Jl. Sudirman belakang SDN 004 Teluk Nilap	Tidak layak	APBKep Teluk Nilap
2.	Lapangan Sepakbola	1 Unit	Jl. Datuk Rambai	Tidak Layak	APBKep Teluk Nilap
3.	Lapangan Bola Voli	1 Unit	SDN 002 Teluk Nilap	Layak	
4.	Lapangan Bola Voli	1 Unit	Jl. Rasul Hasan	Layak	APBKep Teluk Nilap
5.	Lapangan Bola Voli	1 Unit	SMPN 2 Kuba	Layak	APBD Kab. Rohil
6.	Lapangan Bola Voli	1 Unit	SMAN 1 Kuba	Layak	APBD Kab. Rohil
7.	Lapangan Bola Basket	1 Unit	SDN 002 Teluk Nilap	Layak	APBD Kab. Rohil
V. Sarana Pemakaman					
1.	Tempat Pemakaman Umum (TPU) 1	1 Unit	Jl. Datuk Rambai	Kurang Layak	Wakaf
2.	TPU 2	1 Unit	Jl. Datuk Paduka	Kurang Layak	Wakaf
3.	TPU 3	1 Unit	Jl. Tanjung Selamat	Kurang Layak	Wakaf
4.	TPU 4	1 Unit	Jl. M. Yakub	Kurang Layak	Wakaf
5.	TPU 5	1 Unit	Jl. Aru Bayan	Kurang Layak	Wakaf
6.	TPU 6	1 Unit	Jl. Pusara	Kurang Layak	Wakaf
7.	TPU 7	1 Unit	Jl. Hang Tuah	Kurang Layak	Wakaf
8.	TPU 8	1 Unit	Jl. Sudirman (ujung jalan)	Tidak Layak	Wakaf
VI. Sarana Kantor & Gedung					
1.	Kantor Kepenghuluan	1 unit		Layak	APBD Kab. Rohil
2.	Kantor Karang Taruna	1 unit	-	Kurang Layak	APBKep
VII. Tempat Bersejarah					
1.	Makam Datuk Rambai	1 unit	Jl. Datuk Rambai	Layak	APBD Kab. Rohil

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DPG 2019

Gambar 3. Fasilitas Sosial di Kepenghuluan Teluk Nilap



TPU Jalan Tanjung Selamat



TPU Jalan Paduka



TPU Jalan M. Yakub



TPU Jalan Pusara Hilir



Masjid Nurul Huda Dusun Sungai Sirih (dalam proses pembangunan)



Masjid Nurul Khairot Dusun Karya Nyata ujung parit



Musala Al Huda Dusun Sungai Sirih



Musala Al Huda Dusun Sungai Sirih



Kantor Karang Taruna Kepenghuluan Teluk Nilap



Kantor Kepenghuluan Teluk Nilap

Sumber: Dokumentasi Lapangan.

Fasilitas umum di Kepenghuluan Teluk Nilap pada umumnya berhubungan dengan infrastruktur untuk transportasi yang kondisinya memerlukan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan. Infrastruktur ini tersedia agar akses warga menjadi lebih baik dalam melakukan aktifitas kehidupan masyarakat di Kepenghuluan ini. Tabel dan gambar berikut ini adalah berbagai fasilitas umum yang terdapat di Kepenghuluan Teluk Nilap:

Tabel 4. Fasilitas Umum di Kepenghuluan Teluk Nilap

No	Fasilitas	Volume	Lokasi	Kondisi	Pembiayaan
I. Jalan					
1.	Jl. M. Yakub	-	-	Layak	APBD Kab. Rohil
2.	Jl. Paduka	-	-	Layak	APBD Kab. Rohil
3.	Jl. Hangtuah	-	-	Kurang Layak	APBKep Teluk Nilap
4.	Jln . Aru Bayan	-	-	Layak	APBKep Teluk Nilap
5.	Jln . Datuk Rambe	-	-	Layak	APBD Kab. Rohil
6.	Jl. Rasul Hasan	-	-	Layak	APBD Kab. Rohil
7.	Jl. Abd Karim	-	-	Layak	APBD Kab. Rohil
8.	Jl. Datuk Paduka	-	-	Layak	APBD Kab. Rohil
9.	Jl. Bubur Kacang	-	-	Kurang Layak	APBKep Teluk Nilap
10.	Jl. Jenderal Sudirman	-	-	Layak	APBD Kab. Rohil
11.	Jl. Tap III	-	-	Layak	APBKep Teluk Nilap
12.	Jl. Tanjung Selamat	-	-	Layak	APBKep Teluk Nilap
II. Jembatan					
1.	Jembatan (Box Culvert)	1 Unit	Jl. Hang Tuah	Kurang Layak	APBKep Teluk Nilap
2.	Jembatan Lorong 4	1 Unit	Jl Sudirman Lorong 4	Layak	APBKep Teluk Nilap
3.	Jembatan Datuk Rambe	1 unit	Jl. Datuk Rambe	Layak	APBKep Teluk Nilap
4.	Jembatan Lorong 3	1 unit	Jl Rasul Hasan	Layak	APBKep Teluk Nilap
5.	Jembatan Lorong 1	1 unit	Jl. Aru Bayan	Layak	APBKep Teluk Nilap
III. Batas					
1.	Tugu/Garpura Batas Kepenghuluan Teluk Nilap dengan Kepenghuluan Tanjung Leban	1 unit	Dusun Sungai Sirih	Kurang Layak	Swadaya Masyarakat

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DPG 2019.

Gambar 4. Fasilitas Umum di Kepenghuluhan Teluk Nilap



Jembatan Lorong 4 Dusun Karya Bakti



Jembatan Lorong 1 Jl. Arubayan



Box Culvert di Jl. Hangtuah



*Tugu batas KepenghuluhanTeluk Nilap Kuba
dengan Kepenghuluhan Tanjung Leban
Kecamatan Kubu*

Sumber: Dokumentasi Lapangan.



Bab III

Lingkungan Fisik dan Ekosistem Gambut

3.1 Topografi

Kepenghuluan Teluk Nilap berada di dataran rendah dengan ketinggian 6-10 mdpl (BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2018). Di dalam wilayah Kepenghuluan ini, terdapat aliran Sungai Tolang Kanan (Simpang Kanan) dan Sungai Tolang Kiri (Simpang Kiri) yang aliran keduanya bertemu membentuk Sungai Kubu. Wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap berada di sebelah Selatan dan Utara dari aliran Sungai Tolang Kanan, dan berada di sebelah Barat dan Timur dari aliran Sungai Kubu. Parit-parit yang dibuat di Kepenghuluan Teluk Nilap pada dasarnya bermuara pada sungai-sungai yang terdapat dalam wilayah Kepenghuluan Ini.

Kepenghuluan Teluk Nilap terbagi dalam dua kawasan penguasaan secara legal administratif, yaitu Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dan Kawasan Hutan dengan status Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi dapat di Konversi (HPK). Kawasan APL terletak di bagian Timur Laut dan Barat Daya Kepenghuluan ini. Adapun Kawasan HPK berada di bagian Timur, HPT berada di bagian Tenggara, dan sisanya, dengan perkecualian kawasan APL, dari Barat ke arah Timur hingga bertemu dengan Kawasan HP, HPK dan APL di sebelah timur merupakan area HPT. Pada semua kawasan tersebut terdapat tanah mineral dan tanah gambut. Baik kawasan APL maupun Kawasan Hutan tidak memiliki perbedaan yang terlalu mencolok sebagai akibat dari pembukaan lahan dan pemanfaatan lahan untuk budidaya pertanian terutama Kelapa Sawit. Tutupan semak belukar merupakan wajah dominan lanskap Kepenghuluan Teluk Nilap, penyebabnya adalah kebakaran lahan dan hutan yang berulang setidaknya pada tahun 2014, tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2018.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 Tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional di Kepenghuluan Teluk Nilap terdapat dua kawasan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG).

Pertama adalah KHG Sungai Barumun – Sungai Kubu yang merupakan KHG lintas Provinsi pada wilayah Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau serta Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu berada di bagian barat dari aliran sungai kubu di Kepenghuluan ini. KHG yang *kedua* adalah KHG Sungai Kubu – Sungai Rokan yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir dengan wilayah yang membentang di antara dua sungai yaitu Sungai Kubu dan Sungai Rokan. KHG Sungai Kubu – Sungai Rokan pada Kepenghuluan Teluk Nilap berada pada sisi timur dari aliran Sungai Kubu.

Keberadaan Kubah Gambut merupakan salah satu ciri dalam Kawasan ekosistem gambut. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 16 tahun 2017 pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa kubah gambut sebagai areal kesatuan hidrologis yang mempunyai topografi lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, sehingga secara alami mempunyai kemampuan untuk menyerap dan menyimpan air lebih banyak, serta memasok air pada wilayah sekitarnya. Tanah gambut dapat ditemukan setelah radius 500 meter hingga kurang lebih 3 km dari tepi sungai-sungai alam, tetapi warga umumnya tidak mengetahui posisi kubah gambut pada wilayah Kepenghuluan ini.

3.2 Geomorfologi dan Jenis Tanah

Secara taksonomi tanah dapat dibedakan menjadi tanah mineral dan tanah organik. Tanah mineral memiliki bahan berdiameter $<2,0$ mm yang harus memenuhi salah satu berikut: satu, jenuh air selama <30 hari (kumulatif) setiap tahun pada tahun-tahun normal dengan kandungan C-organik $<20\%$ (berdasarkan berat); atau kedua, jenuh dengan air selama 30 hari (kumulatif) pada tahun-tahun normal (atau dikeringkan secara buatan) dan memiliki kandungan C-organik (berdasarkan berat) tidak termasuk akar hidup sebesar:

- a) Kurang dari 18% apabila fraksi mineralnya mengandung liat 60%, atau
- b) Kurang dari 12% apabila fraksi mineralnya tidak mengandung liat, dan
- c) Kurang dari $12 + (\% \text{ dikalikan } 0,1) \%$ apabila fraksi mineralnya mengandung liat $<60\%$.

Sementara tanah organik memiliki kandungan C-Organik yang lebih tinggi dari jumlah yang disebutkan diatas dan lahan gambut maupun tanah bergambut merupakan tanah dengan kandungan C-organiknya lebih tinggi daripada yang disebut diatas dalam poin 2 (klasifikasi tanah mineral). Tanah gambut terdiri dari tumpukan material vegetasi yang terdekomposisi selama ribuan tahun lalu dan selalu tergenang air sehingga membentuk tanah gambut (Suryadiputra, 2018). Berdasarkan tingkat kematangan/dekomposisi bahan organik, gambut dibedakan menjadi tiga (Suryadiputra, 2018) yaitu:

1. *Fibriik*, yaitu gambut dengan tingkat pelapukan awal (masih muda) dan lebih dari $\frac{3}{4}$ bagian volumenya berupa serat segar (kasar). Cirinya, bila gambut diperas dengan telapak tangan dalam keadaan basah, maka kandungan serat yang tertinggal di dalam telapak tangan setelah pemerasan adalah tiga perempat bagian atau lebih ($>\frac{3}{4}$);
2. *Hemik*, yaitu gambut yang mempunyai tingkat pelapukan sedang (setengah matang), sebagian bahan telah mengalami pelapukan dan sebagian lagi berupa serat. Bila diperas dengan telapak tangan dalam keadaan basah, gambut agak mudah melewati sela-sela jari-jari dan kandungan serat yang tertinggal di dalam telapak tangan setelah pemerasan adalah antara kurang dari tiga perempat sampai seperempat bagian atau lebih ($\frac{1}{4}$ dan $<\frac{3}{4}$);
3. *Saprik*, yaitu gambut yang tingkat pelapukannya sudah lanjut (matang). Bila diperas, gambut sangat mudah melewati sela jari-jari dan serat yang tertinggal dalam telapak tangan kurang dari seperempat bagian ($<\frac{1}{4}$).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menjelaskan bahwa gambut merupakan material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang belum terurai sempurna serta terakumulasi pada daerah rawa (atau genangan air). Proses pembentukan tanah gambut berawal mula adanya genangan di daerah rawa, danau dangkal atau yang secara berangsur-angsur ditumbuhi oleh tumbuhan air dan vegetasi lahan basah. Genangan tersebut dipenuhi timbunan gambut karena tumbuhan yang mati melapuk tidak sempurna dan secara bertahap membentuk lapisan-lapisan gambut. (Suryadiputra, 2018).

Kondisi Geomorfologi dan jenis tanah di Kepenghuluan Teluk Nilap terbagi dalam tanah mineral dan tanah gambut. Tanah mineral berada di tepian sungai-sungai alam yang mengalir dalam wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap baik di area semak belukar, pemukiman dan lahan pertanian. Adapun pada jarak radius setelah 500 meter hingga 3 km dari tepi sungai-sungai alam dan setelah area tanah mineral, kita akan menemukan jenis tanah gambut di Kepenghuluan ini. Tanah gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap saat ini kondisi pemanfaatannya berupa Lahan pemukiman, budidaya pertanian masyarakat dan perusahaan, ladang minyak dan gas (migas), dan semak belukar. Luas kawasan gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap dari hasil pemetaan partisipatif 2019, adalah 22.344,96 Ha atau seluas 70,36% dari luas wilayah ini. Sisanya seluas 9.414,417 Ha atau 29,64% dari luas Kepenghuluan ini adalah kawasan tanah mineral.

Menurut warga kedalaman tanah gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap memang beragam dengan kedalaman sekitar 1 meter hingga di beberapa lokasi memiliki kedalaman lebih dari 6-7 meter. Pada Kepenghuluan Teluk Nilap keberadaan tanah gambut berdasarkan kedalaman dan kematangan material gambutnya terbagi dalam empat (4) golongan seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Kedalaman dan Kematangan Tanah Gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap

No	Ketebalan Gambut	Tingkat Dekomposisi
1.	Gambut dangkal (50 cm-100 cm)	Saprik, Hemik
2.	Gambut sedang (100-200 cm)	Saprik, Hemik,
3.	Gambut dalam (200 -300 cm)	Saprik, Hemik, Fibrik
4.	Gambut sangat dalam (>300 cm)	Hemik, Fibrik

Sumber: Wawancara dan Observasi dalam Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan DPG 2019.

Gambar berikut ini memperlihatkan contoh salah satu jenis tanah gambut yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap, sebagai berikut:

Gambar 5. Pengambilan Sampel Tanah Gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap

Tanah gambut sebelum peremasan.



Tanah gambut setelah peremasan.



Tanah gambut sebelum peremasan.



Tanah gambut setelah peremasan.

Keterangan:

Lokasi Pengambilan sampel tanah gambut di Dusun Soak Sotul Kepenghuluan Teluk Nilap. Sampel gambut yang diambil memiliki tingkat kematangan Hemik yang secara fisik dapat dikenali dari warna yang coklat tua kehitaman, mempunyai tingkat pelapukan sedang, sebagian bahan telah mengalami pelapukan dan sebagian lagi berupa serat. Pada saat diperas dengan jari dalam keadaan basah, gambut hemik agak mudah melewati sela-sela jari dan kandungan serat yang tertinggal pada telapak tangan kurang dari tiga perempat ($\frac{3}{4}$) hingga seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian atau lebih.

Sumber: Dokumentasi Lapangan.

3.3 Iklim dan Cuaca

Wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap yang memiliki suhu rata-rata tahunan 26,7 °C dengan curah hujan rata-rata tahunan sebesar 2674 mm, serta terdapat curah hujan yang signifikan sepanjang tahun yang bahkan pada bulan terkering masih memiliki curah hujan lebih dari 60 mm. Mengikuti klasifikasi Iklim menurut Koppen dan Geiger, wilayah kepenghuluan ini masuk ke dalam iklim hutan hujan tropis dimana tipe iklim ini memiliki suhu rata-rata 18 °C atau lebih setiap bulannya dengan curah hujan bulanan tidak kurang dari 60 mm pada setiap bulan. Bulan terkering adalah Bulan Juli dengan curah hujan sebesar 137 mm serta bulan dengan curah hujan terbanyak adalah Oktober dan November yang memiliki curah hujan pada masing-masing bulan sebesar 300 mm. Dengan suhu rata-rata 27,3 mm, Bulan Mei adalah bulan yang paling hangat, sedangkan bulan Desember adalah bulan dengan suhu rata-rata terendah sepanjang tahun.

Tabel 6. Suhu dan Curah Hujan Kepenghuluan Teluk Nilap Tahun 2018



















Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Suhu Rata-rata (°C)	26,5	26,5	27	27,2	27,3	27,0	26,7	26,7	26,6	26,6	26,4	26,3
Suhu Minimal (°C)	21,6	21,5	22,0	22,4	22,6	22,3	22,0	22,0	22,1	22,2	22,1	21,8
Suhu Maksimal (°C)	31,4	31,6	32,0	32,0	32,0	31,7	31,5	31,4	31,2	31,1	30,8	30,9
Curah Hujan (mm)	256	176	209	211	189	153	137	209	257	300	300	277

Sumber: Climate-Data.org (2019).

Kepenghuluan Teluk Nilap sepanjang tahun mengalami dua musim utama, yaitu musim kemarau/kering dan musim hujan. Musim Hujan dimulai pada sekitar pertengahan bulan September dan berakhir sekitar awal April dengan puncak musim hujan pada bulan Desember dan Januari. Pada masa puncak musim hujan ini kerap terjadi banjir di wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap. Bulan April biasanya merupakan waktu Pancaroba dimana musim hujan mulai beralih ke musim kemarau/kering. Musim Kemarau secara penuh berlangsung dari bulan Mei hingga Agustus dan di Bulan September mulai mengalami transisi ke musim hujan. Pada saat kemarau berlangsung penuh tersebut kerentanan akan kebakaran lahan dan hutan biasanya terjadi di wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap, peristiwa Kebakaran Lahan dan Hutan biasanya berlangsung pada bulan-bulan dimana musim kemarau berlangsung penuh.

Dengan Kondisi musim yang ada, Masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap mengusahakan mata pencaharian sebagai petani dengan komoditas utama Kelapa Sawit. Terdapat pula warga yang beraktifitas mata pencaharian sebagai nelayan ikan air tawar pada sungai alam serta parit-parit di wilayah ini yang terkenal memiliki ikan air tawar melimpah oleh masyarakat sekitar Kepenghuluan ini. Informasi lebih terperinci mengenai musim, waktu kerentanan alam dalam setahun, serta produksi komoditas pertanian yang diusahakan oleh warga kepenghuluan Teluk Nilap dapat dilihat pada tabel kalender musim berikut ini:

Tabel . Kalender Musim

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	PELUANG	MASALAH
MUSIM													Penanganan sampah melalui Rumah tangga	Jangkauan dan medan lahan untuk sampai ke titik api sulit.
KERAWANAN BENCANA		—	—	PANCA ROBA					PANCA ROBA	—	—		a. Perlu mesin air b. Sekat Kanal	Harga tidak stabil karena faktor transportasi dan infrastruktur.
KOMODITAS														
SAWIT	Panen Kecil 2X	Panen 2X	Panen 2X	Panen 2X Rawat/ Pupuk	Panen 2X Rawat/ Obat	Panen 2X Rawat/ Obat	Panen 2X Rawat/ Obat	Panen 2X Rawat/ Obat	Panen 2X Rawat/ Pupuk	Panen 2X	Panen 2X	Panen Kecil 2X	a. Lidi sudah dimanfaatkan tetapi terbatas b. Pelepah belum dimanfaatkan untuk pakan sapi, kayu bakar, dan campuran pupuk organik. c. Pemasaran mudah sudah di tempat	Harga dibawah Rp. 1.000,00-, Petani tidak semangat memanen karena harus membayar upah pemanen.
PERIKANAN AIR TAWAR	Panen	Panen	Panen	Panen Kecil	Panen Kecil	Panen Kecil	Panen Kecil	Panen Kecil	Panen	Panen	Panen	Panen	1. Belum dikembangkan secara optimal 2. Pemasaran di lokal desa	1. Tingkat keasaman air berubah ubah 2. Skala produksi masih kecil.

3.4 Keanekaragaman Hayati

Kondisi tutupan lahan serta pemanfaatan tanah dan sumberdaya alam yang berlangsung pada wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap turut berkontribusi atas keberlangsungan Keanekaragaman Hayati. Baik dari sisi kualitas maupun kuantitas keanekaragaman hayati di wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap terlihat cukup dipengaruhi oleh perubahan lanskap akibat pemanfaatan lahan hutan beserta hasil hutan yang ada. Pemanfaatan hasil hutan dan perubahan lahan hutan untuk budidaya pertanian mengubah lanskap Kepenghuluan ini berawal untuk subsistensi kebutuhan hidup warga, tetapi proses ini terus berlangsung mengarah ke produksi intensif komoditas tertentu untuk memenuhi permintaan pasar. Hal ini terus terlihat dengan semakin dominannya upaya budidaya pertanian yang monokultur dimana Kelapa Sawit menjadi jenis tanaman utama.

Pada Diskusi Kelompok Terfokus yang menghasilkan tabel kecenderungan perubahan Keanekaragaman Hayati tercatat pengetahuan masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap tentang dinamika perubahan keanekaragaman hayati yang telah berlangsung di wilayah ini. Identifikasi flora di Kepenghuluan Teluk Nilap mengarah pada jenis-jenis pohon kayu yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat penggunaan yang cukup tinggi. Pemanfaatan hasil hutan kayu untuk berbagai kebutuhan serta kebakaran yang terus terjadi di wilayah kepenghuluan Teluk Nilap menjadi faktor penyebab menurunnya populasi jenis-jenis pohon kayu. Masih terdapat jenis-jenis pohon kayu tertentu yang sudah sangat sulit ditemui keberadaannya jika dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu.

Perubahan tutupan lanskap serta perburuan untuk konsumsi dan perdagangan merupakan faktor-faktor utama menurunnya kualitas dan kuantitas beberapa jenis fauna yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap. Terdapat pula fauna yang mampu bertahan dan adaptif dengan kondisi perubahan tutupan lanskap karena faktor pertumbuhan populasi yang tinggi sehingga masih terdapat cukup melimpah di wilayah Kepenghuluan ini. Beberapa jenis fauna yang mampu bertahan dengan pertumbuhan populasi yang relatif stabil ini kemudian menjadi faktor pengganggu bagi upaya budidaya pertanian yang dilakukan masyarakat di Kepenghuluan Teluk Nilap. Untuk jenis-jenis burung karena proses perpindahan yang lebih mudah dibanding jenis fauna lainnya karenanya dapat tetap bertahan keberadaannya. Sementara hewan-hewan air relatif bertahan populasinya karena terdapat banyak anak sungai dan parit-parit yang bisa menjadi tempat hidup dari fauna air tersebut.

Tanaman budidaya masyarakat yang tadinya sangat beragam dalam dua dekade terakhir mengalami perubahan yang mengarah pada budidaya pertanian monokultur. Budidaya jenis-jenis tanaman komoditas pertanian yang tadinya cukup beragam kini hampir semua beralih ke tanaman sawit. Meskipun demikian jenis-jenis tanaman komoditas pertanian non sawit masih dapat dijumpai dibudidayakan warga Kepenghuluan Teluk Nilap saat ini. Untuk lebih jelasnya mengenai perubahan keanekaragaman Hayati yang berlangsung di Kepenghuluan Teluk Nilap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Bagan Kecenderungan Perubahan Keanekaragaman Hayati

Keragaman Hayati	Periode			Keterangan	Lokasi
	Sblm 1999	1999-2009	2009-2019		
FLORA					
Leban	7	6	3	Dimanfaatkan namun terjadi kebakaran	Dusun Suak Sotul
Seminai	7	6	1	Dimanfaatkan namun terjadi kebakaran	Dusun Suak Sotul
Meranti	10	9	5	Dimanfaatkan namun terjadi kebakaran	Dusun Teluk Durian
Pulai	10	9	5	Dimanfaatkan namun terjadi kebakaran	Dusun Teluk Durian
Rengas	7	7	5	Dimanfaatkan namun terjadi kebakaran	Dusun Suak Sotul
Kompeh	8	7	3	Dimanfaatkan namun terjadi kebakaran	Dusun Suak Sotul
Punak	10	9	4	Dimanfaatkan namun terjadi kebakaran	Dusun Suak Sotul
Pakis	10	10	10	Alih fungsi lahan dan perkebunan	Dusun Suak Sotul, Teluk Durian dan Karya Bakti
Mahang	10	10	7	Dimanfaatkan namun terjadi kebakaran	Dusun Suak Sotul, Teluk Durian dan Karya Bakti
Nipah	10	8	4	Alih fungsi lahan	Bantaran Sungai
FAUNA					
Harimau	7	5	2	Hutan berkurang dan diburu karena mengganggu keamanan.	Teluk Durian dan Suak Sotul
Buaya	8	8	9	Banyaknya anak sungai sehingga perkembangbiakannya sangat mudah	Sungai alam dan Sungai Suak Sotul
Musang	7	7	6	Diburu karena memakan ayam	Di semua lokasi Teluk Nilap
Babi	10	10	8	Diburu untuk dimanfaatkan	Di semua lokasi Teluk Nilap
Rusa	7	5	1	Diburu untuk dimanfaatkan	Di semua lokasi Teluk Nilap
Ikan Tapah	9	8	3	Diburu untuk dimanfaatkan	Karya Bakti, Sungai Sirih dan sungai alam
Ikan Toman	9	8	4	Diburu untuk dimanfaatkan	Karya Bakti, Sungai Sirih dan sungai alam
Ikan Baung	10	9	5	Diburu untuk dimanfaatkan	Karya Bakti, Sungai Sirih dan sungai alam
Ikan Gabus	10	8	6	Diburu untuk dimanfaatkan	Sungai alam, parit dan bekoan
Monyet	10	10	10	Pertumbuhan populasi tinggi, menjadi hama	Di semua dusun
Siamang	10	7	5	Ekosistem terganggu karena pembukaan lahan, perburuan, dan karhutla	Di semua dusun
Landak	10	5	2	Ekosistem terganggu karena pembukaan lahan, perburuan, dan karhutla	Di semua dusun
Tupai	10	10	10	Pertumbuhan populasi tinggi,	Di semua dusun
Kancil	10	5	0	Diburu untuk dimanfaatkan	Di semua dusun
Beruang	8	7	5	Ekosistem terganggu karena pembukaan lahan, perburuan, dan karhutla	Di semua dusun
Trenggiling	8	6	5	Ekosistem terganggu karena pembukaan lahan, perburuan, dan karhutla	Di semua dusun
Biawak	8	8	8	Pertumbuhan populasi tinggi,	Di semua dusun
Burung	8	5	0	Tidak ada lagi karena ekosistem terganggu akibat pembukaan lahan,	Di semua dusun

Rangkong				perburuan, dan karhutla	
Burung Gagak	8	8	7	Populasi menurun karena ekosistem terganggu akibat pembukaan lahan, perburuan, dan karhutla	Di semua dusun
Burung Serindit	8	8	8	Pertumbuhan populasi stabil	Di semua dusun
Burung Punai	8	8	7	Populasi menurun karena ekosistem terganggu akibat pembukaan lahan, perburuan, dan karhutla	Di semua dusun
Burung Perhutut	8	8	7	Populasi menurun karena ekosistem terganggu akibat pembukaan lahan, perburuan, dan karhutla	Di semua dusun
Burung Bangau	8	8	7	Populasi menurun karena ekosistem terganggu akibat pembukaan lahan, perburuan, dan karhutla	Di semua dusun
Burung Elang	8	8	7	Populasi menurun karena ekosistem terganggu akibat pembukaan lahan, perburuan, dan karhutla	Di semua dusun
Burung Murai Batu	8	8	7	Populasi menurun karena ekosistem terganggu akibat pembukaan lahan, perburuan, dan karhutla	Di semua dusun
VEGETASI					
Sawit	4	8	10	Penghasilan utama masyarakat	Di semua dusun Teluk Nilap
Manggis	8	7	3	Diganti dengan sawit	Dusun Karya Bakti dan Karya Nyata
Kopi	8	5	1	Diganti dengan sawit	Dusun Karya Nyata
Pisang	10	8	5	Diganti dengan sawit	Di semua dusun
Coklat	8	5	1	Diganti dengan sawit	Karya Bakti, Karya Nyata, Teluk Durian, Sungai Sirih
Nanas	7	7	7	Penanaman masih berlangsung	Di semua dusun
Ubi	7	5	2	Serangan Hama Babi	Di semua dusun
Rambai	7	5	2	-	Di semua dusun
Kelapa	8	6	5	-	Di semua dusun

Sumber : Fokus Grup Diskusi Tim Pemetaan dan Masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap 2019.

3.5 Hidrologi di Lahan Gambut

Kepenghuluan Teluk Nilap awalnya merupakan wilayah yang dibuka masyarakat yang datang dan bermukim untuk mengembangkan kegiatan pertanian. Pada awalnya lokasi pertanian yang dikembangkan masyarakat lebih banyak di kawasan tanah mineral pada tepi Sungai Kubu. Hal ini terlihat dari jenis tanaman awal yang dibudidayakan oleh masyarakat Kepenghuluan ini yaitu padi, jagung, ubi, sayur-sayuran dan palawija.

Budidaya padi yang dikembangkan adalah sawah tadah hujan yang bergantung pada keberadaan air di musim penghujan. Perubahan lanskap gambut awalnya dimulai dengan pembukaan lahan untuk memulai penanaman komoditas Kelapa Sawit di lahan-lahan yang baru dibuka. Seiring dengan pembukaan lahan,

parit-parit mulai dibangun ke area pembukaan lahan. Selain upaya pembukaan lahan oleh masyarakat, terdapat pula investasi minyak dan gas (migas) serta perkebunan yang beroperasi dan turut merubah lanskap di wilayah Kepenghuluan ini.

Terdapat beberapa sungai alam di wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap, yang paling utama adalah Sungai Kubu yang mengalir dari arah Selatan ke Utara wilayah Kepenghuluan ini. Aliran Sungai Kubu terbentuk dari pertemuan dua sungai alam di kepenghuluan Teluk Nilap. Kedua sungai tersebut adalah Sungai Tolang Kiri (Sungai Simpang Kiri) yang mengalir dari arah Selatan ke Utara, serta Sungai Tolang Kanan (Sungai Simpang Kanan) yang mengalir dari arah Barat ke Timur hingga keduanya bertemu membentuk aliran Sungai Kubu.

Wilayah Kepenghuluan ini yang termasuk dalam KHG Sungai Barumun – Sungai Kubu pada umumnya dibuka masyarakat, dimana terdapat pula masyarakat dari luar yang menguasai tanah-tanah tersebut. Sedangkan pada KHG Sungai Kubu – Sungai Rokan perubahan lanskap pada lahan gambut selain karena adanya investasi Perusahaan Perkebunan juga karena proses eksplorasi dan eksploitasi migas pada Lapangan Pinang GS Blok Rokan sejak ditemukannya ladang migas tersebut di tahun 1971. Pembuatan parit-parit terjadi di kedua hamparan KHG tersebut. Parit-parit bermuara pada sungai-sungai alam yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap. Parit-parit terbanyak berada wilayah sebelah tepi Utara Sungai Tolang Kanan dan sebelah barat Sungai Kubu. Wilayah tempat parit-parit tersebut rentan dan sering terjadi kebakaran lahan. Hal ini karena tutupan lanskap akibat kebakaran lebih banyak didominasi semak belukar serta keberadaan parit-parit menyebabkan kondisi lahan gambut menjadi kering.

Tabel 8. Hidrologi di Lahan Gambut

No	Jenis	Letak	Jmlh	Tahun	Pendanaan	Kondisi
1.	Sekat kanal	Dusun	142	2018	APBN	Layak
2.	Embung	Dusun Benuang	2	2016	Swadaya	Layak
		Dusun Teluk Durian	1	2010	APBD Kab. Rohil	-
3.	Sungai Alam					
	a) Sungai Kubu	-	1	-	-	-
	b) Sungai Tolang Kiri	-	1	-	-	-
	c) Sungai Tolang Kanan	-	1	-	-	-
4.	Parit	Semua Dusun	-	-	Swadaya	Layak

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil 2019.

Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Riau, sebagai pelaksana tugas pembantuan Daerah Badan Restorasi Gambut, pada tahun 2018 melaksanakan upaya pembasahan lahan gambut bersama kelompok masyarakat dengan membangun 142 sekat kanal di Kepenghuluan Teluk Nilap. Masyarakat memberikan apresiasi atas upaya pembasahan ini terutama pada area yang selama ini mudah terjadi kebakaran. Menurut warga dengan adanya sekat kanal lahan akan terjaga tetap basah serta mempermudah mendapatkan air untuk pemadaman api saat kebakaran terjadi. Terdapat pula warga yang berpendapat bahwa sekat kanal ini akan menyebabkan banjir pada lahan pertanian di musim hujan karena air tertahan sekat kanal yang dibangun. Untuk lebih jelas tentang Kondisi sekat kanal yang telah dibangun pada wilayah Kepenghuluan ini dapat dilihat pada beberapa gambar berikut:

Gambar 6. Hidrologi di Lahan Gambut



Sekat Kanal Kelompok Kayu Mohani 6 Dusun Suak Sotul



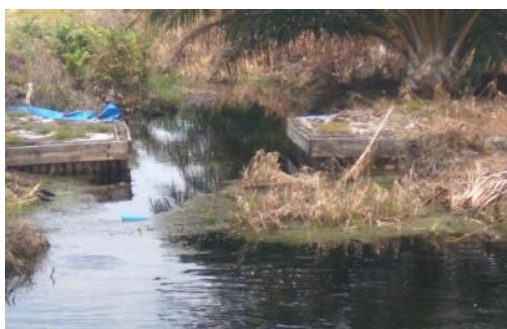
Sekat Kanal Kelompok Kayu Mohani 5 Dusun Suak Sotul



Sekat Kanal Kelompok Kayu Mohani 2 Dusun Suak Sotul



Sekat Kanal Kelompok Kayu Mohani 3 Dusun Suak Sotul



Sekat Kanal Kelompok Kayu Mohani 4 Dusun Suak Sotul



Sekat Kanal Kelompok Kayu Mohani 1 Dusun Suak Sotul



Sekat Kanal Kelompok Kayu Gaharu 3 Dusun Suak Sotul



Sekat Kanal Kelompok Kayu Gaharu 4 Dusun Suak Sotul



Sekat Kanal Kelompok Kayu Gaharu 1 Dusun Suak Sotul



Sekat Kanal 2 Kelompok Kayu Sengon Dusun Suak Sotul



Sekat Kanal 4 Kelompok Kayu Sengon Dusun Suak Sotul



Sekat Kanal 1 Kelompok Kayu Sengon Dusun Suak Sotul



Sekat Kanal Kelompok Kayu Gaharu 2 Dusun Suak Sotul

Sumber: Dokumentasi Lapangan.

3.6 Kerentanan Ekosistem Gambut

Pada awalnya aktifitas masyarakat di Kepenghuluan Teluk Nilap lebih terpusat pada wilayah tanah mineral yang berada di tepi aliran sungai alami. Kelimpahan air yang berasal dari kawasan lahan gambut menyebabkan munculnya pengetahuan untuk mengendalikan kondisi hidrologi pada lahan yang ada di tepian sungai alam. Kemampuan mengendalikan kondisi hidrologi tersebut terwujud dalam bentuk pembuatan parit-parit yang selain sebagai pengendali air juga menjadi jalur transportasi bagi warga.

Sejak akhir dekade 1990-an dan diawal dekade 2000-an perubahan-perubahan dalam lanskap Kepenghuluan Teluk Nilap yang cukup cepat berlangsung menjadi dinamika dalam kerentanan ekosistem gambut di Kepenghuluan ini. Upaya pembukaan lahan untuk budidaya Kelapa Sawit yang monokultur disertai dengan pembuatan parit-parit menyebabkan kondisi lahan gambut menjadi lebih kering sehingga lebih rentan terjadi kebakaran lahan. Akibat kebakaran lahan justru semakin meningkatkan kerentanan kebakaran karena lahan yang terbakar tidak segera dikelola dan ditumbuhi semak belukar yang mudah terbakar jika ada api menjalar ketika terjadi kebakaran kembali.

Peristiwa kebakaran lahan berulang kali terjadi, paling tidak sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 telah terjadi kebakaran selama empat kali dimana hanya pada tahun 2016 tidak terjadi kebakaran lahan di Kepenghuluan Teluk Nilap. Dari jumlah titik api (hotspot), tahun 2018 merupakan kebakaran dengan jumlah titik api terbanyak di kepenghuluan ini. Mengenai jumlah titik api masing-masing tahun terjadinya kebakaran di Kepenghuluan Teluk Nilap dapat dilihat pada tabel hotspot hasil penginderaan jarak jauh Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) berikut ini:

Tabel 9. Hotspot tahun 2014 – 2018 di Kepenghuluan Teluk Nilap

No	Tahun	Jumlah Hotspot
1.	2014	15 titik
2.	2015	2 titik
3.	2016	-
4.	2017	21 titik
5.	2018	62 titik
Keterangan : Deteksi hotspot oleh LAPAN berdasarkan satelit penginderaan jarak jauh Aqua, Terra, dan S-NPP dengan tingkat kepercayaan $\geq 80\%$ - 100%. Data hotspot yang disajikan merupakan data antara tanggal 1 Juni sampai dengan 30 September setiap tahunnya, dimana merupakan waktu yang paling sering terjadi Karhutla.		

Sumber: Diolah dari Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) (2019).



Bab IV

Kependudukan

4.1 Data Umum Penduduk

Terdapat berbagai data jumlah penduduk pada tahun 2018 di Kepenghuluan Teluk Nilap. Data jumlah penduduk yang pertama adalah berdasarkan Laporan Bulanan Kependudukan Kepenghuluan Teluk Nilap Bulan Desember tahun 2018 (Kepenghuluan Teluk Nilap, 2019) dengan jumlah penduduk 8.118 jiwa. Data kedua berasal dari rilis Direktorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) (2018) per tanggal 31 Desember 2018 yang berjumlah 6.170 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 3.204 jiwa dan perempuan sebanyak 2.966 jiwa. Perbedaan jumlah penduduk kedua data ini pada dasarnya bersumber dari administrasi kependudukan yang belum cukup baik. Dirjen Dukcapil Kemendagri mendasarkan data kependudukan pada jumlah penduduk yang telah terdata dalam Kartu Keluarga yang telah dikeluarkan, sedangkan Kepenghuluan Teluk Nilap berdasarkan jumlah penduduk yang telah terdata di wilayahnya dari tingkat RT hingga di Kepenghuluan. Hal ini memperlihatkan belum semua penduduk Kepenghuluan Teluk Nilap terdata dalam administrasi kependudukan negara yaitu melalui administrasi Kartu Keluarga. Masalah data penduduk juga tidak sepenuhnya dari pihak Kepenghuluan tetapi juga dari warga. Sebagai contoh kasus misalnya terdapat warga pendatang yang bermukim di Kepenghuluan Teluk Nilap tetapi tidak dapat mengurus administrasi kependudukan seperti KK dan KTP karena tidak membawa dokumen kepindahan dari tempat asal. Meskipun terdapat perbedaan jumlah dalam kedua data tersebut, tetapi terdapat kecenderungan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Kecenderungan yang sama terlihat juga dalam jumlah penduduk setiap tahunnya sejak tahun 2016 dengan perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan berkisar 1%. Mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 di Kepenghuluan Teluk Nilap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kepenghuluan Teluk Nilap

Tahun	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
2018 *	4.093	50,42	4.025	49,58	8.118	100,00
2017 **	4.048	49,86	4.071	50,14	8.119	100,00
2016 ***	4.007	50,43	3.939	49,57	7.946	100,00
Keterangan: * Kepenghuluan Teluk Nilap (2019) ** BPS Kabupaten Rokan Hilir (2018) *** BPS Kabupaten Rokan Hilir (2017)						

Sumber: diolah dari BPS Kabupaten Rokan Hilir (2017), BPS Kabupaten Rokan Hilir (2018) & Kepenghuluan Teluk Nilap (2019).

Sama dengan data jumlah penduduk, data mengenai jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kepenghuluan Teluk Nilap antara data Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (2018) terdapat perbedaan jumlah KK sebanyak 83 KK dari data Kepenghuluan Teluk Nilap (2019) yang jumlahnya lebih besar. Meskipun demikian kedua data ini tidak memberikan penjelasan berapa jumlah KK perempuan dan KK laki-laki dalam Kepenghuluan ini. Jika menggunakan data Kepenghuluan Teluk Nilap (2019) maka setiap tahunnya jumlah KK di Kepenghuluan ini menunjukkan adanya penambahan. Berikut ini adalah tabel jumlah KK di Kepenghuluan Teluk Nilap sejak tahun 2016:

Tabel 11. Jumlah Kepala Keluarga di Kepenghuluan Teluk Nilap

Tahun	Kepala Keluarga
2018 *	1.647
2017 **	1.631
2016 ***	1.491
Keterangan: * Kepenghuluan Teluk Nilap (2019) ** BPS Kabupaten Rokan Hilir (2018) *** BPS Kabupaten Rokan Hilir (2017)	

Sumber: diolah dari BPS Kabupaten Rokan Hilir (2017), BPS Kabupaten Rokan Hilir, (2018), Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (2018), & Kepenghuluan Teluk Nilap, (2019).

Mengenai data penduduk berdasarkan usia tidak didapatkan pada data Kepenghuluan Teluk Nilap (2019), tetapi data ini dapat ditemukan pada data Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (2018). Dilihat pada data Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (2018), penduduk Kepenghuluan Teluk Nilap yang terbesar adalah mereka yang berada pada usia 15 tahun hingga 64 tahun yang berjumlah 4.218 atau 63,36% dari jumlah penduduk pada data ini. Jumlah penduduk pada rentang usia tersebut memberikan indikasi akan besarnya jumlah penduduk Kepenghuluan Teluk Nilap yang berada dalam rentang usia kerja produktif antara 16 tahun hingga 65 tahun.

Terdapat 1.324 jiwa penduduk atau 21,46% jumlah penduduk yang saat ini yang berusia antara 5-14 tahun akan memasuki usia kerja produktif dalam satu dekade ke depan menggantikan penduduk yang saat ini berada pada usia 55-64 tahun yang sebanyak 292 jiwa atau 4,73% dari jumlah penduduk Kepenghuluan Teluk Nilap saat ini. Melihat pada proyeksi usia dan jumlah penduduk tersebut, salah satu tantangan penting di masa depan bagi Kepenghuluan Teluk Nilap adalah menyiapkan lapangan kerja bagi penduduk pada sekitar satu dekade ke depan. Mengenai jumlah penduduk berdasarkan usia di Kepenghuluan Teluk Nilap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2018

No	Penduduk Berdasarkan Usia	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Usia 0-4 thn	424	6,87
2	Usia 5-9 thn	648	10,50
3	Usia 10-14 thn	676	10,96
4	Usia 15-19 thn	710	11,51
5	Usia 20-24 thn	614	9,95
6	Usia 25-29 thn	527	8,54
7	Usia 30-34 thn	463	7,50
8	Usia 35-39 thn	520	8,43
9	Usia 40-44 thn	441	7,15
10	Usia 45-49 thn	375	6,08
11	Usia 50-54 thn	276	4,47
12	Usia 55-59 thn	159	2,58
13	Usia 60-64 thn	133	2,16
14	Usia 65-69 thn	103	1,67
15	Usia 70-74 thn	49	0,79
16	Usia 75 thn ke atas	52	0,84
Grand Total		6.170	100,00

Sumber: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (2018).

Penduduk Kepenghuluan Teluk Nilap sebesar 78,12% atau 4.820 jiwa telah menjalani pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan. Melihat dari besarnya jumlah penduduk yang cukup besar telah menjalani pendidikan mengindikasikan adanya kesadaran warga akan pentingnya pendidikan formal pada wajib belajar 9 tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di Kepenghuluan Teluk Nilap. Dari jumlah yang tidak/belum sekolah, sejumlah 549 jiwa merupakan penduduk kepenghuluan ini yang berusia antara 0-5 tahun. Meskipun masih sangat sedikit tetapi telah ada 2,46% dari jumlah penduduk di Kepenghuluan Teluk Nilap atau sebanyak 152 jiwa penduduk yang telah mengenyam pendidikan formal di tingkat perguruan tinggi. Lebih jelas mengenai tingkat pendidikan penduduk di Kepenghuluan Teluk Nilap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13. Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Tidak/belum sekolah	1.350	21,88
2	Belum tamat SD	935	15,15
3	Tamat SD	1.916	31,05
4	SLTP	1.000	16,21
5	SLTA	817	13,24
6	D1 dan D2	16	0,26
7	D3	54	0,88
8	S1	80	1,30
9	S2	2	0,03
Total		6.170	100,00

Sumber: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (2018).

4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan tingkat pertambahan per tahun dalam jangka waktu tertentu yang angkanya dinyatakan sebagai persentase dari penduduk tahun dasar atau akhir. Kegunaan laju pertumbuhan penduduk adalah mengetahui perubahan antar dua periode tertentu. Untuk mengetahui LPP dapat digunakan metode geometrik seperti yang biasa digunakan BPS dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$$

Metode geometri

r : Laju pertumbuhan penduduk

P_t : Jumlah penduduk tahun t

P₀ : Jumlah penduduk tahun awal

t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

LPP Kepenghuluan Teluk Nilap dalam tiga tahun terakhir dengan tahun dasar 2018, yaitu antara 2016 hingga 2018 adalah sebesar 1,08%/tahun. Jika dihitung per tahun dengan tahun dasar adalah tahun sebelumnya, kenaikan laju pertumbuhan penduduk yang paling besar terjadi antara tahun 2016 hingga tahun 2017, dimana ada penambahan penduduk sebesar 2,18%. Sedangkan pada tahun 2017 -2018 LPP Kepenghuluan Teluk Nilap justru mengalami penurunan meskipun jumlahnya sangat kecil. Untuk lebih jelas mengenai Laju Pertumbuhan Penduduk pada Kepenghuluan Teluk Nilap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Laju Pertumbuhan Penduduk

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
2018 *	8.118	LPP 2017 -2018	-0,01
2017 **	8.119	LPP 2016 -2017	2,18
2016 ***	7.946	LPP 2016 -2018	1,08
Keterangan: * Kepenghuluan Teluk Nilap (2019) ** BPS Kabupaten Rokan Hilir (2018) *** BPS Kabupaten Rokan Hilir (2017)			

Sumber: diolah dari BPS Kabupaten Rokan Hilir (2017),
BPS Kabupaten Rokan Hilir (2018), & Kepenghuluan Teluk Nilap (2019).

4.3 Tingkat Kepadatan Penduduk

Angka kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah. Pada umumnya, hal ini disajikan dengan menggunakan penghitungan kepadatan penduduk kasar (*crude population density*) yang memperlihatkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah penduduk (jiwa)}}{\text{Luas Daerah (DM)}}$$

Dengan menggunakan perhitungan rumus tersebut, maka Kepenghuluan Teluk Nilap memiliki kecenderungan perubahan kepadatan jumlah penduduk yang tidak banyak berubah pada rentang waktu tahun 2016 hingga tahun 2018.

Tingkat kepadatan penduduk desa merupakan perbandingan antara angka kepadatan desa dengan angka kepadatan kecamatan. Suatu desa memiliki *Kepadatan Tinggi* jika angka kepadatan suatu desa lebih besar dari angka kepadatan wilayah kecamatan, untuk *Kepadatan Sedang* jika angka kepadatan suatu desa sama besar dengan angka kepadatan wilayah kecamatan, dan *Kepadatan Rendah* jika angka kepadatan suatu desa lebih kecil dari angka kepadatan wilayah kecamatan. Angka kepadatan penduduk Kepenghuluan Teluk cenderung stabil sejak tahun 2016 dan angka kepadatan penduduk pada Kecamatan Kubu Babussalam cenderung menurun setiap tahunnya. Tetapi jika dibandingkan angka kepadatan Kepenghuluan dan Kecamatan maka tingkat kepadatan penduduk Kepenghuluan Teluk Nilap tetap rendah dari tahun 2016. Lebih jelas mengenai tingkat kepadatan penduduk di Kepenghuluan Teluk Nilap maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15. Tingkat Kepadatan Penduduk

Tahun	Kepadatan Penduduk Kepenghuluan Teluk Nilap (Jiwa/Km)	Kepadatan Penduduk Kecamatan Kubu Babussalam (Jiwa/Km)	Tingkat Kepadatan Penduduk Kepenghuluan Teluk Nilap
2018 *	25	32	Rendah
2017 **	25	34	Rendah
2016 ***	24	35	Rendah
Keterangan: * Kepenghuluan Teluk Nilap (2019) ** BPS Kabupaten Rokan Hilir (2018) *** BPS Kabupaten Rokan Hilir (2017) Luas Kepenghuluan berdasarkan Profil Kepenghuluan Teluk Nilap (Kepenghuluan Teluk Nilap, 2017), luas Kecamatan berdasarkan Kecamatan Kubu Babussalam Dalam Angka 2018 (BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2018)			

Sumber: diolah dari BPS Kabupaten Rokan Hilir (2017) BPS Kabupaten Rokan Hilir (2018), & Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (2019).



Bab V

Pendidikan dan Kesehatan

5.1 Jumlah Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan

Tenaga Pendidik menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor dan instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Tenaga Pendidik di Kepenghuluan Teluk Nilap merupakan tenaga pengajar atau guru yang menyelenggarakan proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sederajat serta pada lembaga pendidikan Non Formal yaitu Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Jumlah Tenaga Pendidik terbanyak ada pada SMAN 1 Kubu Babussalam dan paling sedikit pada MDA Al Hidayah sebanyak dua (2) orang tenaga pendidik. Lebih detil mengenai jenjang pendidikan dan jumlah tenaga pengajar di Kepenghuluan Teluk Nilap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 16. Jumlah Tenaga Pendidik Kepenghuluan Teluk Nilap

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Tenaga Pengajar
1.	PAUD Permata Bunda	3 orang
2.	PAUD AN-Naziroh	3 orang
3.	PAUD/TK Suhada	3 honorer
4.	MDA Nurul Khairat	4 orang
5.	MDA Nurul Iman	4 orang
6.	MDA Al-Hidayah	2 orang
7.	SDN 002 Teluk Nilap	18 orang
8.	SDN 004 Teluk Nilap	24 orang
9.	SMPN 2 Kubu Babussalam	32 orang
10.	SMAN 1 Kubu Babussalam	40 orang

Sumber: Kepenghuluan Teluk Nilap (2017) dan Wawancara
Tenaga Pendidik Kepenghuluan Teluk Nilap 2019.

Di Kepenghuluan Teluk Nilap, pada umumnya Tenaga Pendidik tidak memiliki pengetahuan tentang Karhutla jika pun ada pengetahuan yang mereka alami karena seringnya terjadi kebakaran lahan di wilayah Kepenghuluan ini. Demikian pula pelatihan mengenai Karhutla serta penanganan Karhutla untuk upaya transfer pengetahuan ke peserta didik untuk para tenaga pengajar yang lebih sistematis belum pernah didapatkan para tenaga pengajar di Kepenghuluan Teluk Nilap. Dengan demikian di Kepenghuluan Teluk Nilap materi mengenai karhutla dan penanganan korban karhutla tidak pernah menjadi sisipan pengajaran dalam materi pelajaran sekolah. Para tenaga pengajar di Kepenghuluan Teluk Nilap hanya memiliki pengetahuan tentang gambut dan upaya restorasi gambut berdasarkan interaksi keseharian dengan wilayah lahan gambut sekitar tempat bermukimnya. Adapun pelatihan restorasi gambut untuk materi pengajaran kepada peserta didik yang diampunya juga belum pernah didapatkan. Karenanya materi mengenai gambut dan restorasi gambut juga hampir tidak pernah menjadi salah satu sisipan materi dalam mata pelajaran yang diberikan kepada para siswa di sekolah.

Tenaga Kesehatan menurut UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan dalam UU Kesehatan tersebut antara lain tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kesehatan tradisional, serta tenaga kesehatan lainnya. Di Kepenghuluan Teluk Nilap telah terdapat warga yang menjadi tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan yang menunjukkan adanya tenaga kerja terampil dan terdidik di kepenghuluan ini. Selain itu adanya kegiatan Posyandu dimana terdapat Kader Posyandu sebanyak 5 orang pada tiap Posyandu yang merupakan tenaga kesehatan lainnya dalam penjelasan pada UU Kesehatan. Adapun jumlah terperinci tiap-tiap tenaga kesehatan yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Jumlah Tenaga Kesehatan Kepenghuluan Teluk Nilap

No	Tenaga	Status	Jumlah	Total Tenaga Kesehatan
1.	Dokter			4 orang
2.	Bidan			
a.	Bidan yang bertugas di Teluk Nilap	PNS	1 orang	3 orang
		Honorar	2 orang	
b.	Warga Teluk Nilap yang Tenaga Bidan	PNS	6 orang	17 orang
		Honorar	11 orang	
3.	Mantri			4 orang
4.	Kader Posyandu Karang Taruna			5 orang
5.	Kader Posyandu Bunga Durian			5 orang
6.	Kader Posyandu Akasia			5 orang
7.	Kader Posyandu Bunga Sirih			5 orang

Sumber: Wawancara Tenaga Kesehatan Kepenghuluan Teluk Nilap 2019
& FGD II Penyusunan Laporan Profil DPG 2019.

Bidan yang bertugas di Kepenghuluhan Teluk Nilap dalam wawancara menyatakan belum pernah ada pelatihan penanganan Korban Karhutla bagi Tenaga Kesehatan di Kepenghuluhan ini, tetapi Tenaga Kesehatan terutama tenaga medis, keperawatan, dan bidan memiliki ketrampilan menangani korban Karhutla untuk penanganan luka bakar dan ISPA. Demikian pula dengan sarana dan prasarana untuk penanganan korban karhutla dirasakan belum cukup untuk menangani korban Karhutla.

5.2 Kondisi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan

Fasilitas lembaga pendidikan formal dan non Formal sudah tersedia di Kepenghuluhan ini. Fasilitas pendidikan formal yang ada telah mencakup hingga wajib belajar usia 9 tahun bahkan lebih dengan telah adanya satu SLTA di Kepenghuluhan ini. Terdapat pula tiga fasilitas pendidikan non formal berupa MDA yang telah berjalan proses belajar mengajar pada fasilitas pendidikan ini. Pada umumnya fasilitas pendidikan yang ada ini masih membutuhkan peningkatan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih baik lagi di kemudian hari. Tentang Fasilitas pendidikan yang ada di kepenghuluhan Teluk Nilap, dari jenjang pendidikan, kondisi, dan jumlah peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 18. Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Kondisi	Jumlah Peserta				
		Kelas		Usia		
1	SMAN 1 Kubu Babussalam					
<div>Layak</div> <div><div>- Dinding berbahan semen dan lantai keramik</div><div>- 2 ruang kelas kondisi rusak dan tidak bisa digunakan</div><div>- WC tersedia</div></div>				Usia 15:	64 Siswa	
				Usia 16:	86 Siswa	
				Usia 17:	116 Siswa	
		Kelas X:	212 Siswa	Usia 18:	134 Siswa	
		Kelas XI:	194 Siswa	Usia 19:	152 Siswa	
		Kelas XII:	189 Siswa	Usia 21:	43 Siswa	
	Total	595 Siswa	Total	595 Siswa		
2	SMPN 2 Kubu Babussalam					
<div>Layak</div> <div><div>- Dari 16 ruang kelas, 3 kelas rusak</div><div>- Pagar berbahan kayu</div><div>- WC tersedia</div></div>				Usia 12:	39 Siswa	
				Usia 13:	58 Siswa	
				Usia 14:	58 Siswa	
		Kelas VII:	121 Siswa	Usia 15:	101 Siswa	
		Kelas VIII:	120 Siswa	Usia 16:	92 Siswa	
		Kelas IX:	137 Siswa	Usia 17:	30 Siswa	
	Total	378 Siswa	Total	378 Siswa		

3	SDN 002 Teluk Nilap			
Layak <ul style="list-style-type: none"> - 10 ruang kelas berbahan dinding semen, 3 ruang kelas berbahan papan kayu. - Memiliki sarana olahraga lapangan bola basket dan bola voli. 			Usia 6:	39 Siswa
			Usia 7:	76 Siswa
	Kelas I:	76 Siswa	Usia 8:	46 Siswa
	Kelas II:	85 Siswa	Usia 9:	39 Siswa
	Kelas III:	75 Siswa	Usia 10:	70 Siswa
	Kelas IV:	64 Siswa	Usia 11:	65 Siswa
	Kelas V:	63 Siswa	Usia 12:	67 Siswa
	Kelas VI:	76 Siswa	Usia 13:	37 Siswa
	Total:	439 Siswa	Total	439 Siswa
4	SDN 004 Teluk Nilap			
Layak <ul style="list-style-type: none"> - Ruang kelas berdinding semen lantai keramik - WC tersedia - Pagar dari tembok dan Seng 			Usia 6:	48 Siswa
			Usia 7:	83 Siswa
	Kelas I:	91 Siswa	Usia 8:	38 Siswa
	Kelas II:	78 Siswa	Usia 9:	34 Siswa
	Kelas III:	59 Siswa	Usia 10:	69 Siswa
	Kelas IV:	93 Siswa	Usia 11:	87 Siswa
	Kelas V:	79 Siswa	Usia 12:	80 Siswa
	Kelas VI:	73 Siswa	Usia 13:	34 Siswa
	Total	473 Siswa	Total	473 Siswa
5	MDA Nurul Iman			
Layak <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan dari semen - WC tersedia 			Usia 8:	28 Siswa
	Kelas I:	28 Siswa	Usia 9:	10 Siswa
	Kelas II:	40 Siswa	Usia 10:	12 Siswa
	Kelas III:	18 Siswa	Usia 12:	36 Siswa
	Kelas IV:	10 Siswa	Usia 13:	10 Siswa
	Total	96 Siswa	Total	96 Siswa
6	MDA Al Hidayah			
Kurang Layak <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan terbuat dari papan kayu - WC tidak ada - Tidak ada jembatan masuk halaman sekolah 	Kelas I:	11 Siswa	Usia 8:	11 Siswa
	Kelas II:	7 Siswa	Usia 9:	7 Siswa
	Kelas III:	3 Siswa	Usia 10:	3 Siswa
	Kelas IV:	4 Siswa	Usia 11:	4 Siswa
	Total	25 Siswa	Total	25 Siswa
7	MDA Nurul Khairat			
Layak <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan semen - WC ada - Belum berpagar 			Usia 7:	6 Siswa
	Kelas I:	36 Siswa	Usia 8:	35 Siswa
	Kelas II:	20 Siswa	Usia 9:	25 Siswa
	Kelas III:	17 Siswa	Usia 10:	19 Siswa
	Kelas IV:	33 Siswa	Usia 11:	21 Siswa
	Total	106 Siswa	Total	106 Siswa
8	PAUD Permata Bunda			
Layak <ul style="list-style-type: none"> - Bahan pemanen dinding semen - WC tersedia 	-	-	Usia 3:	18 Siswa
	-	-	Usia 4:	14 Siswa
	-	-	Total	32 Siswa

9	PAUD Naziroh				
	Kurang Layak - Bahan semi permanen dari papan kayu - WC tersedia	-	-	Usia 3:	14 Siswa
		-	-	Usia 4:	16 Siswa
		-	-	Total	30 Siswa
10	PAUD/TK Syuhada				
	Kurang Layak - Bangunan terbuat dari Semen - WC tidak tersedia	-	-	Usia 3:	11 Siswa
		-	-	Usia 4:	8 Siswa
		-	-	Usia 5:	6 Siswa
		-	-	Total	25 Siswa

Sumber: Wawancara Tenaga Pendidik Kepenghuluhan Teluk Nilap 2019.

Berikut ini terdapat gambar yang merupakan beberapa fasilitas pendidikan tempat para tenaga pengajar dan para siswa menjalankan proses belajar mengajar yang terdapat di Kepenghuluhan Teluk Nilap:

Gambar 7. Fasilitas Pendidikan Kepenghuluhan Teluk Nilap



Taman Pendidikan Al Quran An Nuur Jl. Datuk Paduka



MDA Al Khairat di Jl. Abdul Karim My. Dusun Karya Bakti



Gedung PAUD/TK Al Hidayah Dusun Sei. Sirih



SD Negeri 002 Teluk Nilap di Dusun Karya Nyata



MDA Al Hidayah di Jalan Sudirman Ujung



Gedung MDA Al Khairat di Dusun Karya Nyata



Halaman SMA Negeri 1 Kubu Babusalam



Lapangan Parkir SMA Negeri 1 Kubu Babusalam

Sumber: Dokumentasi Lapangan.

Fasilitas kesehatan di Kepenghuluan Teluk Nilap masih terbatas dan perlu ditingkatkan. Terutama bila dikaitkan dengan kesiapan untuk menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di wilayah Kepenghuluan ini, maka diperlukan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang ada. Kesiapan menghadapi kondisi karhutla pada fasilitas Kesehatan yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap masih perlu ditingkatkan, dalam hal ini ketersediaan masker, tabung oksigen, serta alat medis lainnya perlu ditingkatkan volume ketersediannya jika dibandingkan banyaknya jumlah penduduk Kepenghuluan ini. Tabel berikut ini memperlihatkan fasilitas kesehatan yang ada beserta kondisi dari masing-masing fasilitas tersebut:

Tabel 19. Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Jenis	Nama	Tahun Berdiri	Kondisi
1.	Poskesdes	-	2018	Bangunan ada, belum beroperasi
2.	Polindes	-	2015	Layak
3.	Posyandu	Karang Taruna	2010	Kurang Layak & Masih Menumpang
4.	Posyandu	Bunga Durian	2012	Kurang Layak & Masih Menumpang
5.	Posyandu	Akasia	2014	Kurang Layak & Masih menumpang
6.	Posyandu	Bunga Sirih	Tidak diketahui	Kurang Layak & Masih menumpang

Sumber: Observasi & Wawancara Tenaga Kesehatan Kepenghuluan Teluk Nilap 2019.

5.3 Angka Partisipasi Pendidikan

Tidak dapat dilakukan penghitungan Angka Partisipasi Pendidikan terutama Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kepenghuluan Teluk Nilap karena tidak tersedianya data mengenai jumlah penduduk dalam rentang usia 7 hingga 12 tahun, usia 13 hingga 15 tahun, serta usia 16 hingga 18 tahun. Selain itu tidak didapatkan data mengenai jumlah anak di Kepenghuluan Teluk Nilap usia 13 hingga 15 tahun yang bersekolah SLTP dan jumlah anak di Kepenghuluan ini berusia 16 hingga 18 tahun yang bersekolah SLTA. Data yang tersedia hanya data jumlah anak berdasarkan usia yang bersekolah pada fasilitas pendidikan SD dan SLTP yang berada di wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 20. Jumlah Anak Berdasarkan Usia di Fasilitas Pendidikan Kepenghuluan Teluk Nilap

No	Kategori	Jumlah
1	anak usia 7 s/d 12 tahun yang bersekolah SD/MI	841
2	anak usia 13 s/d 15 tahun yang bersekolah SMP	378
3	anak usia 16 s/d 18 tahun yang bersekolah SMA	595

Sumber: Wawancara Tenaga Pendidik Kepenghuluan Teluk Nilap 2019.

5.4 Jumlah Korban Bencana Kebakaran dan Asap Tahun 2015

Kebakaran Lahan dan Hutan (Karhutla) adalah peristiwa yang berulang terjadi di Kepenghuluan Teluk Nilap. Paling sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 hanya pada tahun 2016 saja terdeteksi tidak ada hotspot atau peristiwa Karhutla di Kepenghuluan ini menurut data hotspot yang dirilis oleh LAPAN. Data Lapan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dari tenaga kesehatan yang bertugas pada fasilitas Kesehatan di Kepenghuluan Teluk Nilap, bahwa korban akibat Karhutla terdapat pada tahun 2014, 2015, 2017, dan 2018. Meskipun demikian data jumlah korban yang ada ini hanya merupakan data yang didasarkan pada ingatan tenaga kesehatan serta tidak ada data tercatat mengenai korban Karhutla. Data ini juga hanya mencantumkan warga yang datang ke fasilitas kesehatan yang tersedia, ada kemungkinan jumlah korban Karhutla tersebut lebih banyak mengingat mudahnya akses warga untuk melakukan pengobatan pada fasilitas kesehatan lainnya di sekitar wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap. Berikut ini adalah data jumlah Korban Karhutla yang didapat dari tenaga kesehatan yang bertugas di Kepenghuluan Teluk Nilap:

Tabel 21. Korban Karhutla Kepenghuluan Teluk Nilap

Korban Karhutla Kepenghuluan Teluk Nilap		Kelompok Rentan								Bukan Kelompok Rentan	
		Balita		Anak usia 6-12 tahun		Ibu Hamil		Manula >60 tahun			
		S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
Tahun	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	2018	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Keterangan: S : Sakit M : Meninggal											

Sumber Wawancara Tenaga Kesehatan Kepenghuluan Teluk Nilap 2019.



Bab VI

Kesejarahan dan Kebudayaan Masyarakat

6.1 Sejarah Desa

Menurut penuturan salah satu tokoh masyarakat di Kepenghuluan Teluk Nilap, wilayah Teluk Nilap pada awalnya dipimpin oleh Datuk Paduka Samaraja, yang merupakan orang kepercayaan Raja Siak. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Kerajaan Siak, Bab Al Qawaid², wilayah Kubu³ yang mulai dikuasai Kerajaan Siak di tahun 1890 adalah sebuah Provinsi yang dipimpin oleh Hakim Polisi dan dibawahnya terdapat empat Hakim Kepala Suku yang memimpin empat suku yang mendiami wilayah ini, yaitu Suku Rawa, Suku Hamba Raja, Suku Haru/Aru dan Suku Bebas. Di bawah Hakim Kepala Suku terdapat Hinduk yang merupakan hakim suku untuk wilayah setingkat desa atau kepenghuluan/bathin di masa itu. Dalam Bab Al Qawaid tertulis bahwa Hakim Kepala Suku Haru adalah Paduka Samaraja yang sekaligus memimpin Suku Haru.

² Bab Al-Qawaid atau Babul Qawaid yang berarti pintu segala pegangan adalah kitab undang-undang Kesultanan Siak Indrapura setebal 90 halaman terdiri atas 22 bab 154 pasal, yang menguraikan hukum untuk orang Melayu dan bangsa lain yang berhubungan dengan orang Melayu, memaparkan kehidupan dan adat istiadat Kesultanan Siak, serta hukuman yang diberikan melalui proses pengadilan kesultanan ataupun pengadilan Hindia Belanda. Konstitusi tertulis Kesultanan Siak ini ditulis dalam bahasa Arab Melayu dan dicetak di Siak pada tahun 1901 pada masa pemerintahan Sultan Assyaidis Syarif Hasim Abdul Jalil Syarifuddin (1889 – 1908) atau dikenal dengan nama Sultan Syarif Hasyim. (Republika, 2017) (Junus, 2016)

³ Wilayah Kubu sebelum menjadi Provinsi Kerajaan Siak merupakan sebuah Kerajaan yang didirikan pada tahun 1667 (1084 H). Provinsi atau Negeri Kubu pada saat itu wilayahnya sekarang merupakan tujuh kecamatan yaitu Kubu, Kubu Babussalam, Pasir Limau Kapas, Mukti Jaya, Bagan Batu, Bagan Sinembah Raya dan Simpang Kanan. Dalam Bab Al Qawaid pada Pasal 7 disebutkan bahwa, “Bahagian propinsi Kubu; dari Sungai Dua Pekaitan mengikut tanah besar lalu sampai ke Telaga Tergehang berbatasan dengan Negeri Panai ke daratnya sampai ke hulu berbatasan dengan Negeri Kota Pinang dan Pulau Jemur dan Pulau Tokang Sumbang dan Pulau Lalang Besar dan Pulau Lalang Kecil dan Pulau yang kecil-kecil yang masuk dalam Kerajaan Siak Sri Indrapura yang dekat di situ dan ditarik garis lurus dari Telaga Tergehang melalui Berukul menuju hulu Sungai Dawun yang dalam Batang Kuman, berbatasan dengan Tanah Putih”.

Terdapat dua Hinduk yang merupakan Hinduk dari Suku Haru yaitu Hinduk Haru Penghulu Haru dipimpin oleh Penghulu Haru, serta Hinduk Haru Besar yang pemimpinnya disebut Bebas atau belum ditentukan dalam Bab Al Qawaid. Selain sebagai Kepala Suku dan Hakim Kepala Suku Haru, ada kemungkinan yang disebut Penghulu Haru yang mengepalai Hinduk Haru Penghulu Haru adalah Paduka Samaraja sendiri. Selain itu dalam Manuskrip berjudul “Hukum Adat Istiadat Negeri”⁴, nama Paduka Samaraja juga disebutkan sebagai Kepala Suku Haru sebagai anggota Dewan Datuk Empat Kerajaan Kubu⁵ yang dibentuk pada tahun 1893. Maka mengikuti penuturan tokoh, serta melihat beberapa dokumen tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Kepenghuluan Teluk Nilap adalah wilayah Suku Haru sebagai salah satu suku yang mendiami wilayah Kubu. Meskipun demikian kurang dapat ditelusuri asal mula keberadaan Suku Haru ini.

Sedangkan asal mula nama Teluk Nilap berasal dari penyebutan sebuah Teluk di Sungai Kubu dimana pada wilayah tersebut tinggal seorang perempuan bernama Nilap. Pembukaan kawasan Teluk Nilap berawal pada tahun 1916 dengan tujuan berladang untuk menanam padi. (Kepenghuluan Teluk Nilap, 2017) Setelah beberapa tahun, Teluk Nilap makin dikenal dengan berbagai hasil pertaniannya, mulai dari padi, jagung, ketela, sayur-sayuran, hingga palawija. Kesuburan tanah wilayah ini memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang menyebabkan makin berkembangnya wilayah ini menjadi kawasan perkampungan. Akibat perkembangan ini maka dibentuk Kepenghuluan Teluk Nilap. Bentuk kepenghuluan di wilayah Kubu mulai diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang menekan Kerajaan Siak untuk merubah struktur Pemerintahan Kesultanan Siak pada tahun 1916. Pada saat itu Negeri Kubu dirubah menjadi *Onderdistrict* Kubu, di bawah *District* Bagan Siapi-api. Perubahan ini turut merubah struktur kepemimpinan wilayah dimana setiap distrik dikepalai *Districthoofd* dan *Onderdistrict* dipimpin oleh *Onderdistricthoofd*. Kesatuan hukum terkecil adalah kampung-kampung yang dikepalai oleh Penghulu-penghulu. (Masyukri & Kutoyo, 1983) Dari perubahan, ini Kepala Suku di *Onderdistrict* Kubu kemudian hanya menjadi Penghulu untuk wilayah kampung dari masing-masing Suku. Meskipun demikian tidak terdapat catatan sejak kapan waktu yang pasti Kepenghuluan Teluk Nilap mulai dibentuk, tetapi paling tidak sejak tahun 1945 telah tercatat adanya Penghulu Teluk Nilap yaitu Datuk Aripin (Kandil) yang memimpin dari tahun 1945 hingga tahun 1947 (Kepenghuluan Teluk Nilap, 2017).

⁴ Hukum Adat Istiadat Negeri” merupakan masnuskrip berhuruf Jawi yang disusun oleh Kepala Suku Hambaraja bernama Abdurrahman bergelar Datuk Indra Setia pada tahun 1929, . (Dollah, 2017)

⁵ Dalam Hukum Adat Istiadat Negeri (1929) selain Datuk Paduka Samaraja dari Suku Haru, Anggota Dewan Datuk Empat Kerajaan Kubu diisi oleh Datuk Jaya Perkasa dari Suku Rawa, Datuk Indra Setia dari Suku Hambaraja, dan Datuk Indra Bangsawan dari Suku Bebas. (Dollah, 2017)

Wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap awalnya membentang hingga ke wilayah Simpang Kanan. Pada tahun 1990, wilayah Simpang Kanan dimekarkan sehingga saat ini menjadi satu Kecamatan tersendiri. Demikian pula sebelum pemekaran Kecamatan Kubu dengan dibentuknya Kecamatan Kubu Babussalam di tahun 2011 dimana Kepenghuluan Teluk Nilap sekarang termasuk di dalam wilayahnya, terlebih dahulu Kepenghuluan Teluk Nilap dimekarkan dengan dibentuknya Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya.

6.2 Etnis, Bahasa, Agama

Pada umumnya masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap merupakan etnis Melayu Riau, yaitu sub etnis Melayu Kubu yang berasal dari empat suku yang telah ada di masa Kerajaan Kubu, yaitu suku Rawa, Suku Hamba Raja, Suku Haru/Aru, dan Suku Bebas. Secara khusus jika dirunut dari sejarah wilayah dan berdasarkan penuturan warga Kepenghuluan Teluk Nilap merupakan wilayah Suku Haru/Aru. Asal usul keberadaan Suku Haru di dalam etnis Melayu kurang bisa ditelusuri asal muasalnya⁶.

Selain etnis Melayu, saat ini terdapat beberapa etnis/suku yang mendiami Kepenghuluan Teluk Nilap yaitu Jawa, Minang, Batak, dan Mandailing. Tidak didapatkan data jumlah jiwa penduduk yang berasal dari etnis/suku tersebut. Meskipun demikian kehidupan etnis-etnis ini cukup membaaur dan saling menghargai dan menerima budaya masing-masing, bahkan di Kepenghuluan Teluk Nilap berkembang salah satu jenis kesenian tradisional yang berasal dari etnis non-melayu. Hal ini memperlihatkan kehidupan yang cukup harmonis terjalin antar etnis/suku yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap.

Bahasa yang digunakan karena dominan dengan etnis Melayu maka bahasa Melayu Riau sub dialek Melayu Kubu merupakan bahasa yang umumnya digunakan oleh masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap. Selain itu digunakan Bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari serta masing-masing etnis/suku yang ada juga menggunakan bahasa masing-masing etnis/suku terutama dalam kehidupan di rumah tangganya.

⁶ Tetapi jika dilihat dari persebaran suku Haru/Aru yang ada di wilayah Kubu serta wilayah Riau lainnya, terdapat kemungkinan suku ini berasal dari masyarakat Kerajaan Haru yang pernah ada di sekitar pesisir pantai timur Sumatera Utara. Meskipun masih diperdebatkan tetapi salah satu perkiraan lokasi Kerajaan Haru menurut pendapat Groeneveldt (1960) berada kira-kira di Muara Sungai Barumon (Padang Lawas). Kerajaan Haru pernah ditaklukan oleh Kerajaan Aceh di tahun 1564 dan ketika Sultan Iskandar Muda memimpin Kerajaan Aceh sebagaimana tertulis dalam suratnya kepada Best bertanggal tahun 1613 yang berisikan tentang penaklukan Kerajaan Aru (Lombard, 2006). Di bawah Kekuasaan Aceh, nama Haru kemudian digantikan dengan Deli. Menurut beberapa sumber, Haru masih memiliki kekerabatan dengan suku Karo, dimana terdapat pendapat bahwa masyarakat Karo adalah masyarakat Haru yang mengungsi ke wilayah Pegunungan untuk menghindari masuk Islam, sedangkan orang Haru yang bertahan di wilayah pesisir lebih memilih mengikuti adat Melayu dan memeluk Islam.

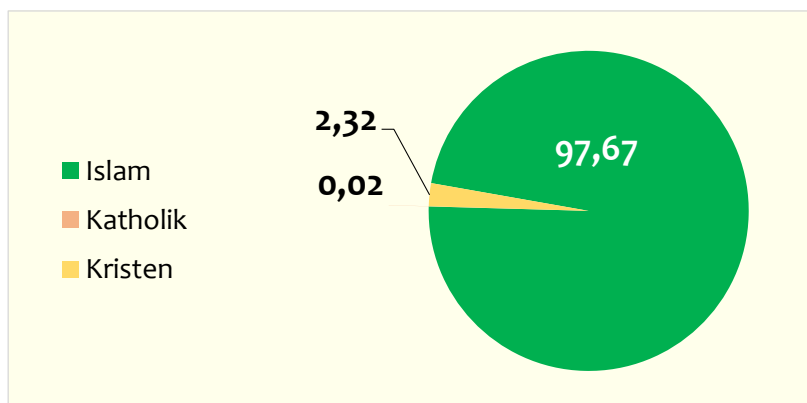
Adapun agama dan kepercayaan yang mayoritas dianut warga Kepenghuluan Teluk Nilap adalah Islam. Sebagaimana suku Melayu di daerah lain yang memiliki hubungan kebudayaan yang kental dengan budaya Islam, warga Kepenghuluan Teluk Nilap yang mayoritas merupakan suku Melayu merupakan penganut agama Islam. Meskipun demikian terdapat warga yang beragama lain, yaitu Katholik dan Kristen. Mengenai jumlah dan persentase penganut agama dan kepercayaan di Kepenghuluan Teluk Nilap dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 22. Penganut Agama dan Kepercayaan

No	Agama & Kepercayaan	Jumlah (Jiwa)
1	Islam	6.026
2	Katholik	1
3	Kristen	143
Total		6.170

Sumber: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (2018).

Gambar 8. Diagram Penganut agama dan Kepercayaan



Sumber: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (2018).

6.3 Legenda

Legenda yang ada di wilayah Teluk Nilap adalah Legenda mengenai Datuk Rambai. Menurut cerita di masa kerajaan Kubu, datanglah seorang pengembara dari Aceh yang bernama Teuku Abdullah Pasai yang diiringi dengan murid-muridnya salah satunya adalah Syekh Hasan Perlak dan beberapa orang lainnya, yang semuanya kaum laki-laki. Maksud kedatangannya untuk mengembangkan ajaran agama Islam di Negeri Kubu. Di Negeri Kubu pada saat itu masyarakat telah memeluk ajaran agama Islam, tetapi pada waktu itu pendidikan tidak diperhatikan oleh para pemuka suku sehingga ilmu-ilmu agama kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Ilmu yang berkembang pada saat itu adalah ilmu-ilmu beladiri terutama pencak silat serta ilmu-ilmu mistik yang tidak sesuai ajaran agama Islam.

Pada awalnya kehadiran Teuku Abdullah Pasai ini disambut dengan baik oleh masyarakat, tetapi kemudian sebagian masyarakat tidak mau mengikuti ajaran-ajaran agama yang disampaikan dan menimbulkan masalah antara sebagian masyarakat dengan pengikut-pengikut Teuku Abdullah Pasai. Setelah sembilan tahun bermukim di wilayah ini, Teuku Abdullah Pasai akhirnya meninggal dan sesuai wasiat beliau kepada murid-muridnya maka beliau dimakamkan di tempat beliau meninggal.

Pada tahun 1888, Tuan Guru Babussalam Syekh Abdul Wahan Rokan mengutus menantu nya, Tuan Haji Abdul Fattah, yang diiringi rombongannya untuk berziarah ke makam Teuku Abdullah Pasai. Maksud dari ziarah ini adalah selain untuk mendoakan Teuku Abdullah Pasai sebagai penyebar ajaran agama Islam, juga untuk berdoa kepada Allah agar Negeri Kubu selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala macam bala serta wabah penyakit yang melanda Negeri Kubu saat itu. Pada saat mencari makam Teuku Abdullah Pasai, keadaan aliran sungai yang menuju ke makam tersebut tidak dapat dilalui lagi karena sudah dangkal dan tidak dapat dijangkau, yang ada sekarang adalah pintasan/terusan. Syekh Haji Abdul Fattah mengambil keputusan di tempat tersebut untuk berdoa sesuai tujuan yang diamanatkan oleh Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan. Karena di tempat berdoa tersebut ditemui pohon Rambai maka kemudian Teuku Abdullah Pasai lebih dikenal dengan nama Datuk Rambai. Usai Syekh Haji Abdul Fattah dan rombongannya berdoa di tempat tersebut, wabah penyakit yang menyerang Negeri Kubu pun menghilang. Karenanya kemudian masyarakat Kubu mulai mengadakan pembacaan Ratib ke Rambai atau dalam istilah lokal biasa disebut *Atib Koambai* jika terjadi musibah tertentu yang menimpa masyarakat Kubu. *Atib Ko Ambai* dengan demikian adalah pembacaan ratib dari awal perjalanan menyusuri sungai hingga tiba di lokasi makam Datuk Rambai. Hal ini kemudian sejak tahun 1980-an menjadi tradisi rutin yang dilakukan oleh Masyarakat Kubu untuk melakukan *Atib Ko Ambai* pada tanggal 3 Syawal atau 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri.

Legenda lainnya yang berkembang dalam masyarakat adalah tentang Datuk Hutan dan Datuk Air yang merupakan penjaga wilayah ini. Datuk Sungai/Laut berwujud Buaya yang menjaga sungai dan laut, serta Datuk Hutan yang berwujud Harimau menjaga wilayah daratan hutan dan kampung. Menurut cerita, Datuk Harimau akan muncul di wilayah perkampungan jika ada seorang warga melakukan kesalahan. Selain itu terdapat semacam tabu atau pantangan bagi warga untuk tidak pergi ke hutan pada hari Jumat karena jika melanggar akan bertemu Datuk (Harimau). Legenda mengenai Harimau dan Buaya berkembang di kalangan masyarakat Melayu Kubu pada umumnya. Legenda ini bermula pada awal pembukaan lahan sebelum berdiri Kerajaan Kubu dimana Datuk Kancil, pengikut rombongan Tuanku Raja Hitam dari Suku Rawa yang tiba di wilayah ini dan mendirikan Kerajaan Kubu, mendapat tugas untuk memimpin ritual *Totaw Menotaw* atau di wilayah lain di riau dikenal dengan *Menatau Tanah*, yaitu upacara ritual untuk mulai membuka tanah. Setelah ritual yang menggunakan seekor kambing dan daun juang-juang (*Cordyline Fruticosa* L. A. Cheval) ini terjadi beberapa

keanehan. Sepanjang tepi sungai tumbuh kayu yang berbaris rapat seperti pagar, dan daun juang-juang yang digunakan menjadi sebatang pohon besar.

Di tempat ritual terlihat jejak dari dua ekor binatang berbeda, arah ke darat terlihat jejak harimau dan arah ke sungai terlihat jejak buaya. Ketika Datuk Kancil melihat jejak ini, beliau termenung dan berujar “Orang Kubu tidak pernah dikalahkan oleh manusia, kecuali oleh Harimau dan Buaya”. (Dollah, 2017) Dari kisah ini lah Harimau dianggap sebagai Datuk Hutan dan Buaya sebagai Datuk Sungai/Laut dalam masyarakat Melayu Kubu bermula.

6.4 Kesenian Tradisional

Kesenian tradisional yang asli lahir dari masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap tidak dapat ditemukan. Meskipun demikian terdapat kesenian-kesenian tradisional yang berasal terutama dari budaya Suku Melayu yang mendapat pengaruh dari budaya Arab dalam penyebaran agama Islam. Kesenian tradisional terbut adalah nasyid rebana, marhaban, serta suluk (berzikir dari malam hingga subuh), kesenian ini biasa dimainkan pada saat acara hajatan atau peringatan hari-hari besar keagamaan. Terdapat pula kesenian-kesenian yang ditampilkan pada rangkaian acara prosesi pernikahan adat Melayu yaitu tari piring yang biasanya dimainkan oleh anak-anak pada saat malam berinai, serta Silat Melayu yang dimainkan pada saat kedua mempelai di pelaminan dalam acara pernikahan. Selain kesenian yang berasal dari adat Melayu, terdapat kesenian tradisional Jawa yang cukup berkembang dan sering dipertunjukkan ketika ada acara yang diselenggarakan oleh suku Jawa di Kepenghuluan Teluk Nilap serta pada acara-acara perayaan hari besar tertentu, kesenian tradisional tersebut adalah Jaran Kepang atau Kuda kepang, seerta Reog Ponorogo.

6.5 Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam hampir tidak dapat ditemukan lagi pada masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap sebagai masyarakat yang bergantung kehidupannya kepada pertanian. Introduksi jenis tanaman komoditas Kelapa Sawit menyebabkan warga lebih mengembangkan pengetahuannya berdasarkan pengalamannya dalam membudidayakan komoditas tersebut dengan menyesuaikan pada kondisi tanah dan alam di wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap. Dalam melakukan penanaman misalnya warga mengungkapkan tentang praktek tanpa bakar dalam menanam dengan menyemprot racun, membuat parit dan menebas setelah itu dibiarkan sebelum memulai menanam.

Demikian juga hampir tidak ditemukan adanya ritual tertentu untuk melakukan pengolahan tanah yang kini dilakukan oleh masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap. Meskipun demikian masih terjaga tradisi *Atib Ko Ambai* yang dipercaya

sebagai bentuk permohonan doa kepada Allah untuk menghindarkan dari bencana dan wabah penyakit.



Bab VII

Pemerintahan dan Kepemimpinan

7.1 Pembentukan Pemerintahan

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap, Datuk Paduka Samaraja, yang merupakan orang kepercayaan Raja Siak yang memimpin wilayah Teluk Nilap di masa Negeri Kubu merupakan provinsi dari Kerajaan Siak. Paduka Samaraja pada Bab Al Qawaid tertera sebagai Hakim Kepala Suku Haru sekaligus memimpin Suku Haru. Di bawah kepemimpinannya terdapat dua Hinduk yang merupakan Hinduk dari Suku Haru yaitu Hinduk Haru Penghulu Haru dipimpin oleh Penghulu Haru, serta Hinduk Haru Besar yang pemimpinnya dalam Bab Al Qawaid disebut Bebas atau belum ditentukan. Selain sebagai Kepala Suku dan Hakim Kepala Suku Haru, ada kemungkinan yang disebut Penghulu Haru yang mengepalai Hinduk Haru Penghulu Haru adalah Paduka Samaraja sendiri. Dalam Manuskrip “Hukum Adat Istiadat Negeri”⁷, Paduka Samaraja juga disebutkan sebagai Kepala Suku Haru sekaligus anggota Dewan Datuk Empat Kerajaan Kubu yang dibentuk pada tahun 1893. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kepenghuluan Teluk Nilap termasuk dalam wilayah Suku Haru sebagai salah satu suku dari sub etnis Melayu di wilayah Negeri Kubu yang dipimpin oleh Datuk Paduka Samaraja sejak paruh akhir abad 19 dan di awal abad 20.

Bentuk Kepenghuluan di wilayah Kubu mulai diterapkan Pemerintah Hindia Belanda yang menekan Kerajaan Siak untuk merubah struktur Pemerintahan Kesultanan Siak pada tahun 1916. Pada saat itu Negeri Kubu sebagai sebuah Provinsi dalam Kerajaan Siak dirubah menjadi *Onderdistrict* Kubu yang berada di bawah *District* Bagan Siapi-api. Perubahan ini turut merubah struktur kepemimpinan wilayah dimana setiap distrik dikepalai *Districthoofd* dan *Onderdistrict* dipimpin oleh *Onderdistricthoofd*. Kesatuan hukum terkecil adalah

⁷ Hukum Adat Istiadat Negeri” merupakan manuskrip berhuruf Jawi yang disusun oleh Kepala Suku Hambaraja bernama Abdurrahman bergelar Datuk Indra Setia pada tahun 1929, . (Dollah, 2017)

kampung-kampung yang dikepalai oleh Penghulu-penghulu. (Masyukri & Kutoyo, 1983)

Dari perubahan struktur pemerintahan di *Onderdistrict* Kubu ini Kepala Suku kemudian hanya menjadi Penghulu untuk wilayah kampung dari masing-masing Suku. Meskipun demikian tidak terdapat catatan sejak kapan waktu yang pasti Kepenghuluan Teluk Nilap mulai dibentuk karena mengikuti sejarah dalam Profil Kepenghuluan Teluk Nilap (2017) maka wilayah ini baru mulai dibuka pada tahun 1916. Tetapi paling tidak sejak tahun 1945 ketika memasuki masa kemerdekaan Indonesia telah ada Penghulu Teluk Nilap yaitu Datuk Aripin (Kandil) yang memimpin dari tahun 1945 hingga tahun 1947 (Kepenghuluan Teluk Nilap, 2017).

Berikut ini merupakan tabel yang menerangkan para pemimpin Kepenghuluan Teluk Nilap sejak tahun 1945 hingga saat ini:

Tabel 23 Sejarah Kepenghuluan Teluk Nilap

Tahun	Nama Pemimpin	Keterangan
1945 - 1947	Aripin (Kandil)	Penghulu
1947 - 1950	Mahmud (Onik)	Penghulu
1950 - 1954	Kh. Busu	Penghulu
1954 - 1980	M. Yakub (Ngongot)	Penghulu
1980 - 2003	H. Abdul Karim. MY	Penghulu
2003 - 2017	H. Gamal Bacik, S.E.	Penghulu
2017 - 2018	Muhaimin	PLT
2018 - 2023	H. Gamal Bacik, S.E.	Penghulu

Sumber : Kepenghuluan Teluk Nilap (2017).

Wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap pada awalnya membentang hingga ke wilayah Simpang Kanan. Pada tahun 1990, wilayah Simpang Kanan dimekarkan sehingga saat ini menjadi satu Kecamatan tersendiri. (Kepenghuluan Teluk Nilap, 2017) Demikian pula sebelum pemekaran Kecamatan Kubu dengan dibentuknya Kecamatan Kubu Babussalam tahun 2011 dimana Kepenghuluan Teluk Nilap sekarang termasuk dalam wilayahnya, terlebih dahulu Kepenghuluan Teluk Nilap dimekarkan dengan dibentuknya Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya.

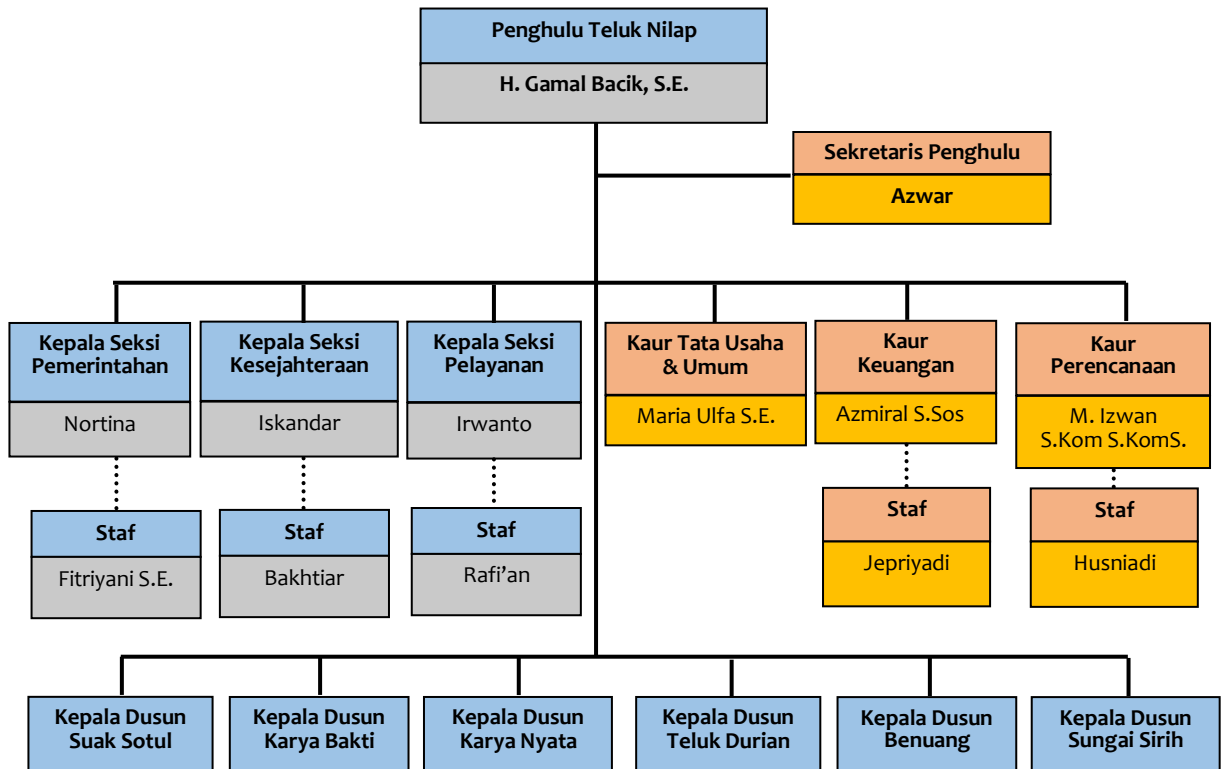
7.2 Struktur Pemerintahan Desa 2019

Kepenghuluan berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Kepenghuluan dan Perubahan Status Kepenghuluan Menjadi Kelurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Kepenghuluan dalam Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 8 Tahun 2015 juga diterangkan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu dibantu Perangkat Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan. Penghulu adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Penghulu. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan selanjutnya disingkat BPKep adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Perangkat Kepenghuluan adalah Aparatur Pemerintah Kepenghuluan yang membantu Penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretariat Kepenghuluan, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Staf adalah perangkat Kepenghuluan yang bertugas membantu perangkat Kepenghuluan yang menduduki jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksana Kewilayahan atau disebut juga Dusun adalah Bagian wilayah dalam Kepenghuluan yang merupakan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan. Mengenai struktur Pemerintahan Kepenghuluan Teluk Nilap adalah sebagai berikut:

Gambar 9. Struktur Organisasi Kepenghuluan Teluk Nilap



Sumber : Diolah dari Kepenghuluan Teluk Nilap (2017).

Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa memberikan pedoman dalam Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para perangkat Kepenghuluan di Kepenghuluan Teluk Nilap. Adapun Tupoksi perangkat Kepenghuluan Teluk Nilap mengikuti peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Tupoksi Kepenghuluan Teluk Nilap

No	Tugas dan Fungsi
1. Penghulu/Kepala Desa	
	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan
	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
2. Sekretaris Kepenghuluan / Desa	
	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	
	Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
4. Kepala Urusan Keuangan	
	Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

5.	Kepala Urusan Perencanaan
	Mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
6.	Kepala Seksi Pemerintahan
	Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
7.	Kepala Seksi Kesejahteraan
	Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
8.	Kepala Seksi Pelayanan
	Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
9.	Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

Sumber: Permendagri No. 84 Tahun 2015.

7.3 Kepemimpinan Tradisional

Kepemimpinan Tradisional memang tidak tampak di permukaan masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap, tetapi sebenarnya terjadi dan berlangsung dalam masyarakat di Kepenghuluan ini. Hal ini terlihat dalam Kepemimpinan kepenghuluan Teluk Nilap yang telah berlangsung, dimana para tokoh-tokoh memiliki akar dan pengetahuan yang baik dalam adat dan budaya Melayu yang berjalan dalam masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap. Kepemimpinan ini juga mensyaratkan kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam ajaran agama Islam, dimana adat Melayu selalu bersandar dengan Agama Islam. Dengan demikian pengetahuan akan tradisi, adat, dan budaya Melayu yang bersanding dengan ajaran agama Islam menjadi syarat mutlak dalam kepemimpinan yang berlaku dalam masyarakat di Kepenghuluan Teluk Nilap.

7.4 Aktor Berpengaruh

Gambaran mengenai aktor berpengaruh di Kepenghuluan Teluk Nilap didapatkan dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik yang dirumuskan oleh Bernstein (2010) untuk melihat ekonomi politik masyarakat pedesaan melalui empat pertanyaan, yaitu siapa menguasai apa; siapa melakukan apa; siapa mendapatkan apa; apa yang dilakukan dengan apa yang didupatkannya. Jawaban empat pertanyaan tersebut menghasilkan aktor-aktor yang kemudian diidentifikasi sebagai aktor/tokoh dalam bidang apa dalam kehidupan masyarakat di Kepenghuluan Teluk Nilap.

Tokoh-tokoh yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap pada umumnya memiliki relasi yang baik dengan budaya Melayu yang ada di Kepenghuluan ini. Karenanya, tokoh-tokoh ini memainkan perannya juga selain sebagai pemuka masyarakat juga sebagai pemuka budaya dalam masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap. Paling Tidak terdapat dua tokoh yang memiliki kepemimpinan di Kepenghuluan Teluk Nilap yang telah dan sedang memimpin Kepenghuluan ini dengan pengetahuan yang kuat tentang tradisi dan budaya Melayu yang hidup dalam Masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap. Hubungan masyarakat dengan seni dan budaya memberikan pengaruh ketokohan pula kepada tokoh lain yang aktif bergelut dalam pengembangan seni budaya di Kepenghuluan Teluk Nilap khususnya dan Masyarakat Kubu pada umumnya. Ketokohnya dibangun dengan mengembangkan senid dan budaya melalui proses pendidikan kepada anak-anak di Kepenghuluan Teluk Nilap. Upaya pelestarian dan pengembangan budaya yang dilakukannya ini tidak hanya membuatnya menjadi tokoh di tengah masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap, lebih jauh lagi Pemerintah memberikan penghargaan atas apa yang dilakukannya dalam Seni dan Budaya.

Pendidikan dasar sudah dinilai cukup penting di dalam masyarakat kepenghuluan Teluk Nilap, pandangan ini tentu saja tidak serta merta timbul di dalam masyarakat tetapi ada proses agensi yang bekerja dan merubah pandangan dalam masyarakat tersebut. Di Kepenghuluan Teluk Nilap perubahan cara pandang tentang pendidikan ini diupayakan oleh seorang tokoh perempuan dengan melalui pembangunan kegiatan pendidikan dengan mengupayakan berdiri dan berjalannya lembaga pendidikan dasar secara swadaya di salah satu Dusun di Kepenghuluan Teluk Nilap. Kerja kerasnya dalam mengupayakan pendidikan ini menyebabkan warga menokohnya di dalam kehidupan masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap.

Adapun bersandingnya tradisi dan agama sebagai ciri khas dalam kehidupan orang melayu menyebabkan orang yang memiliki ilmu yang cukup mengenai Agama Islam terutama di Kpenghuluan Teluk Nilap adalah yang berkaitan dengan Tarekat.

Perkembangan Tarekat dalam masyarakat Melayu khususnya di Kubu memang sudah lama terbangun terbukti dengan terlihatnya ajaran tarekat terutama Tarekat Naqsabandiyah dalam tradisi yang dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan di dalam kegiatan-kegiatan adat dan keagamaan. Karenanya di dalam masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap dapat terjadi penokohan untuk seseorang yang dianggap memiliki ilmu dan kemampuan dalam ilmu Tarekat dan amalan-amalan dalam ibadah. Hal ini terjadi pada seorang tokoh di masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap yang cukup dikenal karena memberikan pengajaran kepada masyarakat mengenai ilmu tarekat dan memperoleh penghormatan karena kemampuannya tersebut. Untuk lebih detil mengenai penjelasan tokoh-tokoh yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 25 Analisa Tokoh/ Aktor Di Kepenghuluan Teluk Nilap

Tokoh A	Tokoh B	Tokoh C	Tokoh D	Tokoh E
Menguasai apa				
Ilmu Tarekat Islam	Memimpin Yayasan Pendidikan PAUD, TK dan SD Terpadu	Seni dan Budaya	Sejarah Desa Teluk Nilap, Kubu dan Kuba	Adat Istiadat Melayu
Melakukan apa				
Memberikan pengajaran tentang ilmu-ilmu tarikat yang berkenaan dengan amalan-amalan ibadah.	Mendirikan Lembaga Pendidikan tingkat PAUD, TK dan SD yang pendiriannya di biayai sendiri.	Melestarikan dan mengembangkan seni Budaya	Menyampaikan cerita sejarah tentang Desa Teluk Nilap kubu dan Kuba	Memimpin kegiatan adat saat ada acara pernikahan & acara yang berkenaan dengan adat
Mendapatkan apa				
Penghormatan dari Masyarakat	Pujian dan Penghormatan dari masyarakat	Penghargaan dari Pemerintah dan masyarakat	Penghormatan	Penghormatan
Yang dilakukan dengan apa yang didapatkan				
memberikan pengajaran tentang ilmu tarikat naqsabandiah dan pengamalan islam sehingga masyarakat menaruh rasa hormat kepadanya.	mendirikan Yayasan Pendidikan sekaligus menjadi Pimpinan Lembaga tersebut sehingga mendapatkan penghormatan dari masyarakat.	Kembangkan seni dan budaya melalui pendidikan kepada anak-anak sekolah sehingga mendapatkan penghargaan dari Pemerintah.	menyampaikan sejarah tentang Desa Teluk Nilap, tentang Kecamatan Kubu dan Pemekarannya sehingga adanya kecamatan Kuba.	Memandu kegiatan seremonial adat Melayu pada saat ada acara pernikahan sesuai adat Melayu.
Klasifikasi aktor				
Tokoh Religi	Pendidikan	Budaya	Sosial	Budaya

Sumber: Observasi dan Wawancara Warga Kepenghuluan Teluk Nilap.

7.5 Mekanisme Penyelesaian Sengketa/Konflik Penguasaan Lahan

Adanya investasi Migas yang masuk di Kepenghuluan Teluk Nilap juga memunculkan sengketa antara warga dengan perusahaan Migas dalam soal pembebasan lahan yang hingga kini menurut warga belum terselesaikan. Hal ini karena adanya perbedaan pandangan dalam melihat status tanah yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap khususnya pada wilayah eksplorasi dan eksploitasi migas yang masuk dalam Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) migas/Blok Rokan. Lapangan Pinang GS mulai dieksploitasi sejak tahun 1971, dan masih terus dilakukan proses eksplorasi untuk menemukan sumur-sumur migas yang potensial dan cukup ekonomis dalam memproduksi. Kawasan Lapangan Pinang GS serta wilayah eksplorasi dan eksploitasi yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap jika dilihat dari penguasaan legal formal maka berada dalam kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK). Sebagaimana biasanya kegiatan migas di Indonesia, alas hak tanah yang digunakan adalah Hak Pakai dan biaya proses pembebasan lahan termasuk dalam *cost recovery* yang oleh pemegang operasi Kontrak Karya diajukan kepada Pemerintah Indonesia (Bachriadi & Suryana, 2016). Dalam pengelolaan lahan migas ini, jika ditemukan sumur-sumur migas produktif maka status kawasan HPK dirubah menjadi Kawasan Area Penggunaan Lain yang selanjutnya diberikan sertipikat Hak Pakai. Sedangkan warga mendasarkan tanah garapan yang dikelolanya dengan bukti berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) ataupun Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Dalam diskusi kelompok terfokus, sengketa ini belum terselesaikan dan mengarah pada proses pemberian ganti rugi untuk warga yang tanahnya digunakan untuk kegiatan ekstraktif Migas. Pihak Kepenghuluan telah berusaha menjembatani antara warga dengan pihak perusahaan migas tetapi belum menemukan penyelesaian.

Di Kepenghuluan Teluk Nilap sengketa/konflik penguasaan lahan antar warga Kepenghuluan jarang terjadi atau jika pun ada tidak membesar hingga berperkara di pengadilan. Jika terjadi sengketa mengenai batas tanah antar warga dilakukan musyawarah antara para pihak yang bersengketa. Jika salah satu pihak belum bersepakat sehingga tidak dapat diambil keputusan penyelesaian sengketa oleh para pihak dalam musyawarah, biasanya ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun dilibatkan oleh para pihak yang bersengketa untuk menengahi perselisihan tersebut dalam musyawarah lanjutan. Biasanya Kepenghuluan dilibatkan musyawarah jika antar pihak bersengketa tidak menemukan titik temu pada musyawarah di tingkat RT/RW ataupun Dusun, biasanya musyawarah di tingkat Kepenghuluan ini mampu mendamaikan sengketa tanah antar para pihak.

7.6 Mekanisme/Forum Pengambilan Keputusan Desa

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) telah meletakkan kerangka acuan untuk proses masyarakat di desa dapat terlibat aktif menyampaikan segala pendapat dan kepentingannya dalam bentuk yang lebih partisipatif. Pasal 54 UU Desa telah menetapkan keberadaan lembaga Musyawarah Desa dan setiap keputusan yang diambil di tingkatan desa diawali dengan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintahan Desa, dan Unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Amanat UU Desa tersebut di Kepenghuluan Teluk Nilap telah dicoba diwujudkan melalui penyelenggaraan musyawarah desa untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kepenghuluan menjadi awalan dalam proses perencanaan untuk penyelenggaraan pembangunan jangka menengah dan setiap tahun, yaitu melalui forum perencanaan pembangunan di tingkat Kepenghuluan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kepenghuluan dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sebagian pihak dalam masyarakat masih menyatakan bahwa aspirasi yang ada dari berbagai elemen masyarakat di Kepenghuluan ini belum dapat sepenuhnya terartikulasi dalam proses musyawarah untuk merencanakan pembangunan yang telah berlangsung selama ini. Musyawarah Desa di Kepenghuluan Teluk Nilap dirasakan masih belum mencapai bentuk partisipatif yang kualitasnya lebih substantif, dimana proses-proses perencanaan pembangunan masih berlangsung untuk menyelesaikan kewajiban penyusunan program pembangunan, Diharapkan di masa mendatang ada perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan musyawarah desa sehingga partisipasi masyarakat menjadi lebih bernilai substantif dalam pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan.



Bab VIII

Kelembagaan Sosial

8.1 Organisasi Sosial Formal

Pada umumnya pendirian organisasi sosial formal serta pembentukan pengurus kelembagaannya dilakukan melalui proses Musyawarah. Pembentukan kelembagaan ada yang didasarkan pada kesepakatan kelompok atau memang sudah menjadi ketetapan Peraturan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan pembentukan lembaga dan pengurus kelembagaan yang disahkan oleh instansi tertentu.

Organisasi sosial formal di Kepenghuluan Teluk Nilap sebagian besar berjalan cukup aktif dan rutin dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Terdapat beberapa organisasi sosial formal yang oleh warga sering disebutkan dalam wawancara, yaitu Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) serta Pemolisian Masyarakat (POLMAS). Lembaga organisasi sosial formal yang diidentifikasi berkontribusi dalam kehidupan masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Organisasi Sosial Formal di Kepenghuluan Teluk Nilap

No	Nama Organisasi	Nama Ketua	Tujuan Pembentukan
1	Pemerintah Kepenghuluan	H. Gamal Bacik S.E.	Melaksanakan roda pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat
2	Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW)		Melaksanakan pelayanan dan ketertiban masyarakat antar tetangga, dan menjembatani urusan dengan Pemerintah Kepenghuluan
3	Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep)	Agus Salim	Melaksanakan musyawarah tingkat Kepenghuluan
4	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		Melaksanakan kegiatan Pembangunan Kepenghuluan
5	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Teluk Nilap		Melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat Desa
6	Poliklinik Desa (Polides)		Melaksanakan pelayanan Kesehatan masyarakat desa

7	Pos Pelayanan Terpadu (PosYandu)		Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan Ibu dan anak
8	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panglima		Melaksanakan kegiatan perekonomian Kepenghuluan
9	Karang Taruna Tunas Muda	Hamidi	Melaksanakan kegiatan kepemudaan
10	Pemolisian Masyarakat (Polmas)	Musni Hasan	Kemitraan masyarakat dengan Polri untuk memberikan perlindungan keamanan dan ketertiban pada masyarakat desa
11	Masyarakat Peduli Api (MPA)		Memantau keadaan lahan dari kebakaran Memberikan informasi mengenai peristiwa karhutla kepada aparat terkait

Sumber: FGD I Penyusunan Laporan Profil DPG 2019 & Wawancara Warga Kepenghuluan Teluk Nilap.

8.2 Organisasi Sosial Nonformal

Kumpulan dua orang atau lebih yang terlibat dalam sebuah aktivitas yang memiliki tujuan tanpa terikat dengan kepengurusan secara legal merupakan sebuah Organisasi Sosial Non-formal. Sarana membentuk dan memilih kepengurusan dalam organisasi sosial non formal adalah melalui musyawarah yang dilanjutkan dengan melengkapi dengan berbagai syarat yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan tertentu yang diarahkan mencapai tujuan pembentukan organisasi.

Wirid Yasin merupakan organisasi sosial non formal yang cukup banyak diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat di Teluk Nilap, dimana hampir pada setiap Dusun atau RW memiliki kelembagaan kegiatan Wirid Yasin masing-masing. Wirid Yasin juga biasanya memiliki kelembagaan dan kegiatan yang terpisah antara perempuan dan laki-laki. Organisasi sosial non formal di Kepenghuluan Teluk Nilap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 27. Organisasi Sosial Non Formal di Kepenghuluan Teluk Nilap

No	Nama Organisasi	Nama Ketua	Tujuan Pembentukan
1	Wirid Yasin Dusun Karya Bakti	Sulaiman	Melaksanakan kegiatan keagamaan Islam bagi masyarakat Desa Teluk Nilap Memperat tali silaturahmi
2	Wirid Yasin Dusun Sungai Sirih	Soleh	Melaksanakan kegiatan keagamaan Islam bagi masyarakat Desa Teluk Nilap Memperat tali silaturahmi
3	Wirid Yasin Dusun Suak Sotul	Kh. Tuah	Melaksanakan kegiatan keagamaan Islam bagi masyarakat Desa Teluk Nilap Memperat tali silaturahmi
4	Wirid Yasin Dusun Benuang	Mulyadi	Melaksanakan kegiatan keagamaan Islam bagi masyarakat Desa Teluk Nilap Memperat tali silaturahmi
5	Wirid Yasin Jl. Lintas Sudirman	-	Melaksanakan kegiatan keagamaan Islam bagi masyarakat Desa Teluk Nilap

			Memperat tali silaturahmi
6	Wirid Yasin Tap Tiga	Anto	Melaksanakan kegiatan keagamaan Islam bagi masyarakat Desa Teluk Nilap Memperat tali silaturahmi
7	Wirid Yasin Ujung Parit	Wak Usup	Melaksanakan kegiatan keagamaan Islam bagi masyarakat Desa Teluk Nilap Memperat tali silaturahmi
8	Wirid Yasin Jl. Sunting	Khairul Amri	Melaksanakan kegiatan keagamaan Islam bagi masyarakat Desa Teluk Nilap Memperat tali silaturahmi

Sumber: FGD I Penyusunan Laporan Profil DPG 2019 & Wawancara Warga Kepenghuluan Teluk Nilap.

8.3 Jejaring Sosial Desa

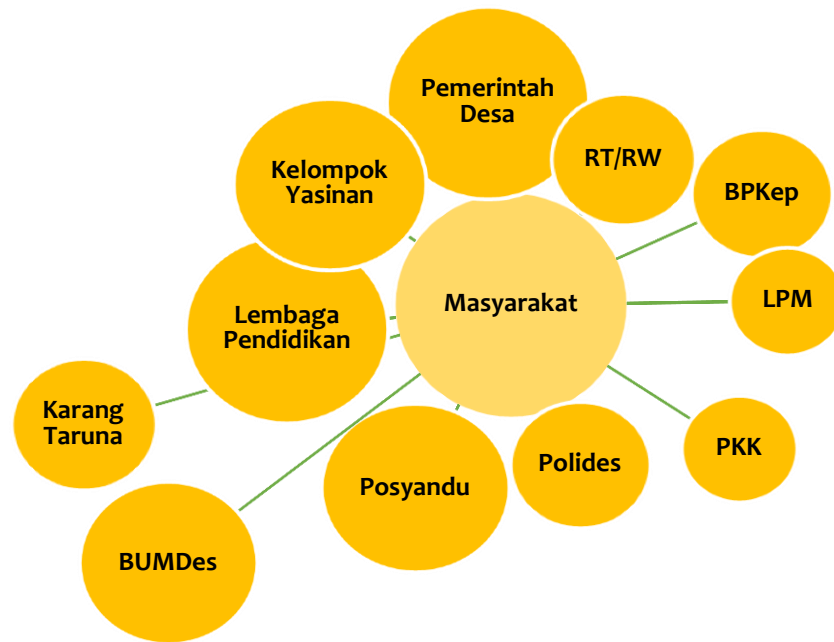
Jejaring sosial (*social network*) adalah berbagai kumpulan individu atau kelompok yang terikat oleh kepentingan dan atau tujuan yang sama. Jejaring sosial (*social network*) di pedesaan menjadi salah satu modal sosial (*social capital*) yang menjadi penopang keberadaan masyarakat pedesaan. Jejaring sosial desa bisa terbentuk atas dasar berbagai kepentingan, mulai dari ekonomi, politik, budaya, agama/kepercayaan maupun pemberdayaan masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dengan membentuk dan memanfaatkan jejaring sosial di pedesaan adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa. Hubungan antara institusi formal dan non formal dengan masyarakat di Kepenghuluan Teluk Nilap sebagaimana ada tabel dan diagram berikut:

Tabel 28. Hubungan Kelembagaan Kepenghuluhan Teluk Nilap

No	Peran/Manfaat	Kedekatan Dengan Masyarakat	
		Penilaian	Ket
1	Pemerintah Desa		
	Melaksanakan roda pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat	Sangat dekat dalam fungsi & penanannya	Aktif
2	RT/RW		
	Melaksanakan pelayanan dan ketertiban masyarakat antar tetangga, dan menjabatani urusan dengan pemerintah desa	Sangat dekat dalam fungsi & penanannya	Aktif
3	BPKep		
	Melaksanakan musyawarah tingkat desa	Dekat	Aktif
4	LPM		
	Melaksanakan kegiatan Pembangunan Desa	Dekat	Aktif
5	PKK Desa Teluk Nilap		
	Melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat Desa	Dekat	Aktif
6	Polides		
	Melaksanakan pelayanan Kesehatan masyarakat desa	Sangat dekat	Aktif
7	PosYandu		
	Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan Ibu dan anak	Sangat dekat	Aktif
8	Bumdes Panglima		
	Melaksanakan Kegiatan Perekonomian Desa	Kurang dekat	Kurang aktif
9	Karang Taruna Tunas Muda		
	Melaksanakan kegiatan kepemudaan	Kurang dekat	Kurang aktif
10	Lembaga Pendidikan		
	PAUD Permata Bunda; PAUD An Naziroh; TK Suhada; MDA Nurul Khairot; MDA; Nurul Iman; MDA Al Hidayah; SDN 009; SDN 004; SMP N 1 Teluk Nilap; SMA N 1 Kuba; & SMK	Sangat dekat karena masyarakat telah mempercayakan pendidikan anak-anaknya ke sekolah tersebut, bahkan bukan hanya anak-anak desa teluk nilap tapi juga dari desa lain.	Aktif
	Melaksanakan Pendidikan dan pembinaan anak-anak dari usia dini hingga remaja dalam upaya membangun Karakter generasi muda untuk menjadi yang tangguh dan bermartabat.		
11	Kelompok Yasinan		
	Kel. Yasinan Dusun Karya Bakti; Kel. Yasinan Dusun Sei. Sirih; Kel. Yasinan Dusun Suak Sotol; Kel. Yasinan Dusun Benuang; Kel. Yasinan Jl. Lintas Sudirman; Kel. Yasinan Tap Tiga; Kel. Yasinan Ujung Parit; & Kel. Yasinan Jl. Sunting	Sangat dekat	Aktif
	Melaksanakan kegiatan keagamaan Islam bagi masyarakat Desa Teluk Nilap		

Sumber: FGD I Penyusunan Laporan Profil DPG 2019.

Gambar 10. Diagram Venn Hubungan Kelembagaan Kepenghuluan Teluk Nilap



Sumber: Diolah dari hasil FGD I Penyusunan Laporan Profil DPG 2019.



Bab IX

Perekonomian Desa

9.1 Pendapatan dan Belanja Desa

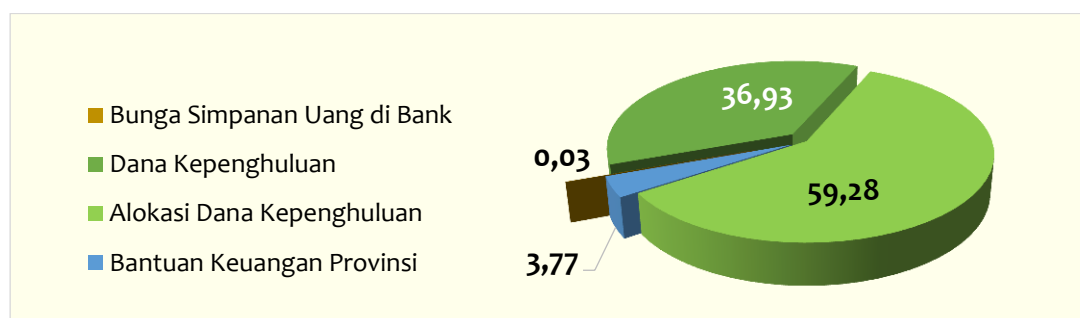
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (APBKep) Teluk Nilap berpedoman beberapa produk hukum berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Bupati, serta Peraturan Kepenghuluan. Produk hukum yang menjadi pedoman utama penyusunan APBKep Teluk Nilap berlandaskan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) pada Bab VIII Keuangan Desa dan Aset Desa. Pada UUD Desa pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pada UU Desa pasal 71 pada ayat (2) dinyatakan Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Sumber Pendapatan Kepenghuluan Teluk Nilap pada tahun 2018 sebesar 99,97% berasal dari pendapatan transfer dimana yang terdiri dari Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK), Dana Kepenghuluan (DK), dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi. ADK merupakan pendapatan transfer yang terbesar dibandingkan dengan sumber pendapatan transfer yang lain. Sedangkan sumber pendapatan asli Kepenghuluan yang ada saat ini baru berasal dari Bunga simpanan uang di Bank yang jumlahnya masih sangat kecil. Hal ini memperlihatkan belum adanya sumber pendapatan asli kepenghuluan yang diupayakan secara produktif untuk menunjang pendapatan Kepenghuluan Teluk Nilap. Seluruh Pendapatan Kepenghuluan ini kemudian dialokasikan untuk menjalankan program pembangunan di Kepenghuluan Teluk Nilap. Tentang Pendapatan Kepenghuluan Teluk Nilap lebih detail dapat dilihat pada tabel dan diagram dibawah ini:

Tabel 29. Sumber Pendapatan Kepenghuluan Teluk Nilap Tahun 2018

No	Pendapatan	Jumlah	
I.	Pendapatan Asli Kepenghuluan		
1.	Bunga Simpanan Uang di Bank	Rp	848.706
II.	Pendapatan Transfer		
1.	Dana Kepenghuluan	Rp	980.654.000
2.	Alokasi Dana Kepenghuluan	Rp	1.574.131.412
3.	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp	100.000.000
Total		Rp	2.655.634.118

Sumber: APBKep Kepenghuluan Teluk Nilap 2018.

Gambar 11. Diagram Pendapatan Kepenghuluan Teluk Nilap

Sumber: APBKep Kepenghuluan Teluk Nilap 2018.

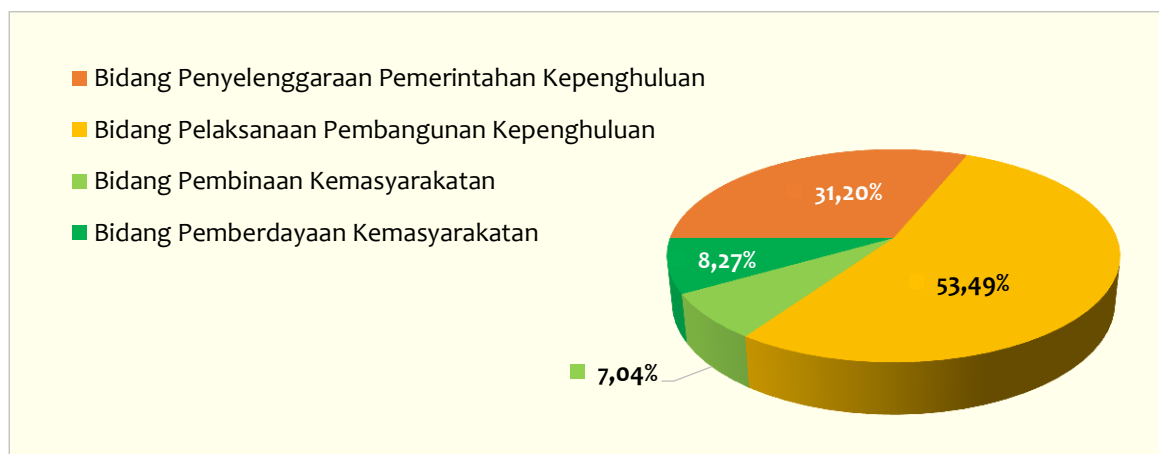
Selain dari Pendapatan Kepenghuluan, pendanaan program pembangunan dalam APBKep Teluk Nilap juga didapat dari Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) tahun 2017 yang rinciannya adalah sebesar Rp. 349.320,-. Penempatan SILPA dalam Penerimaan Pembiayaan dan bukan pada Pendapatan Kepenghuluan sudah sesuai dengan Permendagri no. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. SILPA ini digunakan untuk menutupi kekurangan pendanaan dalam Belanja Kepenghuluan Teluk Nilap tahun 2018.

Belanja Kepenghuluan Teluk Nilap terbagi dalam empat bidang program utama dengan porsi terbesar pembiayaan adalah untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kepenghuluan yang 82,13% pembiayaan bidang ini ditujukan untuk pembangunan infrastruktur desa berupa jalan, jembatan, dan gorong-gorong. Lebih detail mengenai besaran Belanja dalam tiap bidang pada APBKep Kepenghuluan Teluk Nilap dapat dilihat pada Tabel dan diagram berikut:

Tabel 30 Belanja Kepenghuluan Teluk Nilap

No	Belanja	Jumlah	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan	Rp	937.409.118,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kepenghuluan	Rp	1.606.948.094,-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	211.448.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp	248.300.000,-
Total		Rp	3.004.105.212,-

Sumber: APBKep Kepenghuluan Teluk Nilap 2018.

Gambar 12. Diagram Belanja Kepenghuluan Teluk Nilap 2018

Sumber: APBKep Kepenghuluan Teluk Nilap 2018.

9.2 Aset Desa

Aset Desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa berupa benda bergerak dan juga benda tidak bergerak yang dimiliki oleh desa dan inventaris desa. Data Aset Desa yang tersedia pada saat penyusunan laporan memang belum lengkap, karena Kepenghuluan sedang melakukan pendataan aset desa yang ada. Meskipun demikian data yang tersedia telah memuat jenis-jenis aset desa yang dimiliki oleh Kepenghuluan Teluk Nilap. Adapun macam-macam aset desa dan inventaris desa pada Kepenghuluan Teluk Nilap dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 31. Aset Desa

A. Inventaris Kantor						
No	Nama/Jenis	Jumlah	Tahun Beli	Asal Usul/Cara Pembelian	Kondisi	
1	Meja	12 unit	-	-	Layak	
2	Kursi	24 unit	-	-	Layak	
3	Kursi Tamu	1 set	-	-	Layak	
4	Meja tamu	1 unit	-	-	Layak	
5	Lemari	5 unit	-	-	Layak	
6	Komputer	6 unit	-	-	Layak	
7	Laptop	4 unit	-	-	Layak	
8	Printer	4 unit	-	-	Layak	
9	Dispenser	1 unit	-	-	Layak	
B. Kendaraan						
No	Jenis Barang	Merek	Tahun		Asal-Usul	Keterangan
			Pembuatan	Pembelian		
1	Motor Roda 2	Suzuki	-	-	-	-
2	Motor Roda 2	-	-	-	-	-

C. Bangunan						
No	Nama Barang	Kondisi Bangunan	Konstruksi		Luas Lantai (m2)	Status Tanah
			Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak		
1	Kantor Desa	Layak	Tidak	Beton	-	-
2	Kantor Karang Taruna	Kurang Layak	Tidak	Beton	-	-
3	Kantor Babinkamtibmas	Layak	Tidak	Beton	-	-
4	Kantor Babinsa	Layak	Tidak	Beton	-	-
5	Puskesmas	Layak	Tidak	Beton	-	-
6	Polides	Layak	Tidak	Beton	-	-

Sumber: Data Inventaris Aset Desa Kepenghuluan Teluk Nilap 2019

9.3 Tingkat Pendapatan Warga

Penduduk di Kepenghuluan Teluk Nilap yang belum/tidak bekerja merupakan jumlah yang cukup besar dalam struktur jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kepenghuluan ini. Dalam jumlah penduduk yang tidak/belum bekerja tersebut terdapat 1.533 jiwa yang berstatus sebagai Pelajar dan Mahasiswa, 2 jiwa yang merupakan pensiunan, serta 549 jiwa yang berusia 0-5 tahun. Dengan demikian penduduk di Kepenghuluan Teluk Nilap yang benar-benar belum/tidak bekerja berjumlah 1.116 jiwa atau sebesar 18,09% dari seluruh penduduk pada data Dirjen Dukcapil Kemendagri (2018). Besarnya penduduk yang masih pelajar dan mahasiswa memperlihatkan bahwa Kepenghuluan Teluk Nilap akan mendapatkan bonus demografi pada satu dekade ke depan dengan makin banyak penduduk yang akan memasuki usia angkatan kerja. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh para pihak di Kepenghuluan Teluk Nilap mempersiapkan ketersediaan lapangan kerja bagi warga di masa yang akan datang. Mengenai mata pencaharian selain penduduk yang belum/tidak bekerja lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 32. Jenis Mata Pencaharian Kepenghuluan Teluk Nilap

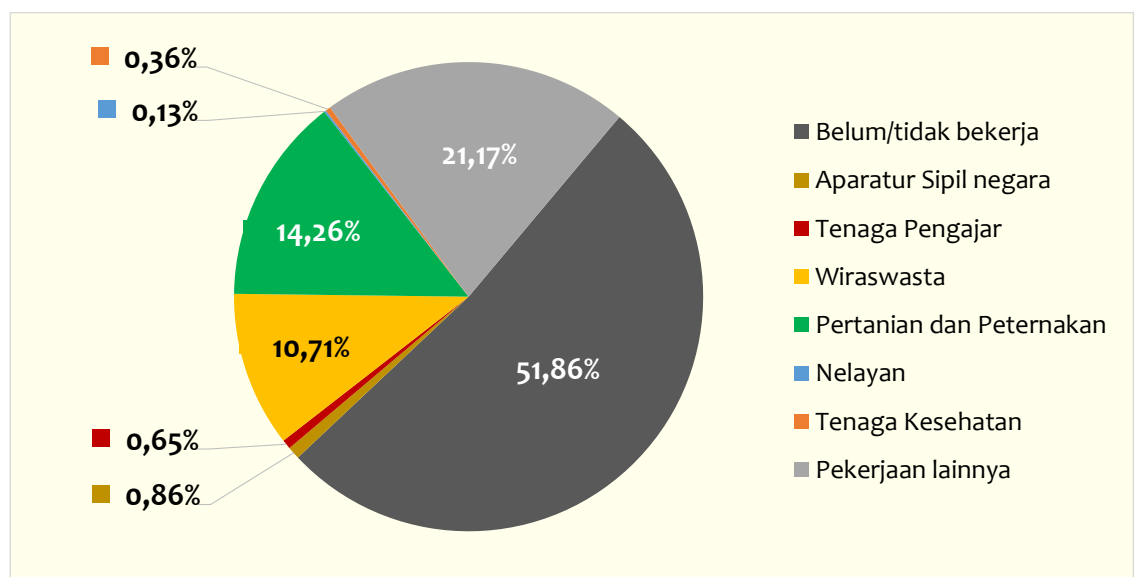
No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	Belum/tidak bekerja	3.200
2	Aparatur Sipil negara	53
3	Tenaga Pengajar	40
4	Wiraswasta	661
5	Pertanian dan Peternakan	880
6	Nelayan	8
7	Tenaga Kesehatan	22
8	Pekerjaan lainnya	1.306
Total		6.170

Sumber: Diolah dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (2018).

Dari seluruh jumlah penduduk, terdapat 115 jiwa penduduk atau 1,86% yang telah bekerja terserap pada mata pencaharian sektor formal sebagai Aparatur Sipil Negara, Tenaga Pengajar, dan Tenaga Kesehatan. Adanya warga kepenghuluan Teluk Nilap yang bekerja di sektor formal menunjukkan di Kepenghuluan Teluk Nilap telah ada pekerja dengan keterampilan dan kemampuan khusus yang diperoleh melalui jenjang pendidikan formal tertentu, terutama pada tingkat perguruan tinggi.

Selain di sektor formal, terdapat 2.855 jiwa yang bekerja di sektor non formal atau setara dengan 46,27% dari jumlah penduduk di Kepenghuluan ini. Mata pencaharian sektor non formal terdiri dari wiraswasta, pertanian dan peternakan, nelayan, serta pekerjaan lainnya. Dari besarnya penduduk yang bekerja di sektor non formal terdapat 2.194 jiwa atau sebesar 35,56% dari jumlah penduduk di Kepenghuluan Teluk Nilap yang menggantungkan hidupnya dari pengolahan tanah dan kekayaan alam di wilayah kepenghuluan ini. Mereka yang melakukan aktifitas keseharian mata pencaharian terkait dengan tanah dan kekayaan alam adalah yang bermata pencaharian pada pertanian dan peternakan, nelayan dan pekerjaan lainnya. Besarnya jumlah pekerjaan lain dalam data kependudukan memperlihatkan adanya jumlah penduduk yang melakukan mata pencahariannya dengan menjual tenaga yang mereka miliki sebagai buruh tani/kebun di wilayah kepenghuluan ini. Hal ini sangat mungkin karena adanya budidaya jenis tanaman komoditas pertanian yang membutuhkan tenaga kerja dalam perawatan dan pemanenan yang berlangsung intensif. Selain itu, penduduk yang melakukan usaha dengan berwiraswasta di Kepenghuluan ini sebagian juga terkait dengan proses distribusi hasil komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan yang dihasilkan dari wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap. Untuk lebih detil mengenai prosentase penduduk yang melakukan aktifitas mata pencaharian serta aktifitas mata pencaharian yang dilakukannya dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Gambar 13. Diagram Mata Pencaharian Masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap



Sumber: Diolah dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (2018).

Dapatlah disimpulkan bahwa ketergantungan pada tanah dan kekayaan alam yang ada di Kepenghuluan ini masih cukup besar terlihat dari aktifitas mata pencaharian yang dilakukan penduduk serta penduduk yang terlibat dalam aktifitas mata pencaharian tertentu di Kepenghuluan Teluk Nilap. Pertanian merupakan tumpuan dasar terbesar dalam ekonomi masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap. Pertanian yang dimaksud tak terbatas hanya pada kegiatan produksi komoditas dengan membudidayakan jenis tanaman tertentu tetapi telah juga memunculkan adanya kegiatan distribusi komoditas pertanian yang dilakukan warga di Kepenghuluan Teluk Nilap.

Pada wawancara dengan sejumlah rumah tangga di Kepenghuluan Teluk Nilap, sektor pertanian terutama petani merupakan mayoritas mata pencaharian pokok Kepala Rumah tangga dengan komoditas utama yang dibudidayakan adalah Kelapa Sawit. Pemenuhan kebutuhan hidup dalam rumah tangga melibatkan juga anggota rumah tangga yang lainnya yang juga melakukan mata pencaharian tambahan. Biasanya istri merupakan anggota rumah tangga yang melakukan mata pencaharian tambahan, meskipun tidak menutup adanya kepala rumah tangga, istri dan anak yang juga melakukan aktifitas mata pencaharian tertentu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam melakukan mata pencaharian biasanya adalah anggota rumah tangga yang sudah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan.

Rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan di Kepenghuluan Teluk Nilap memiliki rentang jumlah pendapatan yang berbeda-beda antara rumah tangga yang satu dengan rumah tangga yang lainnya. Terdapat perbedaan rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan dari yang terendah berjumlah Rp. 800.000,-/bulan hingga yang tertinggi adalah Rp. 7.000.000,-/bulan. Rentang pendapatan ini memperlihatkan adanya kesenjangan (disparitas) pendapatan diantara rumah tangga yang ada di Kepenghuluan ini. Kesenjangan ini terjadi terutama karena adanya besaran lahan yang dikelola serta mata pencaharian tambahan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Mengenai tingkat pendapatan warga berdasarkan rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 33. Tingkat Pendapatan Warga Berdasarkan Rumah Tangga

No	Rumah Tangga	Mata Pencaharian Pokok	Mata Pencaharian Tambahan	Rata-Rata Pendapatan Per bulan
	Rumah tangga A	Petani	Pedagang	Rp 2.000.000,-
	Rumah tangga B	Petani	Tidak ada	Rp 2.000.000,-
	Rumah tangga C	Petani	Buruh Harian Lepas	Rp 1.000.000,-
	Rumah tangga D	Petani	Tidak ada	Rp 3.000.000,-
	Rumah tangga E	Petani	Tidak ada	Rp 7.000.000,-
	Rumah tangga F	Petani	Pedagang	Rp 3.000.000,-
	Rumah tangga G	Petani	Tidak ada	Rp 3.000.000,-
	Rumah tangga H	Petani	Tidak ada	Rp 3.000.000,-
	Rumah tangga I	Petani	Tidak ada	Rp 3.000.000,-

	Rumah tangga J	PNS Guru	Tidak ada	Rp 5.000.000,-
	Rumah tangga K	Buruh/Tukang	Tidak ada	Rp 800.000,-
	Rumah tangga L	PNS	Tidak ada	Rp 6.000.000,-
	Rumah tangga M	Petani	Tidak ada	Rp 5.000.000,-
	Rumah tangga N	Petani	Tidak ada	Rp 1.200.000,-
	Rumah tangga O	Petani	Pedagang Pecah Belah	Rp 5.000.000,-
	Rumah tangga P	Petani	Tidak ada	Rp 3.000.000,-
	Rumah tangga Q	Petani	Tidak ada	Rp 2.000.000,-
	Rumah tangga R	Petani	Pedagang Bahan Pertanian	Rp 4.000.000,-

Sumber: Wawancara 18 Rumah Tangga di Kepenghuluan Teluk Nilap 2019

Pendapatan petani yang diperoleh dari budidaya komoditas kepala sawit sangat tergantung luas areal tanam dan jumlah tanaman yang diusahakan oleh petani. Dalam lahan seluas 1 Ha dapat menghasilkan kelapa sawit kurang lebih sebesar 800 Kg dalam satu kali panen yang dilakukan setiap 2 minggu sekali. Terdapat tahapan-tahapan pekerjaan yang rutin dilakukan oleh petani untuk budidaya tanaman sawit ketika sudah mulai berbuah. Mulai dari *memiring* yaitu membersihkan pada bagian bawah pohon sawit hingga terbentuk lingkaran, *meracun* untuk menyemprot tanaman gulma, menebas untuk membersihkan semak belukar, membersihkan tunas-tunas sawit yang tumbuh, serta melakukan pemupukan. Pada saat panen biasanya dilakukan dengan *mendodos* yaitu mengambil tandan buah sawit dengan alat dodos dan eggrek, setelah itu mengangkut tandan buah sawit dari kebun ke tempat penjualan sawit atau dalam istilah setempat *melangsir*. Pengangkutan dari dalam kebun ke jalan yang bisa dilalui kendaraan dilakukan dengan alat gerobak atau istilah setempat untuk menyebut kegiatan ini adalah *mengangkong*. Seluruh aktifitas dalam budidaya sawit membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya berasal dari dalam rumah tangga petani.

Dalam aktivitas kerja pada rumah tangga, peran laki-laki terlihat lebih banyak dibanding dengan kaum perempuan di Kepenghuluan Teluk Nilap terutama untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas mata pencaharian baik pertanian maupun non pertanian. Sedangkan peran perempuan lebih banyak pada kerja-kerja domestik rumah tangga. Untuk anak-anak baik perempuan dan laki-laki juga lebih banyak kadang-kadang terlibat dalam kerja-kerja domestik. Menurut penuturan warga dalam diskusi kelompok terfokus, adanya peran laki-laki yang lebih besar menunjukkan bahwa laki-laki baik secara agama dan adat yang dianut masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap harus mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam rumah tangga. Meskipun demikian perempuan juga memiliki peran yang strategis dalam mengurus kegiatan-kegiatan domestik dalam rumah tangga. Lebih jelas mengenai aktivitas keseharian laki-laki dan perempuan di Kepenghuluan Teluk Nilap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 34. Matrik Profil Aktivitas dalam analisis gender

No	Kegiatan	Aktifitas Dalam Keluarga						Aktifitas Di Luar Keluarga (Buruh dll)						Keterangan
		Laki-laki			Perempuan			Laki-laki			Perempuan			
		UM	KD	TP	UM	KD	TP	UM	KD	TP	UM	KD	TP	
1	Mencangkul	D	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	Kegiatan Lebih dominan dikerjakan oleh laki-laki
2	Mengasuh anak	-	-		D	-	-	-	-	-	-	-	-	Mengasuh anak dilakukan di rumah masing-masing
3	Peternak	D	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	Banyak dilakukan oleh laki-laki
4	Mamasak	-	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	Sebahagian besar dilakukan oleh perempuan
5	Cuci Baju	-	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	Kebanyakan dilakukan oleh perempuan
6	Mengambil Rumput	D	DA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sering dilakukan laki-laki baik orang dewasa maupun anak-anak
7	Ke pasar	-	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	Rata-rata dilakukan perempuan, tapi kadang juga laki-laki
8	Berjualan	-	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	Berjualan sering dilakukan perempuan tapi kadang juga laki-laki.
9	Berkebun	D		-		D	-	-	-	-	-			Berkebun dilakukan laki-laki tapi juga perempuan
10	Memancing / pasang lukah	D	DA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan memancing tidak menjadi kegiatan primer, tapi sering dilakukan oleh laki-laki kadang juga anak-anak
11	Bekerja di kantor	D	-	-		D	-	-	-	-	-	-	-	Berkerja dikantor kebanyakan laki-laki tapi ada juga perempuan.
12	Liburan	D	DA	-	D	DA	-	D	-	-	D	-	-	Liburan dilakukan oleh semua mulai dari orang dewasa dan anak-anak pada waktu tertentu.
13	Bersih-bersih	-	D	-	D	D	-	D	-	-	-	-	-	Yang sering melakukan biasanya adalah perempuan dan kadang juga laki-laki
Keterangan: UM: Umumnya; KD: Kadang-kadang; TP: Tidak Pernah D: Dewasa (15 tahun ke atas); A: Anak-anak (14 tahun ke bawah)														

Sumber: FGD I Penyusunan Laporan Profil DPG 2019.

Pembagian akses dan kontrol terhadap sumberdaya antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya merupakan hasil dari konstruksi sosial, budaya, dan politik yang berlangsung dalam suatu masyarakat. Persamaan dan perbedaan akses dan kontrol terhadap sumberdaya antara laki-laki dan perempuan dapat ditemukan juga berlangsung dalam masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap. Mengenai akses dan kontrol dalam analisis gender di Kepenghuluan Teluk Nilap terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 35. Matrik Profil Akses dan Kontrol Dalam Analisis Gender:

Sumber Daya	Akses		Kontrol		Keterangan
	PR	LK	PR	LK	
Sumber Daya Fisik					
1. Rumah	10%	90%	100%	-	Budaya adat penguasaan rumah Laki-Laki
2. Ladang Padi/ Sawah	50%	50%	-	100%	-
Sawit	-	100%	-	100%	-
Cabe	20%	80%	20%	80%	-
Semangka		100%	-	100%	-
Sayur Sayuran	25%	75%	25%	75%	-
3. Kendaraan	20%	80%	10%	90%	-
4. Tanah Warisan	25%	75%	20%	80%	Mengacu pada syariat Islam
Bersama	20%	80%	-	-	-
Sumber Daya Non Fisik	20%	80%	25%	75%	Ibu-ibu lebih ke konsumsi
Rapat / Pertemuan / Pesta	20%	80%	50%	60%	-

Sumber: FGD I Penyusunan Laporan Profil DPG 2019.

9.4 Industri dan Pengolahan di Desa

Sebagai wilayah dengan budidaya tanaman sawit yang masif oleh masyarakat, proses distribusi pemasaran komoditas hasil produksi budidaya sawit merupakan kunci bagi warga yang membudidayakan sawit untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Seiring dengan munculnya budidaya komoditas Kelapa Sawit maka terbentuk pula jejaring pemasaran untuk produk utama yang dihasilkannya yaitu Tandan Buah Sawit (TBS). Jejaring pemasaran ini ditandai dengan adanya mata rantai terendah dalam rantai pasok komoditas Kelapa Sawit berupa para pedagang pengumpul desa untuk komoditas Kelapa Sawit. Pada Kepenghuluan Teluk Nilap, setidaknya terdapat pedagang pengumpul desa untuk komoditas kelapa sawit sebanyak 16 Pedagang. Proses distribusi di tingkat desa dimulai oleh petani dengan membawa TBS yang telah dipanen kepada pedagang pengumpul desa ke tempat pengumpulan sawit atau yang biasa disebut Ram Sawit oleh masyarakat di Kepenghuluan Teluk Nilap. Menurut para pedagang pengumpul, penentuan harga pada komoditas TBS tergantung pada harga yang berlaku pada Pabrik Kelapa Sawit beserta fluktuasi harga yang terjadi dari penerimaan harga di PKS untuk pedagang pengumpul.

Di Kepenghuluan Teluk Nilap terdapat pula pedagang pengumpul komoditas ikan air tawar hasil usaha penangkapan ikan oleh masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan pada sungai-sungai alam maupun parit-parit di wilayah ini. Penentuan harga yang diterima nelayan tergantung pada kondisi harga ikan yang berlaku di pasar-pasar pada sekitar wilayah Kepenghuluan ini. Mengenai pedagang pengumpul Desa, komoditas yang diterimanya, serta harga beli yang diberikan kepada produser komoditas di Kepenghuluan Teluk Nilap terdapat pada tabel berikut:

Tabel 36. Pedagang Pengumpul Desa

No	Pengumpul	Komoditas	Harga Beli
1.	Pedagang Pengumpul A	Sawit	Rp. 1.050,-/kg
2.	Pedagang Pengumpul B	Sawit	Rp. 1.050,-/kg
3.	Pedagang Pengumpul C	Sawit	Rp. 1.050,-/kg
4.	Pedagang Pengumpul D	Sawit	Rp. 1.050,-/kg
5.	Pedagang Pengumpul E	Sawit	Rp. 1.050,-/kg
6.	Pedagang Pengumpul F	Sawit	Rp. 1.050,-/kg
7.	Pedagang Pengumpul G	Sawit	Rp. 1.000,-/kg
8.	Pedagang Pengumpul H	Sawit	Rp. 1.050,-/kg
9.	Pedagang Pengumpul I	Sawit	Rp. 1.050,-/kg
10.	Pedagang Pengumpul J	Sawit	Rp. 1.050,-/kg
11.	Pedagang Pengumpul H	Sawit	Rp. 1.050,-/kg
12.	Pedagang Pengumpul I	Sawit	Rp. 1.050,-/kg
13.	Pedagang Pengumpul J	Sawit	Rp. 1.050,-/kg
14.	Pedagang Pengumpul K	Sawit	Rp. 1.100,-/kg
15.	Pedagang Pengumpul L	Sawit	Rp. 1.100,-/kg
16.	Pedagang Pengumpul M	Sawit	Rp. 1.100,-/kg
17.	Pedagang Pengumpul N	Sawit	Rp. 1.100,-/kg
18.	Pedagang Pengumpul O	Sawit	Rp. 1.100,-/kg
19.	Pedagang Pengumpul P	Sawit	Rp. 1.100,-/kg
20.	Pedagang Pengumpul Q	Sawit	Rp. 1.100,-/kg
21.	Pedagang Pengumpul R	Ikan air tawar	Tergantung jenis Ikan gabus: Rp. 20.000,-/kg Ikan lele/limbad

Sumber: Wawancara Pedagang Pengumpul dan FGD II Penyusunan Laporan Profil DPG 2019

Produksi mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi hampir bisa dikatakan tidak ada dengan tidak dijumpai usaha produksi atau pabrik pengolahan yang mengolah bahan mentah dari Kepenghuluan Teluk Nilap. Usaha produksi dan pengolahan yang terdapat di Kepenghuluan ini pun masih sangat sedikit dalam penyerapan tenaga kerja, pun yang paling banyak terlibat didalamnya adalah laki-laki. Terdapat usaha produksi yang beroperasi di Kepenghuluan Teluk Nilap yaitu berupa usaha produksi makanan tempe yang pemasarannya di sekitar Kecamatan Kubu Babussalam. Selain itu terdapat usaha pembuatan perahu dari bahan kayu yang digunakan sebagai alat transportasi air di sekitar Kepenghuluan Teluk Nilap dan Kecamatan Kubu Babussalam.

Budidaya untuk Sarang Burung Walet yang menghasilkan komoditas bernilai cukup tinggi merupakan usaha produksi yang mulai berkembang saat ini di Kepenghuluhan Teluk Nilap. Setidaknya terdapat 16 buah bangunan sarang burung walet yang kini ada di Kepenghuluhan Teluk Nilap. Hasil produksi berupa sarang burung walet yang dihasilkan oleh burung walet dipasarkan ke pedagang pengumpul di desa tetangga hingga langsung dipasarkan di provinsi lain. Penyerapan tenaga kerja dalam usaha sarang burung walet juga terlihat masih sangat sedikit. Modal awal memulai usaha budidaya sarang burung walet memang cukup besar untuk membuat bangunan sarang burung walet, tetapi hasil dari penjualan sarang burung walet yang dipanen memang cukup menggiurkan. Apalagi jika rumah sarang burung walet yang dibangun ternyata produktif menghasilkan karena mampu menarik burung walet untuk singgah dan membuat sarang burung dalam bangunan tersebut. Lebih jelas mengenai usaha-usaha produksi dan pengolahan yang telah ada di Kepenghuluhan Teluk Nilap pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 37. Usaha Produksi & Pengolahan

No	Usaha Produksi / Pengolahan	Nama Usaha Produksi	Produk yang diolah/dihasilkan	Tenaga Kerja yang terlibat		Lingkup & Harga Pemasaran
				L	P	
1.	Tempe	Pengolahan Tempe	Tempe	1	1	Rp. 800,-/buah Dipasarkan di Kecamatan
2.	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet A	Sarang Burung Walet	1		Dijual ke pedagang pengumpul di kecamatan sebelah Harga: Rp. 12.000.000/Kg
3.	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet B	Sarang Burung Walet	1		Dijual ke pedagang pengumpul di kecamatan sebelah Harga: Rp. 12.000.000/Kg
4.	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet C	Sarang Burung Walet	1		Dijual ke pedagang pengumpul di kecamatan sebelah Harga: Rp. 12.000.000/Kg
5.	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet D	Sarang Burung Walet	1		Dijual ke pedagang pengumpul di kecamatan sebelah Harga: Rp. 12.000.000/Kg
6.	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet E	Sarang Burung Walet	1		Dijual ke pedagang pengumpul di kecamatan sebelah Harga: Rp. 12.000.000/Kg
7.	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet F	Sarang Burung Walet	1		Dijual ke pedagang pengumpul di kecamatan sebelah Harga: Rp. 12.000.000/Kg
8.	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet G	Sarang Burung Walet	1		Dijual ke pedagang pengumpul di kecamatan sebelah Harga: Rp. 12.000.000/Kg
9.	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet H	Sarang Burung Walet	1		Dijual ke pedagang pengumpul di kecamatan sebelah Harga: Rp. 12.000.000/Kg
10.	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet I	Sarang Burung Walet	1		Dijual ke pedagang pengumpul di kecamatan sebelah Harga: Rp. 12.000.000/Kg

11.	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet J	Sarang Burung Walet	1		Dijual ke pedagang pengumpul di kecamatan sebelah Harga: Rp. 12.000.000/Kg
12.	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet K	Sarang Burung Walet	1		Dijual ke pedagang pengumpul di kecamatan sebelah Harga: Rp. 12.000.000/Kg
13.	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet L	Sarang Burung Walet	1		Dijual ke pedagang pengumpul di kecamatan sebelah Harga: Rp. 12.000.000/Kg
14.	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet M	Sarang Burung Walet	1		Dijual ke pedagang pengumpul di kecamatan sebelah Harga: Rp. 12.000.000/Kg
15.	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet N	Sarang Burung Walet	1		Dijual ke pedagang pengumpul di kecamatan sebelah Harga: Rp. 12.000.000/Kg
16.	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet O	Sarang Burung Walet	1		Dijual ke pedagang pengumpul di kecamatan sebelah Harga: Rp. 12.000.000/Kg
17.	Budidaya Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet P	Sarang Burung Walet	1		Dijual ke pedagang pengumpul di kecamatan sebelah Harga: Rp. 12.000.000/Kg
18.	Pembuatan Perahu	Pembuatan Perahu	Perahu kayu	-	-	-

Sumber: Wawancara Pelaku Usaha Produksi dan Pengolahan Kepenghuluan Teluk Nilap.

Gambar 14. Usaha Produksi & Pengolahan



Pembuatan Perahu Motor di Jalan Arubayan



Ram Sawit di dusun Karya Bakti



Gedung Sarang Walet dan Ram Sawit di Dusun Karya Bakti



Gedung Sarang Walet di Dusun Karya Bakti



Gedung Sarang Walet di Dusun Karya Bakti



Gedung Sarabg Walet di Dusun Karya Bakti



Gedung Sarang Walet di Dusun Karya Nyata



Gedung Sarang Walet di Dusun Karya Nyata



Gedung Sarang Walet di Dusun Karya Nyata



Gedung Sarang Walet di Dusun Karya Nyata

Sumber: Dokumentasi Lapangan.

9.5 Potensi dan Masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut

Pada Kepenghuluan Teluk Nilap khususnya di lahan gambut, semua pemanfaatan lahan memiliki potensi serta masalah yang harus diatasi dalam pengelolaannya. Pemanfaatan lahan yang ada saat ini berupa pemukiman, kebun sawit baik oleh masyarakat maupun perusahaan, Ladang Migas, serta perikanan.

Masalah pada pemukiman adalah masih cukup luasnya pekarangan tetapi terbatas pada akses modal untuk mengelola lebih produktif, misalnya dengan penanaman jenis-jenis tanaman yang dapat dikonsumsi dan dipasarkan sebagai penghasilan tambahan. Selain itu banjir merupakan masalah klasik yang terus berulang setiap tahunnya pada kawasan pemukiman warga di Kepenghuluan Teluk Nilap. Karenanya potensi di kawasan pemukiman adalah banyaknya lahan yang belum produktif dalam pengelolaannya.

Pada kebun sawit yang di kelola oleh perusahaan adalah kurang transparannya perusahaan terhadap masyarakat di kepenghuluan ini terutama mengenai tanggung jawab sosial korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dan terutama berkaitan dengan pelaksanaan inti plasma untuk masyarakat. Dalam kebun sawit ini terdapat potensi bahwa plasma yang menjadi kewajiban perusahaan perkebunan Kelapa Sawit belum dikembangkan dengan baik, lahan plasma belum dibagikan kepada masyarakat untuk dikelola.

Dalam kebun sawit masyarakat terdapat banyak masalah yang dijumpai warga dalam mengelola kebun menjadi lebih produktif. Keterbatasan modal serta minimnya Akses pemodal menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengupayakan lahan kebun menjadi lebih produktif. Berbagai serangan hama yang menyerang tanaman sawit terutama ketika masih baru dilakukan penanaman bibit juga menjadi kendala dalam budidaya komoditas pertanian ini. Faktor Harga yang dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur serta ketersediaan alat pengangkutan merupakan kendala lainnya yang harus diselesaikan untuk membuat harga jual komoditas ini lebih stabil bagi petani. Minimnya harga ini tidak memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan produksi komoditas Kelapa Sawit. Meskipun banyak masalah pada pengelolaan kebun sawit masyarakat, tetapi terdapat sejumlah potensi yang di masa depan dapat dikembangkan dan memberikan nilai tambah bagi petani pada budidaya komoditas ini. Lidi sawit merupakan salah satu potensi yang belum dikembangkan saat ini, demikian juga dengan pelepah sawit yang bisa dimanfaatkan belum dapat dikembangkan lebih lanjut. Kelapa Sawit memiliki keunggulan dalam hal pemasaran yang mudah, meskipun belum diimbangi dengan harga yang dirasakan tepat dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani.

Pada ladang migas yang dikelola oleh perusahaan migas, masih ada masalah sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat yang belum diselesaikan terutama untuk proses eksplorasi migas di sekitar Lapangan migas yang sudah beroperasi. Selain itu masyarakat kepenghuluhan teluk nilap melihat tidak adanya keterbukaan perusahaan dalam proses perekrutan tenaga kerja. Sesungguhnya kehadiran eksplorasi dan produksi migas pada wilayah kepenghuluhan ini dapat menjadi potensi untuk menyerap warga yang telah memiliki ketrampilan untuk bekerja di dalamnya.

Kondisi air yang memiliki tingkat keasaman yang berubah-ubah menyulitkan upaya budidaya ikan, sehingga perikanan masih sangat tergantung dengan faktor alamiah perkembangan ikan dalam tubuh air yang ada di wilayah kepenghuluhan ini. Telah ada upaya budidaya ikan tetapi skala produksi yang berjalan masih sangat kecil. Potensi dari perikanan adalah budidaya perikanan masih belum optimal, serta terdapat pasar yang terbuka dari tingkat desa hingga di luar wilayah desa. Lebih ringkas mengenai potensi dan masalah yang ada di kepenghuluhan ini dalam pengelolaan lahan gambut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 38. Potensi dan masalah dalam Pengelolaan Lahan Gambut

POTENSI	MASALAH
PEMUKIMAN	
Banyak lahan dan pemukiman yang belum dimanfaatkan	Tidak ada modal dan selalu banjir
KEBUN SAWIT PERUSAHAAN	
Plasma, belum berjalan dengan baik, lahan plasma belum dibagikan,	Kurang terbuka terhadap masyarakat dan belum memenuhi janji terhadap masyarakat terutama dalam soal inti plasma Warga baru sebatas mendapat “Uang Cuma-Cuma”
KEBUN SAWIT MASYARAKAT	
belum banyak pemanfaatan lain di luar TBS: Lidi sudah dimanfaatkan tetapi terbatas Pelepah belum dimanfaatkan untuk pakan sapi, kayu bakar, dan campuran pupuk organik. Pemasaran mudah dan sudah di tempat	Modal masih kurang, Hama babi hutan, Monyet dan tikus. Harga tidak stabil karena faktor transportasi dan infrastruktur. Harga dibawah Rp. 1.000,-/kg, Petani tidak semangat memanen karena harus membayar upah pemanen.
MIGAS	
Penyerapan tenaga kerja masih kurang untuk warga lokal	Tidak terbuka dalam proses rekrutmen untuk pekerja Terdapat beberapa sengketa tanah yaitu ganti rugi lahan untuk proses eksplorasi.
NELAYAN / PERIKANAN	
- Belum dikembangkan secara optimal - Pemasaran di lokal desa	- Tingkat keasaman air berubah-ubah. - Skala produksi masih kecil.

Sumber: diolah dari hasil FGD I Penyusunan Laporan Profil DPG 2019.



Bab X

Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam

10.1 Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam

Mengikuti sejarah wilayah Kepenghuluan ini yang berawal pembukaan lahan pertanian di tahun 1916 untuk penanaman padi dengan sawah tadah hujan, aktivitas pertanian pada mulanya terkonsentrasi di tepian sungai alam yang merupakan lahan berjenis tanah mineral. Pertanian yang dilakukan warga berkembang dengan dibudidayakannya juga berbagai jenis tanaman seperti jagung, ubi kayu, sayur-sayuran dan palawija di wilayah Kepenghuluan ini. Keberadaan lahan gambut juga turut memberikan tempat untuk berkembangbiaknya berbagai jenis ikan yang dapat dikonsumsi serta menjadi mata pencaharian bagi warga di Kepenghuluan ini.

Wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Tidak hanya karena terdapat hutan, dan lahan budidaya pertanian, tetapi juga dapat ditemukan adanya deposit migas terbukti yang telah masuk dalam tahap eksploitasi produksi migas. Ladang minyak dan gas (migas) Pinang GS yang berada pada bagian Timur Kepenghuluan Teluk Nilap mulai ditemukan pada bulan Februari di tahun 1971 dan telah bertahun-tahun dilakukan operasi produksi di Ladang Migas ini. Lapangan migas Pinang GS ini termasuk dalam Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Migas Rokan, yang merupakan salah satu WKP atau blok migas yang produktif di Indonesia. Hingga saat ini ladang migas adalah salah satu pemanfaatan lahan di Kepenghuluan Teluk Nilap. Wilayah ladang migas ini pada umumnya berada di sebelah timur dari aliran Sungai Kubu yang masuk dalam KHG Sungai Kubu –Sungai Rokan.

Pada dekade tahun 1990-an masyarakat di Kepenghuluan ini mulai mengganti jenis tanaman komoditas pertanian yang dibudidayakan. Meningkatnya permintaan pasar akan produk-produk derivatif dari buah Kelapa Sawit menyebabkan harga Kelapa Sawit cukup bagus dan memberikan margin keuntungan yang tinggi dalam budidaya komoditas pertanian ini. Hal ini mendorong warga mengubah jenis tanaman yang telah diupayakan selama ini menjadi lahan pertanian untuk budidaya kelapa sawit yang cenderung monokultur. Proses ini terus berlangsung apalagi di awal dekade tahun 2000-an sawit telah dianggap primadona oleh para petani. Hal ini pula yang mendorong berlangsungnya pembukaan lahan di kawasan gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap. Penanaman jenis komoditas yang masif dibudidayakan ini telah mendorong pula terjadinya kebakaran karena praktik pembakaran lahan memudahkan untuk memulai pengolahan lahan selain juga dapat mengurangi tingkat keasaman tanah untuk ditanam. Selain pembukaan lahan oleh masyarakat, pembukaan lahan sawit juga dilakukan korporasi yang mendapatkan sertipikat HGU sejak tahun 2005 dimana lahan HGU yang dikeluarkan untuk perusahaan tersebut sebagian kecil berada dalam wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap. Pembukaan Lahan gambut oleh masyarakat pada umumnya dilakukan pada wilayah sebelah barat dari aliran Sungai Kubu dan di Sebelah utara dan selatan aliran sungai Tolang yang termasuk dalam wilayah KHG Sungai Barumun –Sungai Kubu.

Akibat dari pembukaan lahan ini adalah mulai dibangunnya parit-parit dalam areal lahan gambut dan semakin rentannya terjadi kebakaran lahan dan hutan di Kepenghuluan Teluk Nilap. Pembukaan lahan disertai dengan pembuatan parit-parit ini praktis bertujuan untuk mengeringkan lahan gambut sehingga dapat dilakukan penanaman di atas tanah tersebut. Tetapi kondisi keringnya lahan gambut ini juga telah menyebabkan terjadinya peristiwa kebakaran yang berulang-ulang dan meninggalkan wilayah dengan dominasi tutupan lanskap berupa semak belukar yang merupakan area terluas dair penutupan lahan di Kepenghuluan ini. Kondisi lahan yang semak belukar ini juga semakin meningkatkan kerentanan akan terjadi kebakaran lahan yang berulang.

Pemukiman merupakan pemanfaatan lahan terkecil yang saat ini ada di Wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap. Pemukiman ini mengikuti proses pembukaan lahan dan juga dinamika pertumbuhan penduduk yang kian bertambah. Dalam hal ini terdapat wilayah pemukiman yang relatif baru dan kemudian berkembang menjadi dusun karena adanya pembukaaan lahan untuk budidaya pertanian terutama untuk penanaman Kelapa Sawit. Lebih detil mengenai luasan dan prosentase serta posisi pemanfaatan lahan dapat dilihat pada tabel, diagram, dan peta berikut ini:

91

Sumber: Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DPG 2019.

Land Use Type	Percentage
Semak Belukar	81.70%
Kebun Sawit	16.56%
Ladang Migas	1.31%
Pemukiman	0.40%
Tubuh Air	0.03%

Gambar 16. Peta Pemanfaatan Lahan Kepenghuluan Teluk Nilap



Mengenai pola pemanfaatan, potensi, masalah, penerima manfaat dan status penguasaan dalam penggunaan lahan di Kepenghuluan Teluk Nilap oleh masyarakat dapat dilihat pada tabel pola penggunaan lahan dan tabel transek desa dibawah ini:

Tabel 40. Pola penguasaan dan Pemanfaatan Lahan di Kepenghuluan Teluk Nilap

YANG DIMANFAATKAN	POTENSI YANG BELUM DIMANFAATKAN	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	KELOMPOK PEMANFAATAN	STATUS MILIK	LOKASI
PEMUKIMAN					
Sebagai tempat tinggal & pekarangan lahan pertanian	Banyak lahan & pemukiman yang belum dimanfaatkan	Tidak ada modal & selalu banjir	Tempat tinggal & budidaya	Pribadi / Individu	Sebahagian Gambut di Dusun Benuang & Suak Sotul
KEBUN SAWIT PERUSAHAAN					
Sawit	Plasma, belum berjalan dengan baik, Lahan belum dibagikan, Warga baru mendapat “Uang Cuma-cuma”	Kurang terbuka terhadap masyarakat & belum memenuhi janji terhadap masyarakat	Usaha Perkebunan & Petani Kelapa Sawit	Perusahaan Perkebunan Sawit	Gambut
KEBUN SAWIT MASYARAKAT					
Sawit	belum banyak dimanfaatkan	Modal masih kurang, Hama babi hutan, Monyet & tikus. Kemudian harga tidak stabil	Ekonomi sebagai penghasilan utama masyarakat.	Pribadi / Individu	Di sebagian lahan Gambut di Dusun Benuang, Sungai Sirih & Suak Sotul
LADANG MIGAS					
Migas	Penyerapan tenaga kerja masih kurang untuk warga lokal	SDM memiliki ketrampilan sesuai yang dibutuhkan perusahaan. Terdapat beberapa sengketa masalah yaitu ganti lahan untuk eksplorasi.	Usaha migas	Perusahaan Migas swasta	Gambut di Dusun Teluk Durian

Sumber: FGD I Penyusunan Laporan Profil DPG 2019.

Tabel 41 Transek Kepenghuluan Teluk Nilap

DUSUN SUNGAI DURIAN	DUSUN KARYA NYATA	DUSUN KARYA BAKTI	DUSUN SUNGAI SIRIH	DUSUN SUAK SOTUL	DUSUN BENUANG
MASALAH					
Banjir, Hama Monyet dan Tupai, Harga Sawit tidak stabil	Banjir, Hama Monyet dan Tupai, Harga Sawit tidak stabil	Banjir, Hama Monyet dan Tupai, Harga Sawit tidak stabil	Banjir, Hama Monyet dan Tupai, Harga Sawit tidak stabil	Kebakaran, Banjir, Jalan Rusak, Hama Babi Hutan	Kebakaran, Banjir, Jalan Rusak, Hama Babi Hutan
PENGUNAAN LAHAN					
Kebun Sawit; Pemukiman; Lapangan Bola; SDN 002 Teluk Nilap; & SMPN 002 Kuba	Kebun Sawit; Pemukiman; Lapangan Bola; Tempat Pemakaman Umum; Kantor Polmas; & Masjid – Musala	Kebun Sawit; Pemukiman; Lapangan Bola; Kantor Kepenghuluan; SDN 004 Teluk Nilap; & SMAN 001 Kuba	Kebun Sawit; Pemukiman; Sarang Burung Walet; Yayasan Pendidikan Al Hidayah; & Ternak Sapi	Kebun sawit; Kebun Nanas; Kebun Sayuran; Peternakan; Pemukiman; & Musala	Kebun sawit; Kebun Nanas; Kebun Sayuran; Pemukiman; & Musala
STATUS LAHAN					
Hak Milik & Aset Desa	Hak Milik & Aset Desa	Hak Milik & Wakaf/Hibah	Hak Milik & Wakaf/Hibah	Hak Milik & Wakaf/Hibah	Hak Milik & Wakaf/Hibah
POTENSI					
Ram Sawit; Bengkel Las; & Peternakan kambing	Ram Sawit; Bengkel Motor; Pertamina; & Sarang Burung Walet	Ram Sawit; Bengkel Motor; Rumah makan; Sarang Burung Walet; & Cucian Mobil/motor	Ram Sawit; Tanaman Palawija; & Ternak Sapi	Sayuran; Ternak Kambing; & Ikan Air Tawar	Tanaman palawija; Ternak Kambing; & Ikan Air Tawar
JENIS TANAMAN					
Sawit	Sawit & Sayuran	Sawit, Mangga, Kelapa, Pinang, & Coklat	Sawit, Nanas, & Sayuran	Sawit, Nanas, & Sayuran	Sawit, Nanas, & Sayuran
KESUBURAN					
Subur	Subur	Subur	Subur	Subur	Subur

Sumber: Observasi dalam Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DPG 2019.

Gambar 17 Transek Kepenghuluhan Teluk Nilap

	DSN SEI. DURIAN	DSN KARYA NYATA	DSN KARYA BAKTI	DSN SEI. SIRIH	DSN SUAK SOTOL	DSN BENUANG
MASALAH	BANJIR HAMA MONYET DAN TUPAI HARGA SAWIT TIDAK STABIL	BANJIR HAMA MONYET-TUPAI HARGA SAWIT TIDAK STABIL	BANJIR HAMA MONYET-TUPAI HARGA SAWIT TIDAK STABIL	JALAN RUSAK HARGA SAWIT TIDAK STABIL HAMA MONYET-TUPAI	KEBAKARAN BANJIR JALAN RUSAK/BECER HAMA BABI HUTAN	KEBAKARAN BANJIR JALAN KURUS RAK HAMA BABI HUTAN
PENGUNAAN LAHAN	PERKEBUNGAN SAWIT PEMUKIMAN LAPANGAN BOLA KAKI SD NEGERI 002 KUBA SMP NEGERI 002 KUBA	PERKEBUNGAN SAWIT PEMUKIMAN LAPANGAN BOLA KAKI TEMPAT PERKEBUNGAN UMUM KANTOR POLISI KANTOR POLISI KANTOR POLISI KANTOR POLISI	PERKEBUNGAN SAWIT PEMUKIMAN LAPANGAN BOLA KAKI KANTOR POLISI KANTOR POLISI KANTOR POLISI KANTOR POLISI	PERKEBUNGAN SAWIT PEMUKIMAN SARANG BUKU KALAT YANGSI PENDIDIKAN AL- HIDAYAH PETERNAKAN SAPI	PERKEBUNGAN SAWIT NENAS SAYURAN PETERNAKAN KUBA LLA	PERKEBUNGAN SAWIT NENAS SAYURAN PETERNAKAN KUBA LLA
STATUS LAHAN	HAK MILIK ASET DESA	HAK MILIK ASET DESA	HAK MILIK WAKAF/HIBAH	HAK MILIK WAKAF/HIBAH	HAK MILIK WAKAF/HIBAH	HAK MILIK WAKAF/HIBAH
POTENSI	RAM SAWIT BENGKOLAS PETERNAKAN KAMBING	RAM SAWIT BENGKOL MOTOR PERTAMINI SARANG BUKU KALAT	RAM SAWIT BENGKOL MOTOR BENGKOL KALAT SARANG BUKU KALAT CUCIAN MOBIL/MOTOR	RAM SAWIT TANAMAN PALAUJA TERBUK SAPI	SAYURAN TERBUK KALING IKAN AIR TAWAR	TANAMAN PALAUJA TERBUK KALING IKAN AIR TAWAR
JENIS TANAMAN	SAWIT	SAWIT SAYURAN	SAWIT MANGGA KEPAPA PILGAL COKLAT	SAWIT NENAS SAYUR SAYURAN	SAWIT NENAS SAYUR SAYURAN	SAWIT NENAS SAYUR SAYURAN
KESUBURAN	SUBUR	SUBUR	SUBUR	SUBUR	SUBUR	SUBUR

Sumber: Observasi dalam Pemetaan Partisipatif Penyusunan Laporan Profil DPG 2019.

10.2 Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam

Penguasaan tanah dan sumber daya alam pada dasarnya terbagi dalam dua penguasaan besar legal formal, yang pertama adalah penguasaan tanah oleh negara dan yang kedua adalah penguasaan tanah oleh masyarakat termasuk di dalamnya penguasaan tanah oleh korporasi. Penguasaan tanah oleh Negara pada dasarnya meliputi Kawasan Hutan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No SK.314 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 4 / 2016 dengan luas keseluruhan adalah 27.918,20 Ha atau 87,91% dari luas Kepenghuluan Teluk Nilap. Kawasan hutan tersebut terdiri dari Hutan Produksi (HP) seluas 5.252,24 Ha, Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK) seluas 1.134,30 Ha, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas 21.531,65 Ha.

Lapangan Migas Pinang GS serta wilayah eksplorasi dan eksploitasi migas di Kepenghuluan Teluk Nilap jika dilihat dari penguasaan legal formal maka berada dalam kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK). Penguasaan tanah sebagaimana biasanya dalam kegiatan Migas di Indonesia menggunakan alas hak berupa Hak Pakai dan proses pembebasan lahan dimasukan dalam salah satu komponen biaya *cost recovery* yang ditagihkan pemegang operasi Kontrak Karya kepada Pemerintah Indonesia. (Bachriadi & Suryana, 2016) Dalam pengelolaan lahan migas, karena berada dalam HPK apabila ditemukan sumur-sumur migas produktif status lahan pada kawasan hutan tersebut dirubah menjadi Kawasan Area Penggunaan Lain, selanjutnya diberikan sertipikat dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Pakai. Kawasan migas ini berada pada lahan gambut dan masuk dalam KHG Sungai Kubu – Sungai Rokan. Dari tahun 1971, Lapangan Pinang GS mulai dieksplorasi dan masih terus dilakukan proses eksplorasi di sekitarnya untuk menemukan sumur-sumur migas yang potensial dan ekonomis dalam berproduksi. Pada kawasan HPK ini terdapat juga lahan yang sudah dibuka masyarakat untuk pemukiman dan budidaya pertanian dengan komoditas sawit serta terdapat areal yang merupakan semak belukar.

Pada kawasan HPT maupun HP juga terdapat pemukiman, area budidaya pertanian masyarakat serta area yang ditumbuhi semak belukar yang salah satu penyebabnya adalah terjadinya kebakaran yang berulang-ulang. Penguasaan tanah oleh masyarakat ini tidak didasarkan pada bukti kepemilikan tertentu dan sebagian hanya berdasarkan pada Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). SKT yang merupakan keterangan pendaftaran tanah ini dikeluarkan oleh Kepenghuluan. Sedangkan SKGR yang juga keterangan pendaftaran tanah untuk tanah yang telah beralih pengelolaannya melalui proses transaksi. Dalam Kawasan HPT dan HPK ini terdapat pula bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat dari luar Kepenghuluan. Menurut penuturan warga dalam Diskusi Kelompok Terfokus kedua untuk Penyusunan Laporan Profil DPG tahun 2019, penguasaan tanah oleh masyarakat dari luar Kepenghuluan sudah mencapai 50% dari luas tanah yang di Wilayah Teluk Nilap.

Adapun penguasaan tanah oleh masyarakat termasuk didalamnya oleh korporasi adalah Kawasan Area Penggunaan Lain (APL) dengan luas mencapai 3.841,17 Ha atau 12,09% dari luas wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap. Kawasan APL ini terdiri dari lokasi yang pertama berada di bagian Timur wilayah kepenghuluan ini seluas 2.524,85 Ha dan yang kedua dengan luas 1316,31 Ha berada di bagian Barat Daya dari wilayah Kepenghuluan ini. Kawasan APL ini pada umumnya merupakan lahan dengan jenis tanah mineral meskipun pada beberapa bagian merupakan lahan gambut. dalam Kawasan APL sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dapat dibebankan beberapa jenis hak-hak atas tanah. Pada tanah tersebut berdasarkan UUPA dapat dapat diberikan hak atas tanah kepada orang dan atau badan hukum dengan berbagai bentuk hak, dari yang tertinggi dan penuh yaitu Hak Milik (HM) untuk perorangan serta diberikan untuk penggunaan tanah oleh Badan Hukum seperti perusahaan dan juga lembaga/instansi pemerintah dengan bentuk hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Pakai (HP). Terdapat konsensi HGU untuk Perkebunan Kelapa Sawit yang diberikan sejak tahun 2005 yang luasnya berdasarkan hasil pemetaan mencapai 802,86 Ha atau 20,90% dari luas wilayah APL yang ada di wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap. Lahan Konsensi HGU ini pada umumnya memiliki jenis tanah gambut yang berada dalam KHG Sungai Kubu –Sungai Rokan. Sedangkan Kawasan APL yang dikuasai masyarakat adalah seluas 3.038,31 Ha, dimana kawasan APL pada Timur Laut wilayah Kepenghuluan ini adalah wilayah awal pembukaan lahan dan umumnya berjenis tanah mineral. Pada kawasan APL di bagian Timur Laut Kepenghuluan ini telah terdapat bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat tanah dengan alas hak berupa Hak Milik dan sebagian lagi yang dikuasai masyarakat masih berupa SKT dan SKGR.

Dalam penguasaan tanah di Kepenghuluan Teluk Nilap terdapat masalah yang berawal dari tidak adanya penetapan batas wilayah antar Kepenghuluan serta antar Kecamatan secara legal formil oleh instansi yang berwenang yang menjadi penyebab adanya saling klaim batas antar Kepenghuluan. Klaim batas ini menyebabkan adanya tanah-tanah baik pemukiman maupun lahan budidaya pertanian yang saling bersebelahan tetapi mendasarkan keterangan tanahnya berupa SKT dan SKGR yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan yang berbeda. Lebih jauh lagi terdapat pula lahan yang berada ditengah-tengah lahan-lahan lainnya dengan SKT atau SKGR yang dikeluarkan oleh masing-masing Kepenghuluan.

Ketidakhahaman masyarakat akan penguasaan tanah secara legal formil yang terbagi dua penguasaan ini menyebabkan warga pada umumnya tidak mengetahui implikasi hukum dari penetapan Kawasan Hutan. Kawasan Hutan di Kepenghuluan Teluk Nilap telah banyak berubah tutupan lahannya akibat dari aktifitas masyarakat baik dari Kepenghuluan itu sendiri maupun yang berasal dari luar Kepenghuluan. Secara faktual, penguasaan lahan yang sekarang terjadi adalah untuk masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap, Masyarakat dari luar wilayah kepenghuluan, korporasi Perkebunan Sawit dan korporasi Migas.

[illegible]

Desa Sungai Terap, Kec. Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi | 97

10.3 Penguasaan Lahan Gambut atau Parit/Handil

Kondisi faktual lahan gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap terutama pada kawasan HPT dan HPK telah dimanfaatkan sebagai lahan budidaya pertanian, pemukiman, serta didominasi semak belukar akibat karhutla dan tidak segera dikelola pasca kebakaran di lahan tersebut. Pembukaan lahan gambut terjadi di dua wilayah KHG yaitu KHG Sungai Barumun –Sungai Kubu, serta KHG Sungai Kubu – Sungai Rokan.

Pada KHG Sungai Kubu – Sungai Rokan pembukaan lahan gambut juga termasuk di dalamnya pada Kawasan APL yang telah diberikan konsensi HGU kepada korporasi Perkebunan Kelapa Sawit. Serta pada wilayah KHG ini pembukaan lahan gambut pada kawasan HPK untuk kegiatan operasi Migas, dimana saat awal proses konstruksi dilakukan penimbunan untuk memperkeras kondisi tanah sehingga berubah menjadi tanah mineral. Pembuatan parit-parit tentu tidak dapat terhindarkan dalam pembukaan lahan untuk mulai mengelola lahan guna aktifitas operasi korporasi. Pembukaan lahan juga dilakukan oleh masyarakat baik untuk pemukiman maupun lahan budidaya pertanian. Pada umumnya lahan-lahan yang dibuka masyarakat juga terdapat parit-parit yang berfungsi untuk jalur transportasi ke kebun dan untuk mengurangi kelimpahan air agar lebih kering sehingga lahan tersebut dapat ditanami.

Untuk wilayah yang masuk KHG Sungai Barumun – Sungai Kubu dimana terdapat kawasan APL yang pada umumnya merupakan tanah mineral dengan pemanfaatan lahan berupa pemukiman, lahan budidaya pertanian serta semak belukar. Parit-parit yang dibuat di kawasan ini biasanya terhubung dengan parit di wilayah lahan gambut. Sedangkan Kawasan HPT pada wilayah KHG ini terdiri dari tanah mineral yang berada di tepian aliran sungai alam, serta tanah gambut yang berada pada radius jarak antara 500 meter hingga 3,5 km dari tepi aliran sungai alam. Pada lahan gambut di HPT ini terdapat pula pemanfaatan serta penutupan lahan untuk budidaya pertanian, pemukiman dan semak belukar. Pembukaan lahan gambut untuk budidaya pertanian biasanya diikuti pula dengan pembuatan parit yang berfungsi membuat kondisi tanah lebih kering sehingga dapat dilakukan proses pengolahan tanah untuk budidaya tanaman pertanian.

Pembukaan lahan oleh masyarakat biasanya dilakukan secara berkelompok dimana dalam kelompok tersebut terdapat ketua kelompok yang ditunjuk oleh Penghulu. Kelompok ini biasanya disebut kelompok Pancang. Membagi dan menetapkan lokasi dan luas tanah yang dibuka dan akan dikelola oleh masing-masing anggota Kelompok Pancang adalah tugas dari Ketua Pancang dalam kelompok tersebut.

Setelah lahan dibuka baru kemudian masing-masing warga mengurus SKT untuk lahan yang telah dibuka. Penguasaan lahan gambut pada kawasan HPT di Kepenghuluan Teluk Nilap pada umumnya hanya mendasarkan pada SKT yang diurus oleh warga ke pihak Kepenghuluan.

Jika terjadi peralihan pengelolaan lahan melalui proses transaksi antar warga atas tanah yang telah dikelola tersebut maka biasanya warga mengurus SKGR ke pihak kepenghuluan dan diperkuat oleh pihak Kecamatan. Tidak semua warga mengurus SKT atau SKGR atas tanah yang dikuasainya karena biaya pengurusan ke pihak Kepenghuluan dirasa cukup mahal oleh sebagian warga.

Pembuatan parit-parit kecil antar lahan untuk pembatas antar tanah pada awalnya sangat jarang dibuat oleh warga. Parit-parit utama ada di semua dusun dan awalnya digunakan juga untuk jalur transportasi dari dan ke kebun serta untuk mengeluarkan hasil produksi pertanian dari kebun yang dikelola warga. Tetapi saat ini pembuatan parit antar lahan kebun warga merupakan hal yang penting untuk mencegah merambatnya api ke kebun jika terjadi peristiwa Kebakaran. Pembukaan lahan untuk penanaman sawit saat ini menggunakan teknik stacking yang menggunakan alat berat dimana parit-parit pembatas juga sekaligus dibangun dalam pembukaan lahan ini. Meskipun demikian tidak semua warga menggunakan teknik ini karena cukup membutuhkan modal yang besar dalam pengerjaannya.

10.4 Peralihan Hak Atas Tanah (termasuk Lahan Gambut)

Proses peralihan hak atas tanah yang umumnya terjadi di Kepenghuluan Teluk Nilap saat ini menggunakan dua model utama, yaitu dengan cara transaksi serta pemberian. Jual beli, barter atau pertukaran, serta tukar tambah yang merupakan pola umum dalam model transaksi tidak semuanya dapat ditemukan dilakukan oleh warga Kepenghuluan Teluk Nilap dalam peralihan hak atas tanah. Paling umum dan sering dijumpai pada peralihan hak atas melalui transaksi adalah jual beli, yaitu warga menjual tanah kepada warga lain yang biasanya dilakukan oleh warga karena adanya kebutuhan keuangan. Transaksi dengan cara barter atau pertukaran hampir tidak dapat ditemukan terjadi untuk peralihan hak atas tanah antar warga di Kepenghuluan Teluk Nilap. Pertukaran tanah dengan benda lain setelah terlebih dahulu ditaksir nilai masing-masing obyek dan apabila terdapat selisih nilai benda maka salah satu pihak akan menutupi selisih nilai benda tersebut yang merupakan pola tukar tambah, juga tidak ditemukan dalam masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap.

Pewarisan, hibah, dan wakaf yang merupakan pola dalam model pemberian, ketiganya dapat ditemukan masih berlangsung dalam masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap untuk proses peralihan hak atas tanah. Hukum waris yang digunakan umumnya bersandar pada hukum waris Islam sebagaimana Islam merupakan mayoritas agama pada masyarakat Kepenghuluan Teluk Nilap. Sedangkan pemberian tanah untuk kepentingan ibadah atau untuk kepentingan umum biasanya berupa wakaf sesuai yang diatur dalam ajaran Islam dan merupakan tanah yang dipisahkan dari tanah pribadi yang diperuntukan untuk kepentingan waqaf tersebut.

10.5 Sengketa Tanah di Lahan Gambut dan Non-Gambut

Batas-batas definitif antar wilayah baik di tingkat kepenghuluan maupun kecamatan yang belum jelas serta persoalan administrasi kependudukan pada kecamatan dan kepenghuluan menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan di wilayah kepenghuluan ini. Ketiadaan batas definitif antar wilayah kepenghuluan dan antar wilayah kecamatan menyebabkan adanya klaim masyarakat antar kepenghuluan terutama pada lahan-lahan hasil pembukaan. Klaim ini mulai terjadi karena ketika pembentukan kecamatan Babussalam yang dimekarkan dari Kecamatan Kubu tidak segera diterbitkan Peraturan Bupati beserta peta kecamatan yang berisikan batas definitif dari kecamatan dimana Kepenghuluan Teluk Nilap termasuk didalamnya.

Salah satu kekhawatiran warga dalam sengketa ini adalah hilangnya penguasaan tanah yang telah dikelolanya jika tanah tersebut ternyata berada dalam wilayah administratif Kepenghuluan lain. Terdapat beberapa alasan mengapa warga merasa khawatir akan hal tersebut, yaitu *Pertama*, warga kurang memahami bahwa hak atas tanah tidak hilang jika seseorang tinggal di luar kepenghuluan yang berbeda meskipun berbeda Kecamatan apalagi larangan penguasaan tanah *absentee* tidak diterapkan; *Kedua*, warga terutama pendatang merasakan adanya perlindungan di masing-masing kepenghuluan dengan pemberian status sebagai penduduk Kepenghuluan tersebut; *Ketiga*, terutama warga yang telah mengurus keterangan tanah di masing-masing kepenghuluan akan mendapatkan kerugian biaya pengurusan bila tanahnya ternyata tidak dalam Kepenghuluan tempat mengurus keterangan tanah. Dengan situasi seperti itu, warga kemudian membela masing-masing kepenghuluan yang telah memberikan pengakuan status kependudukan serta keterangan mengenai tanah yang dikelolanya.

Eksplorasi dan eksploitasi migas di Kepenghuluan Teluk Nilap menurut warga menyebabkan adanya sengketa dengan perusahaan migas dalam soal pembebasan lahan yang kini belum terselesaikan. Hal ini karena adanya perbedaan pandangan dalam melihat status tanah yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap khususnya pada wilayah eksplorasi dan eksploitasi migas yang masuk dalam Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)/blok migas Rokan. Lapangan Pinang GS mulai dieksploitasi sejak tahun 1971, dan masih terus dilakukan proses eksplorasi untuk menemukan sumur migas yang potensial dan ekonomis dalam berproduksi. Kawasan Lapangan Pinang GS serta wilayah eksplorasi dan eksploitasi yang ada di Kepenghuluan Teluk Nilap jika dilihat dari penguasaan legal formal maka berada dalam kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), sedangkan penguasaan tanah sebagaimana lazimnya dalam kegiatan migas di Indonesia menggunakan alas hak atas tanah berupa Hak Pakai (Bachriadi & Suryana, 2016).

Dalam pengelolaan lahan untuk industri migas, karena berada dalam HPK jika ditemukan sumur-sumur migas yang produktif maka status kawasannya dirubah menjadi Kawasan APL yang selanjutnya dapat diberikan Sertipikat Hak Pakai. Adapun warga mendasarkan hak tanah yang digunakan untuk industri migas adalah tanah garapan yang dikelolanya dengan bukti berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) ataupun Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Dalam diskusi kelompok terfokus, sengketa ini belum terselesaikan dan mengarah pada proses ganti rugi untuk warga yang tanahnya digunakan untuk kegiatan perusahaan migas. Usaha menjembatani antara warga dan perusahaan dilakukan pihak Kepenghuluan namun belum menemukan penyelesaian.

Di Kepenghuluan Teluk Nilap sengketa/konflik penguasaan lahan antar warga jarang terjadi atau jika pun ada tidak membesar hingga berperkara di pengadilan. Jika ada sengketa mengenai batas tanah antar warga maka antara para pihak yang bersengketa bermusyawarah untuk menyelesaikannya. Jika salah satu pihak belum bersepakat sehingga tidak dapat diambil keputusan penyelesaian sengketa oleh para pihak dalam musyawarah, ketua RT, Ketua RW dan Kepala Dusun akan dilibatkan oleh para pihak yang bersengketa untuk menengahi dalam musyawarah lanjutan. Kepenghuluan dilibatkan dalam musyawarah jika antar pihak bersengketa tidak menemukan titik temu pada musyawarah di RT/RW ataupun Dusun, biasanya musyawarah di Kepenghuluan ini mampu mendamaikan sengketa antar para pihak.



Bab XI

Proyek Pembangunan Desa

11.1 Program Pembangunan Desa

Program dan kegiatan pembangunan di Kepenghuluan Teluk Nilap di tahun 2018 terbagi dalam empat bidang utama, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan, Bidang Pembangunan Kepenghuluan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Bidang-bidang itu kemudian disusun sebagai program dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan serta dirumuskan untuk kemudian diputuskan program beserta kegiatan apa saja yang menjadi prioritas dan hendak dilaksanakan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kepenghuluan Teluk Nilap setiap tahunnya.

Kegiatan rutin penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kepenghuluan serta pelayanan kepada masyarakat Kepenghuluan merupakan kerja-kerja yang dilakukan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan dalam program pembangunan Kepenghuluan Teluk Nilap. Lebih dari setengah alokasi anggaran di Bidang ini yaitu sebesar 55,29% ditujukan pada kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan, serta alokasi untuk Kegiatan Operasional RT/RW sebesar 26,64% dari anggaran belanja pada bidang ini.

Tabel 42 Program dan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan

No	Bidang/Kegiatan
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kepenghuluan
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2	Kegiatan Operasional Kantor Kepenghuluan
3	Kegiatan Operasional BPK
4	Kegiatan Operasional RT/RW
5	Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penghulu
6	Kegiatan Penyusunan RPJMKep
7	Kegiatan Penyusunan RPKKep
8	Kegiatan Pelaksanaan Musrenbangkep
9	Kegiatan Penyusunan APBKep
10	Kegiatan Pengisian dan Penginputan Profil Kepenghuluan
11	Kegiatan Pembuatan Peta Desa
12	Kegiatan Penyaluran RASTRA bagi Keluarga Manfaat (KPM)
13	Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Purna Bakti Penghulu

Sumber: APBKep Kepenghuluan Teluk Nilap 2018.

Kegiatan-kegiatan pada Bidang Pembangunan merupakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum di wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap. Kegiatan pembangunan fasilitas umum untuk terutama mendukung akses masyarakat merupakan porsi terbesar dalam penganggaran belanja dalam bidang ini yaitu sebesar 82,13%, yang terdiri dari jalan, jembatan (jembatan dan Box Culvert), serta gorong-gorong. Meskipun demikian terdapat satu kegiatan untuk fasilitas sosial di bidang Kesehatan yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar 12,12% dari belanja pada bidang pembangunan ini.

Tabel 43 Program dan Kegiatan Bidang Pembangunan Kepenghuluan

No	Bidang/Kegiatan
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kepenghuluan
1	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa
2	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
3	Kegiatan Pembangunan Jalan Baru (Galian/ Timbunan)
4	Kegiatan Pembangunan Jembatan
5	Kegiatan Pembangunan Box Culvert
6	Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong
7	Kegiatan Semenisasi Halaman

Sumber: APBKep Kepenghuluan Teluk Nilap 2018.

Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang sumber anggarannya dialokasikan dari ADK dan Bankeu dapat terlihat adanya dukungan yang cukup besar terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Kepenghuluan ini. Alokasi anggaran untuk seluruh kegiatan-kegiatan pembinaan keagamaan tersebut besarnya 72,00% dari seluruh alokasi anggaran belanja di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Selain upaya meningkatkan ketertiban dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat, terdapat pula perhatian terhadap anak dan remaja dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada bidang ini.

Tabel 44 Progaram dan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Bidang/Kegiatan
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1	Kegiatan Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
2	Kegiatan MTQ Tingkat Kepenghuluan
3	Kegiatan Peningkatan Keshalehan Sosial
4	Kegiatan Pembinaan LPMKep
5	Kegiatan Pembinaan Masyarakat Mesjid (Imam)
6	Kegiatan Pembinaan Anak Mengaji
7	Kegiatan Hari Besar Nasional
8	Kegiatan Pembinaan Keolahragaan
9	Kegiatan Pembinaan Masyarakat Terhadap Kenakalan Remaja

Sumber: APBKep Kepenghuluan Teluk Nilap 2018.

Sebagian Pendapatan Transfer berupa ADK dan DK dialokasikan untuk menjalankan program Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan yang merupakan bidang dengan jumlah kegiatan terbanyak dibanding dengan kegiatan-kegiatan pada program lainnya di Kepenghuluan Teluk Nilap. Alokasi anggaran belanja terbesar pada bidang ini ada pada kegiatan Pemberdayaan PAUD sebesar 20,66 % dari total anggaran bidang ini dan yang terkecil sebesar 2,01% pada kegiatan kegiatan sosialisasi POSTEKDESA. Jika diperhatikan kegiatan-kegiatan dalam bidang ini masih lebih banyak berisikan sosialisasi dan pembinaan perangkat kepenghuluan yang sebenarnya adalah kerja rutin dari Kepenghuluan. Terjadinya peristiwa kebakaran lahan yang berulang-ulang juga menjadi perhatian dalam bidang ini dengan adanya Kegiatan Masyarakat Peduli Api

Tabel 45 Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

No	Bidang/Kegiatan
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1	Kegiatan Pemberdayaan Kepada PKK Kepenghuluan
2	Kegiatan Pemberdayaan Kepada Lembaga Kepemudaan/ Karang Taruna
3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu
4	Kegiatan Pemberdayaan Paud
5	Kegiatan BBGRM Kepenghuluan
6	Kegiatan Sosialisasi Penyusunan RPJM
7	Kegiatan Pembentukan BUMKep
8	Kegiatan Pelatihan Pengembangan BUMKep
9	Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Kepenghuluan
10	Kegiatan Sosialisasi dan Pendaataan Potensi serta Aset Kepenghuluan
11	Kegiatan Sosialisasi POSTEKDES
12	Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pendapatan Asli Kepenghuluan
13	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kepenghuluan
14	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA)

Sumber: APBKep Kepenghuluan Teluk Nilap 2018.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kepenghuluan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Kepenghuluan saling bekerjasama membangun Kepenghuluan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kepenghuluan. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kepenghuluan menuju kemandirian Kepenghuluan. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dengan mudah dapat diakses masyarakat Kepenghuluan, maka diharapkan kegiatan pembangunan seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

11.2 Program Kerjasama dengan Pihak Lain

Pada Tahun 2018, Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Riau sebagai pelaksana tugas pembantuan pemerintah daerah dalam restorasi gambut menjalankan kerja-kerja BRG melalui Program Pembasahan Gambut dan Program Revitalisasi Sosial Ekonomi pada Kepenghuluan Teluk Nilap di tahun 2018. Pada Program Pembasahan Gambut dengan melalui pembentukan kelompok masyarakat dilaksanakan pembangunan sekat kanal sebanyak 142 unit di wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap. Sedangkan Program Revitalisasi Sosial Ekonomi pelaksanaannya berupa pemberian bantuan ternak sapi kepada kelompok

masyarakat yang dibentuk dalam Program Revitalisasi Sosial Ekonomi di Kepenghuluan Teluk Nilap.



Bab XII

Persepsi terhadap Restorasi Gambut

Restorasi gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap awalnya dipandang warga sebagai upaya pembangunan sarana fisik berupa penyekatan parit dan pembuatan sumur yang bertujuan untuk menjaga lahan gambut tetap basah sehingga tidak mudah terjadi kebakaran lahan. Hal ini memperlihatkan bahwa di awal program DPG, warga sudah memahami pembasahan (*rewetting*) merupakan hal yang penting dalam upaya memulihkan lahan gambut. Masih diperlukan upaya agar warga meningkat pemahamannya tentang penanaman kembali lahan gambut (*revegetating*) dan revitalisasi ekonomi masyarakat (*revitalizing*) dalam upaya Restorasi Gambut. Warga di Kepenghuluan Teluk Nilap pada umumnya menyatakan bahwa restorasi gambut perlu dilaksanakan di wilayah Kepenghuluan ini serta bersedia terlibat melalui proses pelaksanaan yang partisipatif.

Mengenai pembasahan lahan gambut, pada umumnya warga memberikan pendapat yang positif untuk upaya penyekatan parit yang sudah pernah dilakukan. Alasan dari pendapat yang positif tersebut adalah upaya pembasahan akan membantu mencegah terjadi kebakaran lahan. Terdapat pula warga yang berpendapat agar upaya pembasahan melalui pembuatan sekat parit ditingkatkan kualitas fisik dari bahan yang digunakan untuk sekat kanal yang telah dibuat. Warga ada pula yang berpendapat bahwa upaya penyekatan kanal dan parit ini menyebabkan lahan menjadi sulit untuk ditanami karena kondisi lahan menjadi basah. Dampak dari program restorasi di lahan gambut yang sudah dirasakan oleh warga dengan adanya penabatan adalah debit dan volume air di parit stabil, dimana air di parit menjadi penuh serta tidak mengalir sehingga parit menjadi lambat surut terutama ketika musim kemarau. Dengan penabatan menjadi tetap basah dan tidak mudah terbakar sehingga kedepannya kebakaran lahan tidak mudah terjadi lagi. Pada musim hujan, penabatan juga menyebabkan lahan pertanian tergenang, tetapi penabatan pada tempat yang jauh dari pemukiman menurut warga membantu mencegah terjadinya banjir pada area pemukiman.

Mengenai jenis tanaman untuk dibudidayakan di lahan gambut, warga berpendapat terdapat jenis-jenis tanaman yang cocok untuk dibudidayakan. Untuk buah-buahan warga berpendapat bahwa nanas, mangga, pinang dan coklat cocok untuk dibudidayakan di lahan gambut. Jenis tanaman lainnya berupa tanaman sayur-sayuran dan palawija dianggap memiliki kesesuaian untuk dibudidayakan di lahan gambut. Sedangkan untuk tanaman penghasil bahan pangan pokok warga berpendapat bahwa jagung cukup tepat dibudidayakan di lahan gambut.



Bab XIII

Penutup

13.1 Kesimpulan

Penguasaan tanah dan sumber daya alam pada dasarnya terbagi dalam dua penguasaan besar legal formal, yang pertama adalah penguasaan tanah oleh negara dan yang kedua adalah penguasaan tanah oleh masyarakat termasuk di dalamnya penguasaan tanah oleh korporasi. Penguasaan tanah oleh Negara meliputi Kawasan Hutan yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan luas keseluruhan 27.918,20 Ha atau 87,91% dari luas Kepenghuluan Teluk Nilap, terdiri dari Hutan Produksi (HP) 5.252,24 Ha, Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK) 1.134,30 Ha, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 21.531,65 Ha. Adapun penguasaan tanah masyarakat termasuk di dalamnya korporasi adalah Kawasan Area Penggunaan Lain (APL) dengan luas mencapai 3.841,17 Ha atau 12,09% dari luas Kepenghuluan Teluk Nilap.

Pada radius setelah 500 meter hingga 3 km dari tepi sungai-sungai alam dan setelah area tanah mineral, kita akan menemukan jenis tanah gambut di Kepenghuluan ini. Tanah gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap saat ini kondisi pemanfaatan lahannya berupa Lahan pemukiman, budidaya pertanian masyarakat dan perusahaan, ladang migas dan semak belukar. Luas kawasan gambut di Kepenghuluan Teluk Nilap dari hasil pemetaan partisipatif 2019 adalah 22.344,96 Ha atau 70,36% dari luas Kepenghuluan ini.

Baik dari sisi kualitas maupun kuantitas keanekaragaman hayati di Kepenghuluan Teluk Nilap dipengaruhi perubahan lanskap akibat pemanfaatan lahan hutan beserta hasil hutan. Pemanfaatan hasil hutan dan perubahan lahan hutan untuk budidaya pertanian mengubah lanskap Kepenghuluan ini berawal untuk kebutuhan hidup warga, tetapi berlanjut ke produksi intensif komoditas memenuhi permintaan pasar. Dominannya upaya budidaya pertanian monokultur dimana Kelapa Sawit menjadi tanaman utama.

Pemanfaatan hasil hutan kayu serta kebakaran menyebabkan menurunnya populasi jenis-jenis pohon kayu, terdapat jenis-jenis pohon kayu tertentu sulit ditemui keberadaannya jika dibandingkan beberapa dekade lalu. Perubahan tutupan lanskap serta perburuan untuk konsumsi dan perdagangan merupakan faktor utama menurunnya kualitas dan kuantitas fauna. Terdapat fauna yang bertahan dan adaptif karena pertumbuhan populasi tinggi menjadi pengganggu budidaya pertanian masyarakat. Untuk jenis-jenis burung karena proses perpindahannya mudah, dapat bertahan keberadaannya. Sementara hewan-hewan air bertahan populasinya karena terdapat banyak anak sungai dan parit-parit yang menjadi tempat hidup dari fauna air tersebut.

Kepenghuluan Teluk Nilap merupakan wilayah yang dibuka masyarakat yang datang dan bermukim untuk mengembangkan kegiatan pertanian di kawasan tanah mineral pada tepi Sungai Kubu. Jenis tanaman awal yang dibudidayakan masyarakat yaitu padi, jagung, ubi, sayur-sayuran dan palawija. Budidaya padi yang dikembangkan adalah sawah tadah hujan. Perubahan lanskap gambut dimulai dengan pembukaan lahan untuk penanaman komoditas Kelapa Sawit di lahan yang dibuka seiring dengan dibangun parit-parit ke area pembukaan lahan. Selain upaya pembukaan lahan oleh masyarakat, terdapat pula investasi minyak dan gas (migas) serta perkebunan yang beroperasi dan turut merubah lanskap di wilayah ini.

Sejak akhir dekade 1990-an dan awal dekade 2000-an perubahan dalam lanskap Kepenghuluan Teluk Nilap berlangsung cepat. Upaya pembukaan lahan untuk budidaya Kelapa Sawit yang monokultur disertai pembuatan parit-parit menyebabkan kondisi lahan gambut kering sehingga rentan terjadi kebakaran lahan. Akibat kebakaran lahan meningkatkan kerentanan kebakaran karena tidak segera dikelola dan tumbuh semak belukar yang mudah terbakar ketika kebakaran kembali. Peristiwa kebakaran lahan berulang kali terjadi, paling tidak sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi empat kali kebakaran dimana hanya tahun 2016 tidak terjadi kebakaran lahan. Kebakaran tahun 2018 merupakan kebakaran dengan jumlah titik api (*Hotspot*) terbanyak.

Di Kepenghuluan Teluk Nilap khususnya di lahan gambut, semua pemanfaatan lahan memiliki potensi serta masalah yang harus diatasi dalam pengelolaannya. Pemanfaatan lahan yang ada saat ini berupa pemukiman, kebun sawit baik oleh masyarakat maupun perusahaan, Ladang Migas, serta perikanan pada badan air yang ada di wilayah ini.

Mata pencaharian utama warga Kepenghuluan Teluk Nilap bergantung pada tanah dan kekayaan alam, terlihat dari besarnya penduduk bermata pencaharian Pertanian dan Peternakan serta Nelayan, serta sangat dimungkinkan warga bermata pencaharian Pekerjaan lainnya merupakan Buruh Tani/Kebun pada sektor pertanian. Warga di Kepenghuluan Teluk Nilap sudah ada yang terserap sebagai tenaga kerja di sektor formal sebagai Aparat Sipil Negara (ASN), Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pengajar. Mata pencaharian lainnya adalah Wiraswasta, yang umumnya terhubung dengan sektor pertanian dimana kegiatan perdagangan yang tumbuh adalah jual beli komoditas hasil pertanian serta perdagangan untuk pemenuhan konsumsi harian warga. Sedangkan usaha produksi yang berjalan

adalah pembuatan tempe, budidaya sarang burung walet serta pembuatan perahu.

13.2 Saran

Aktifitas Restorasi gambut perlu dikembangkan dengan menyelaraskan pada kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang telah mengelola lahan di kawasan gambut. Beberapa saran yang didapatkan selama proses penyusunan laporan ini untuk para pihak adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kinerja Kepenghuluan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Kepenghuluan Teluk Nilap. Dimulai dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan yang diperkuat substansi partisipasinya hingga proses pelaksanaan pembangunan yang transparan. Peningkatan kinerja administrasi Kepenghuluan juga diperlukan sehingga gambaran pembangunan di Kepenghuluan ini dapat terekam dengan baik yang akan membantu dalam merencanakan pembangunan ke depan.
- 2) Potensi-potensi yang terdapat di Kepenghuluan ini perlu didorong menjadi produk-produk yang memiliki nilai tambah melalui pengolahan produk setengah jadi atau produk jadi. Proses pemberian nilai tambah ini terutama pada hasil tanaman pertanian yang telah dibudidayakan warga dimana terdapat produk lain yang dihasilkan selain produk utama yang telah dipasarkan. Untuk Sawit terdapat lidi sawit dan pelepah yang belum diolah lebih lanjut, sedangkan Nanas untuk buah masih bisa diolah menjadi berbagai jenis produk makanan serta bagian selain buah dimanfaatkan untuk pupuk organik.
- 3) Dengan pemahaman pembasahan lahan gambut (*rewetting*) yang cukup baik di warga, dibutuhkan upaya meningkatkan pemahaman warga tentang penanaman kembali (*revegetating*) dan revitalisasi ekonomi warga (*revitalizing*). Dampak program restorasi gambut sudah dirasakan warga dengan adanya penabatan adalah lahan menjadi basah dan tidak mudah terbakar sehingga kedepannya kebakaran lahan tidak mudah terjadi lagi. Warga mengharapkan penabatan kedepannya tetap dapat digunakan sebagai jalur transportasi untuk mengelola pertanian.
- 4) Penanaman kembali (*revegetation*) lahan gambut perlu dilakukan untuk mengurangi kerentanan kebakaran pada lahan gambut yang telah terbakar dan menjadi semak belukar sehingga ekosistem lahan gambut dapat pulih dan terjaga. Warga berpendapat jenis-jenis tanaman yang cocok dibudidayakan yaitu Nanas, Mangga, Pinang, Coklat, Sayur-sayuran, Palawija, dan Jagung sesuai untuk dibudidayakan di lahan gambut.

- 5) Penyelesaian dan penetapan batas-batas definitif wilayah Kepenghuluan dan Kecamatan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap. Bukan hanya menghindari konflik wilayah dengan Kepenghuluan dan Kecamatan lain serta kelancaran proses pembangunan di Kepenghuluan ini, lebih jauh lagi para pihak yang melakukan intervensi pembangunan akan lebih mudah menentukan bentuk intervensi yang tepat. Selain itu kepastian batas wilayah Kepenghuluan akan membantu proses penanganan Karhutla jika terjadi kembali, serta proses restorasi gambut akan lebih terarah dalam wilayah Kepenghuluan Teluk Nilap.
- 6) Diperlukan peningkatan pengetahuan warga tentang tanah dan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan aspek hukum, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pemahaman yang baik akan hal tersebut di warga, pengelolaan lahan gambut ke depannya akan menjadi lebih berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat yang telah mengelola lahan gambut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachriadi, D., & Suryana, E. (2016). Land Grabbing and Speculation for Energy Business: A Case Study of ExxonMobil in East Java, Indonesia. *Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement*, 37(4), 578-594.
doi:10.1080/02255189.2016.1197825
- Bernstein, H. (2010). *Class Dynamics of Agrarian Change*. Halifax, Nova Scotia: Fernwood Publishing.
- BPS Kabupaten Rokan Hilir. (2017). *Kecamatan Kubu Babussalam Dalam Angka 2017*. Kabupaten Rokan Hilir: BPS Kabupaten Rokan Hilir.
- BPS Kabupaten Rokan Hilir. (2018). *Kecamatan Kubu Babussalam Dalam Angka 2018*. Kabupaten Rokan Hilir: BPS Kabupaten Rokan Hilir.
- Climate-Data.org. (2019, April 04). CLIMATE TELUK NILAP. Dipetik April 03, 2019, dari Climate-Data.org: <https://en.climate-data.org/asia/indonesia/riau/teluk-nilap-575100/>
- Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. (2018, Desember 30). Aplikasi Visualisasi Data Kependudukan. Dipetik Maret 15, 2019, dari Portal Sistem Informasi Geografis Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>
- Dollah, L. (2017, Februari 23). Lamku Sayang - Lamku "Menghilang" (Bagian II). Dipetik Maret 8, 2019, dari GoPesisir: <https://www.gopesisir.com/berita/2017/02/lamku-sayang-lamku-menghilang-bagian-ii>
- Junus, H. (2016). *Bab Al-Qawaid, Kitab Pegangan hukum dalam Kerajaan Siak*. Pekanbaru: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu (BKPBM).
- Kepenghuluan Teluk Nilap. (2017). *Profil Kepenghuluan Desa Teluk Nilap*. Kabupaten Rokan Hilir: Kepenghuluan Desa Teluk Nilap.
- Kepenghuluan Teluk Nilap. (2019). *Laporan Bulanan Kependudukan Kepenghuluan Teluk Nilap Bulan Desember tahun 2018*. Kabupaten Rokan Hilir: Kepenghuluan teluk Nilap.
- Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN). (2019). *Informasi Modis & NPP*. (Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN)) Dipetik Februari 11, 2019, dari Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN): <http://modis-catalog.lapan.go.id/monitoring/#>
- Lombard, D. (2006). *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Forum Jakarta Paris, & Ecole Francaise d'Extreme-Orient.
- Masyukri, & Kutoyo, S. (Penyunt.). (1983). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Raiu*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republika. (2017, Maret 28). *Babul Qawaid, Konstitusi Tertulis Kesultanan Siak*. Dipetik 02 11, 2019, dari Republika.Co.Id: <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/03/28/onj4u9313-babul-qawaid-konstitusi-tertulis-kesultanan-siak>
- Suryadiputra, N. (2018). *Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut Bersama Masyarakat. Bahan Training of Trainers (ToT) Program Desa Peduli Gambut Tahun 2018*. Bogor: Wetlands International- BRG.

LAMPIRAN

Dokumentasi

FGD I Kepenghuluan Teluk Nilap



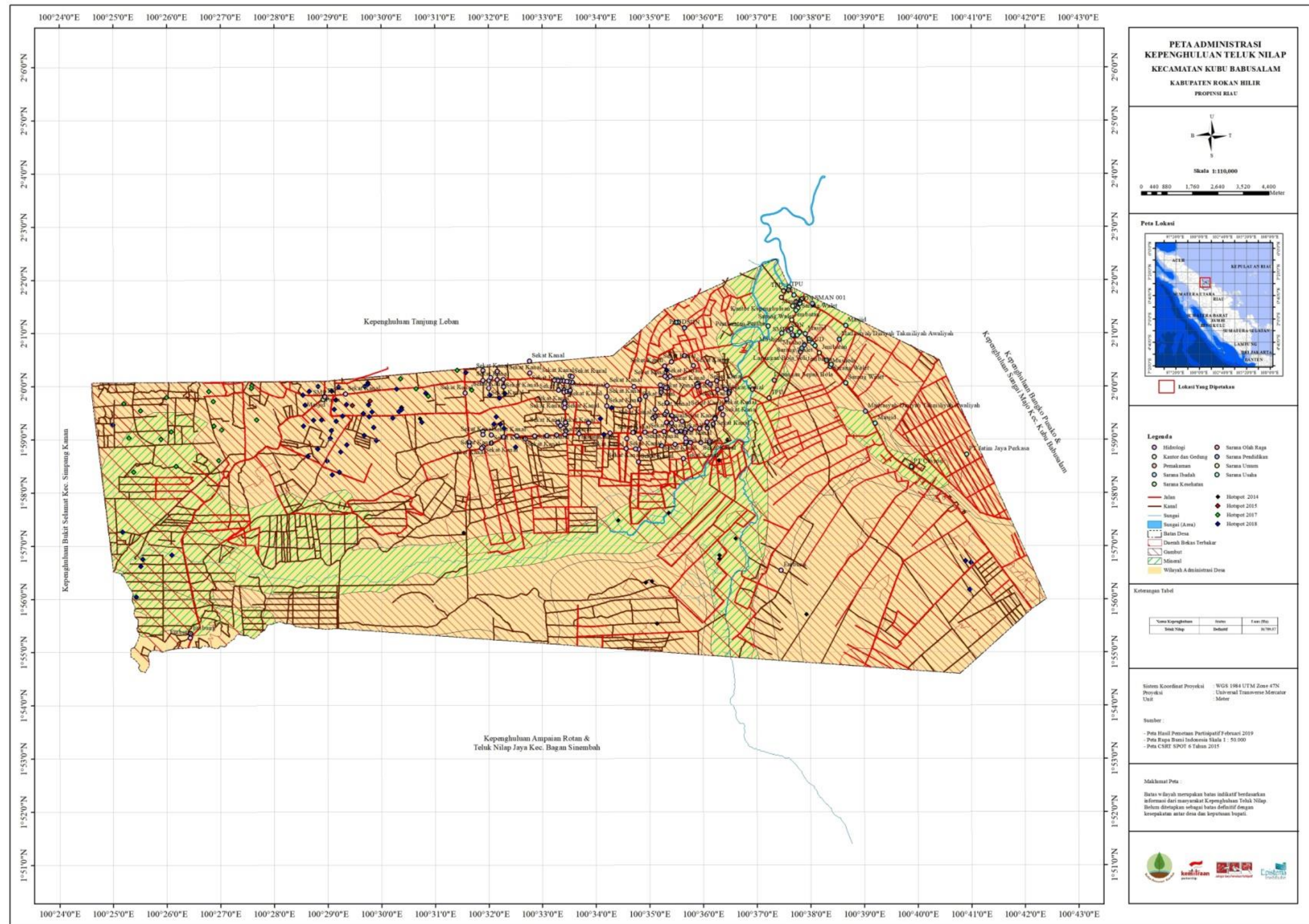


FGD II Kepenghuluan Teluk Nilap

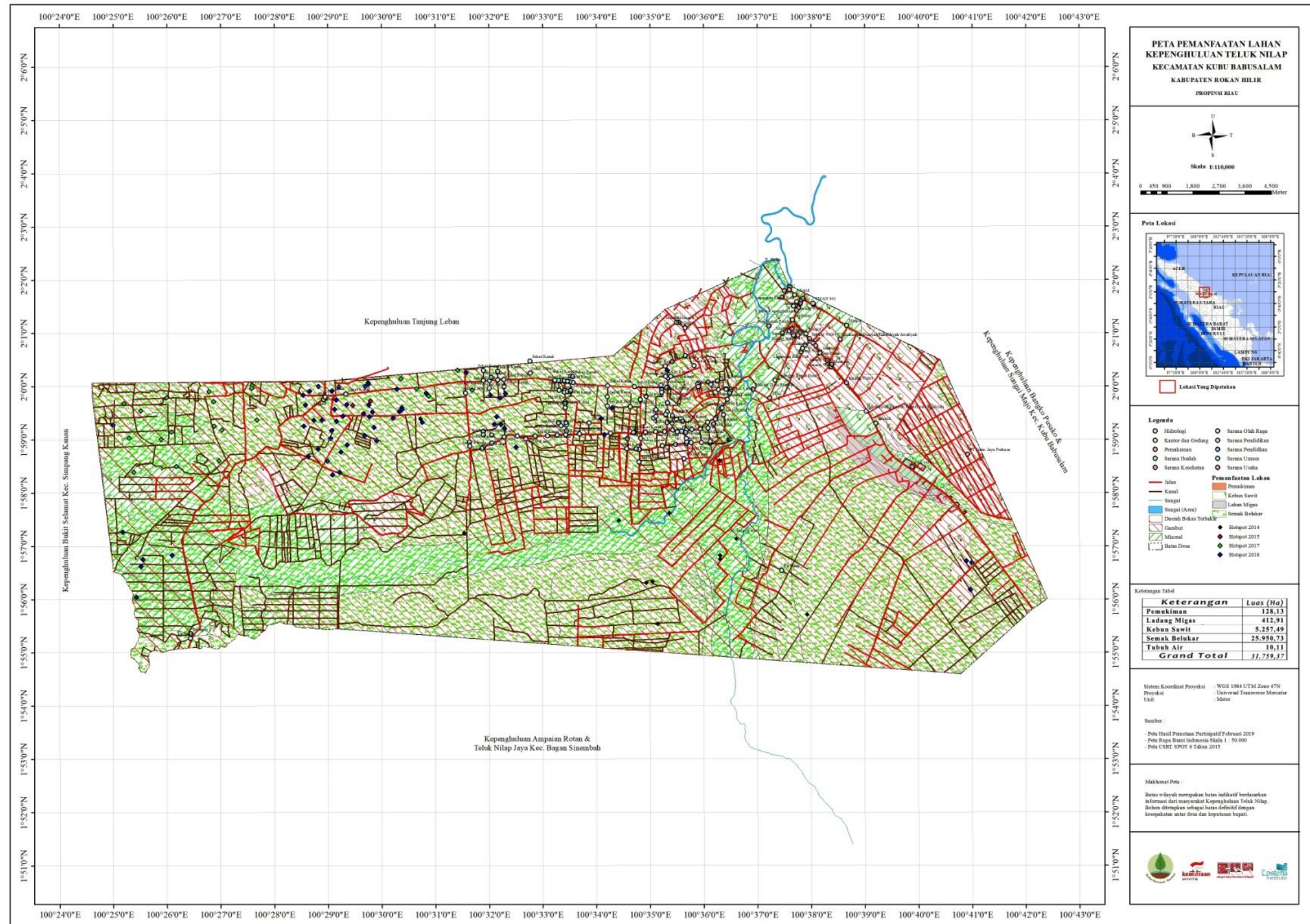




Peta Administrasi Kepenghuluan Teluk Nilap



Peta Pemanfaatan Lahan Kepenghuluan Teluk Nilap



Peta Penguasaan Lahan Kepenghuluan Teluk Nilap

